

Toleransi merupakan salah satu nilai-nilai hidup yang penting bagi setiap anak untuk hidup rukun dan harmonis dalam kemajemukan masyarakat Indonesia (Andayani, 2013). Toleransi adalah elemen penting dari komunikasi antar budaya; kemampuan untuk memahami hal yang penting tidak hanya dalam diri sendiri, tetapi dalam budaya yang berbeda, untuk melihat nilai dimulai dari yang lain, kepercayaan orang lain, untuk menghindari alasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral "(Juwita, Salim, & Winarno, 2018). Raihani (2011:25) "Tolerance literally means patience with differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked." Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai (Raihani, 2011). Sementara itu karakter toleransi adalah: "Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya" (Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 2010)

Semoga buku ini bisa menjadi sekelumit inspirasi bagi kita untuk tetap menjaga semangat toleransi di negara tercinta kita Indonesia.



Jl. Kaktus 1 No. 39 Blok 7
Kel. Rancaekek Kencana,
Kec. Rancaekek Kencana,
Kab. Bandung 40394.
e-mail : bukulangkaID@gmail.com

ISBN 978-623-94556-0-6



MEMAHAMI TOLERANSI

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

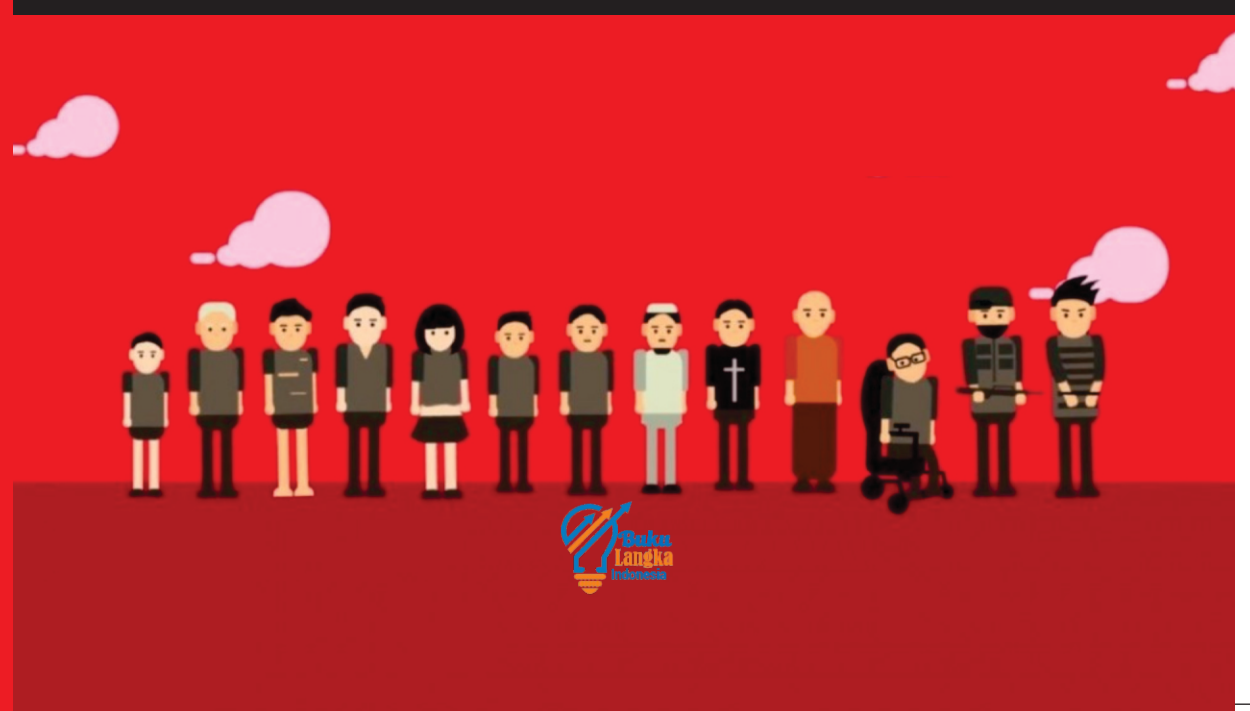


Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

MEMAHAMI TOLERANSI

DI TENGAH KEBERAGAMAN
MASYARAKAT

(Tinjauan Sosiologis)



Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

MEMAHAMI TOLERANSI
DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT
(Tinjauan Sosiologis)



**MEMAHAMI TOLERANSI
DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT**
(Tinjauan Sosiologis)

ISBN : 978-623-94556-0-6

Hak cipta dilindungi undang-undang ada pada Penulis.
Hak penerbitan ada pada Penerbit

Penulis:

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

Diterbitkan oleh

CV Buku Langka Indonesia

Jl. Kaktus 1 No. 39 Blok 7 Kel. Rancaekek Kencana.

Kec. Rancaekek Kencana. Kab Bandung 40394. e-mail :
bukulangkaID@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2020

Ukuran : 16 x 24 cm ; 198 hal Sumber gambar cover :

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/uploads/post/large-ham-bebasketik-f6b7e1222bb4f43498e1f32b4448cbdb.jpg>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta
Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – 3

BAB I PENDAHULUAN – 9

BAB II FENOMENA KEKERASAN

ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA – 17

- A. Pengertian Kekerasan — 18
- B. Agama — 21
- C. Akar Kekerasan atas Nama Agama Indonesia — 29
- D. Solusi Mengatasi Kekerasan Atas Nama Agama — 33

BAB III KONSEP DAN TEORI

DALAM MEMAKNAI TOLERANSI – 41

- A. Konsep Toleransi — 41
- B. Konsep Keberagaman — 47
- C. Konsep Etnis — 48
- D. Konsep Pluralisme — 53
- E. Konsep Masyarakat — 54
- F. Konsep Masyarakat Lokal dan Pendatang — 60
- G. Konsep Agama dan Masyarakat — 61
- H. Konsep Akulturasi — 68
- I. Konsep Budaya — 68
- J. Konsep Kearifan Lokal / *Local Wisdom* — 73
- K. Konsep Modal Sosial — 76
- L. Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Utara — 87
- M. Multikulturalisme — 9

- N. Teori Tindakan Sosial — 101
- O. Teori Fenomenologi — 104
- P. Teori Interaksi Sosial — 108
- Q. Perilaku Sosial — 115
- R. Teori Etnometodologi — 117
- R. Teori Interaksi Simbolik — 118
- S. Teori Konflik — 121
- T. Hasil-Hasil Kajian yang Relevan — 126
- U. Kerangka Konseptual — 131

**BAB IV TOLERANSI MASYARAKAT KOTA TOMOHON
DI TENGAH KEBERAGAMAN — 135**

- A. Profil Provinsi Sulawesi Utara — 135
- B. Deskripsi Kota Tomohon — 137
- C. Toleransi Masyarakat Lokal Kota Tomohon — 146

BAB VI PENUTUP — 171

- A. Kesimpulan — 171
- B. Implikasi Teoritik dan Praktis — 172

DAFTAR PUSTAKA — 183

GLOSARIUM — 191

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

MEMAHAMI TOLERANSI

DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT

(Tinjauan Sosiologis)



**MEMAHAMI TOLERANSI
DI TENGAH KEBERAGAMAN MASYARAKAT
(Tinjauan Sosiologis)**

ISBN : 978-623-94556-0-6

Hak cipta dilindungi undang-undang ada pada Penulis.
Hak penerbitan ada pada Penerbit

Penulis:

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd
Jeane Mantiri S.AB, M.A.P

Diterbitkan oleh

CV Buku Langka Indonesia

Jl. Kaktus 1 No. 39 Blok 7 Kel. Rancaekek Kencana.

Kec. Rancaekek Kencana. Kab Bandung 40394. e-mail :
bukulangkaID@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2020

Ukuran : 16 x 24 cm ; 198 hal

Sumber gambar cover :

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/uploads/post/large-ham-bebasketik-f6b7e1222bb4f43498e1f32b4448cbdb.jpg>

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 17 Agustus 2045 Indonesia akan merayakan abad pertama kemerdekaannya. Namun jalan untuk mencapai abad pertama kemerdekaan tampaknya akan sulit bila dilihat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Semua masalah nasional ini disebabkan oleh rendahnya dan semakin mudarnya semangat kebangsaan serta rasa nasionalisme. Rendahnya semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme Indonesia itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor.

Akhiri-akhir ini semakin marak kasus atau kejadian intoleransi di Indonesia. Intoleran merupakan bentuk ketidaksiapan atau ketidakmampuan menerima perbedaan pandangan, kepercayaan dan perilaku orang lain. Selama hanya terbatas pada tataran sikap dan gagasan, pandangan intoleran adalah sesuatu yang normal. Karena setiap orang cenderung untuk membenarkan keyakinan yang telah dipercayainya. Namun intoleran akan mulai menjadi persoalan ketika diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Sebagai contoh beberapa kasus Intoleransi di Indonesia bisa dilihat dari data yang disampaikan oleh Imparsial bahwa selama tahun 2019 terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sejumlah 28 kasus di antaranya dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisasi oleh organisasi atau kelompok agama tertentu. Ada 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang tersebar di provinsi Indonesia. Jenisnya beragam, mulai dari pelarangan pendirian

tempat ibadah, larangan perayaan kebudayaan etnis, perusakan tempat ibadah hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama. Menurut data Imparsial jumlah kasus intoleran paling banyak adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, dan ibadah agama atau kepercayaan tertentu, yakni sebanyak 12 kasus. Selanjutnya, 11 kasus intoleran terjadi dalam bentuk pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah suatu agama tertentu. Sementara untuk perusakan rumah ibadah ada 3 kasus, pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis, dalam hal ini Cap Go Meh sebanyak 2 kasus, pengaturan cara berpakaian, imbauan tentang aliran keagamaan tertentu, dan penolakan bertetangga dengan tidak seagama masing-masing 1 kasus. Selanjutnya Setara Institute juga mengungkapkan bahwa sejumlah kasus intoleransi kembali terjadi beberapa hari belakangan. Sejumlah pihak mengecam keras aksi kekerasan agama tersebut, karena dianggap menodai keberagaman dan mencederai wajah demokrasi di Tanah Air. Setara Institute menganggap kasus kekerasan agama ini sebagai 'tamparan' bagi tokoh agama dan pemerintah yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta pada 8 hingga 10 Februari 2018. Beberapa data kasus intoleransi yang berhasil dihimpun oleh Setara Institute adalah sebagai berikut: (1). Perusakan Pura di Lumajang Jawa Timur, (2). Penyerangan terhadap ulama di Lamongan, (3). Perusakan masjid di Tuban, (4). Ancaman bom di kelenteng Kwan Tee Koen Karawang, (5). Serangan Gereja Santa Lidwina Sleman, (6). Persekusi terhadap Biksu di Tangerang.

Kejadian-kajian yang menunjukkan sikap-sikap intoleransi di atas tentu bertola belakang dengan kenyataan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang plural dan multikultural. Beberapa faktor utama yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka adalah: Pertama, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi ladang subur untuk mengungkapkan keresahan-keresahan beberapa kelompok etnik yang selama ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kedua, tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia ternyata disadari atau tidak,

terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik. Perebutan sumber daya yang seharusnya berdasarkan kompetisi yang sehat dengan kriteria universal malah menjadi ladang perbenturan nilai-nilai budaya. Pada titik ini, seperti pada masa kolonial, stratifikasi ekonomi tumpang tindih dengan identitas etnik. Tidak terjadi integrasi fungsional di antara beragam kelompok etnik. Ketiga, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan ialah dalam masyarakat Indonesia, identitas etnik, dalam hal ini kesukuan yang meliputi nilai budaya dan adat istiadat, masih menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama di pedesaan (Wirutomo, 2011).

Fenomena-fenomena konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini mengindikasikan kurangnya toleransi; baik toleransi terhadap agama lain maupun terhadap budaya lain. Toleransi pada hakikatnya adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya (Raihani, 2011).

Toleransi merupakan salah satu nilai-nilai hidup yang penting bagi setiap anak untuk hidup rukun dan harmonis dalam kemajemukan masyarakat Indonesia (Andayani, 2013). Toleransi adalah elemen penting dari komunikasi antar budaya; kemampuan untuk memahami hal yang penting tidak hanya dalam diri sendiri, tetapi dalam budaya yang berbeda, untuk melihat nilai dimulai dari yang lain, kepercayaan orang lain, untuk menghindarkan alasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral (Juwita, Salim, & Winarno, 2018). Raihani (2011:25) *“Tolerance literally means patience with differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked.”* Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai (Raihani, 2011). Sementara itu karakter toleransi adalah: *“Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya”* (Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 2010)

Kerukunan masyarakat Sulawesi Utara sampai saat ini masih tetap terjaga dengan baik karena kuatnya kearifan lokalnya. Masyarakat Sulawesi tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa (Pangalila & Mantiri, 2019). Menurut Nico Gara, kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara adalah realita. Hal ini diakui baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama (etnis), ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan. Berdasarkan kenyataan ini, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang posisi kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang dapat dijadikan sebagai sumber bagi pendidikan karakter.

Semoga buku ini bisa menjadi sekelumit inspirasi bagi kita untuk tetap menjaga semangat toleransi di negara tercinta kita Indonesia.

Tomohon, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – 3

BAB I PENDAHULUAN – 9

**BAB II FENOMENA KEKERASAN
ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA – 17**

- A. Pengertian Kekerasan – 18
- B. Agama – 21
- C. Akar Kekerasan atas Nama Agama Indonesia – 29
- D. Solusi Mengatasi Kekerasan Atas Nama Agama – 33

**BAB III KONSEP DAN TEORI
DALAM MEMAKNAI TOLERANSI – 41**

- A. Konsep Toleransi – 41
- B. Konsep Keberagaman – 47
- C. Konsep Etnis – 48
- D. Konsep Pluralisme – 53
- E. Konsep Masyarakat – 54
- F. Konsep Masyarakat Lokal dan Pendatang – 60
- G. Konsep Agama dan Masyarakat – 61
- H. Konsep Akulturasi – 68
- I. Konsep Budaya – 68
- J. Konsep Kearifan Lokal / *Local Wisdom* – 73
- K. Konsep Modal Sosial – 76
- L. Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Utara – 87

- M. Multikulturalisme – 98

- N. Teori Tindakan Sosial – 101
- O. Teori Fenomenologi – 104
- P. Teori Interaksi Sosial – 108
- Q. Perilaku Sosial – 115
- R. Teori Etnometodologi – 117
- R. Teori Interaksi Simbolik – 118
- S. Teori Konflik – 121
- T. Hasil-Hasil Kajian yang Relevan – 126
- U. Kerangka Konseptual – 131

**BAB IV TOLERANSI MASYARAKAT KOTA TOMOHON
DI TENGAH KEBERAGAMAN – 135**

- A. Profil Provinsi Sulawesi Utara – 135
- B. Deskripsi Kota Tomohon – 137
- C. Toleransi Masyarakat Lokal Kota Tomohon – 146

BAB VI PENUTUP – 171

- A. Kesimpulan – 171
- B. Implikasi Teoritik dan Praktis – 172

DAFTAR PUSTAKA – 183

GLOSARIUM – 191

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajemukan merupakan hakekat dasar dari bangsa Indonesia. Dalam *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan semboyan bangsa Indonesia terkandung makna mendalam dari perbedaan dalam keberagaman. *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan bukti nyata kemajemukan itu dan menggambarkan dengan jelas keberagaman bangsa Indonesia dalam segala aspek. Kemajemukan bangsa Indonesia secara nyata nampak dalam banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemajuan sosial dan budaya termanifestasi dalam banyaknya budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya Jawa, Sunda, Batak dan lain-lain. Dari segi agama ada Kristen Protestan, Islam, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Keenam agama ini diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu gambaran yang menawan tentang masyarakat Indonesia adalah pluralitas agama yang dimilikinya. Sebagai sebuah negara kepulauan besar yang terletak di persimpangan dua benua, sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai suatu tempat yang subur bagi berkembangnya agama. Selain agama asli yang telah mengakar selama ratusan tahun, di nusantara tumbuh dan berkembang berbagai agama dari benua-benua lain. Sejarawan asal Perancis Denys Lombard pernah menyebut Pulau Jawa sebagai "*Le Carrefour Javanais*" atau "Perempatan Jawa," tempat berbagai kebudayaan bertemu dalam sebuah persilangan geografis (Lombard, 1996 dalam Wirutomo, 2011:127). Dalam persilangan ini tak kurang dari lima

agama besar dunia, yaitu Hinduisme, Budhisme, Islam, Katolisisme dan Protestantisme menanamkan tradisinya dan berinteraksi, baik dengan agama-agama asli maupun dengan agama lainnya, sehingga menghasilkan “silang budaya” (Hefner, 2001a dalam Wirutomo, 2011:127).

Tokoh pertama yang melukiskan tentang kemajemukan bangsa Indonesia adalah Furnivall. Furnivall (1939) sebagaimana dikutip oleh Wirutomo (2011:20) dalam hal ini melukiskan kemajemukan bangsa Indonesia pada masa Hindia-Belanda yang ditandai oleh perbedaan suku atau etnik. Masyarakat yang berbeda suku ini menetap bersama-sama dalam sebuah teritorial tertentu. Kendati menetap dalam suatu wilayah, tapi mereka tidak mempunyai perangkat pranata sosial yang menjadi kekhasan, misalnya: kekerabatan dan sistem keluarga, ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Dalam kehidupan mereka setiap hari mereka tidak membaaur bahkan secara formal mereka dalam keadaan terpisah-pisah serta pemenuhan kebutuhan mereka secara sendiri-sendiri (*self contained*) dan tidak mempunyai tujuan bersama (*common social will*) bahkan tidak memiliki kesamaan cita-cita. Menurut Nasikun (2006:34-35), struktur masyarakat Indonesia memiliki ciri yang unik, yaitu secara horizontal bisa dilihat pada adanya kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan pada perbedaan latar belakang adat, agama, suku bangsa dan perbedaan asal daerah. Sementara itu, secara vertikal dapat dilihat dalam perbedaan-perbedaan yang pada masyarakat lapisan atas serta masyarakat lapisan bawah yang sangat mencolok.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Sayangnya, proses pengimplementasiannya dalam kehidupan yang penuh keanekaragaman dan perbedaan ini (agama, ras, budaya, suku bangsa, dan lain-lain) tidak semudah apa yang terlintas dalam pikiran kita. Adanya konflik dan pertentangan antar suku, agama, atau masyarakat berbeda adat istiadat dan budaya telah menjadi sumber terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat yang multikultural tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik. Terjadi berbagai macam konflik di beberapa wilayah

di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Posso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Di Ambon misalnya, konflik awalnya hanya terjadi antara sekelompok orang akhirnya berkembang menjadi konflik antar agama dan menyebar ke daerah-daerah sekitar. Konflik yang terjadi di berbagai daerah ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bahkan korban materi. Dengan adanya konflik ini banyak orang dibunuh dan saling membunuh; banyak orang kehilangan tempat tinggal karena dirusak massa, ada pula yang mengungsi ke pulau-pulau lain. Konflik-konflik ini memang sungguh ironis bagi negara Indonesia yang menganut paham *Bhinneka Tunggal Ika*. Tepatlah apa yang dikatakan Syaqq A. Mughni bahwa kendati mengakui adanya keberagaman secara formal, tapi dalam realitasnya Indonesia tidak beragam karena adanya berbagai konflik yang terjadi. (Mahfud, 2009:xi).

Menurut Wirutomo (2011:114-115) beberapa faktor utama yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan atau menjadi konflik terbuka adalah: *Pertama*, perubahan konstelasi politik pada masa reformasi dan iklim kebebasan yang dijunjung tinggi menjadi ladang subur untuk mengungkapkan keresahan-keresahan beberapa kelompok etnik yang selama ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. *Kedua*, tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia ternyata disadari atau tidak, terpolarisasi berdasarkan kelompok etnik. Perebutan sumber daya yang seharusnya berdasarkan kompetisi yang sehat dengan kriteria universal malah menjadi ladang perbenturan nilai-nilai budaya. Pada titik ini, seperti pada masa kolonial, stratifikasi ekonomi tumpang tindih dengan identitas etnik. Tidak terjadi integrasi fungsional di antara beragam kelompok etnik. *Ketiga*, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan ialah dalam masyarakat Indonesia, identitas etnik, dalam hal ini kesukuan yang meliputi nilai budaya dan adat istiadat, masih menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama di pedesaan.

Kurangnya toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya saat ini merupakan faktor penyebab utama terjadinya konflik di

Indonesia. Toleransi pada hakikatnya merupakan bentuk tindakan maupun sikap yang di dalamnya ada jiwa saling menghormati perbedaan etnis, agama, suku, sikap, pendapat serta tindakan sesama yang dianggap berbeda (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:9).

Kontras dengan apa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilanda berbagai konflik horizontal, kerukunan masyarakat Sulawesi Utara justru tetap terjaga dengan baik; masyarakatnya tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa (Pangalila, 2013).

Dalam konteks yang lebih kecil, kota Tomohon sebagai bagian dari Propinsi Sulawesi Utara juga menunjukkan kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi. Masyarakat kota Tomohon beragam dari suku, agama, dan bahasa. Walaupun mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Minahasa, tetapi ada juga masyarakat yang berasal dari suku lain seperti, Jawa, Sangir, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Totemboan dan Tionghoa, dan sebagainya. Dari segi agama, berdasarkan data bisa dilihat bahwa masyarakat Tomohon mayoritas beragama Kristen, tetapi juga terdapat pemeluk agama Islam, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu.

Masyarakat Tomohon mayoritas beragama Kristen Protestan karena merupakan pusat berkembangnya agama Kristen di Sulawesi Utara secara khusus Minahasa. Di Tomohon terdapat kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan merupakan gereja dengan pemeluk terbanyak di Sulawesi Utara. Begitu pula gereja Katolik Roma mempunyai banyak penganutnya dan memiliki sejarah cukup panjang. Di kelurahan Woloan yang merupakan bagian kota Tomohon menjadi tempat ziarah rohani umat Katolik di seluruh keuskupan Manado. Di Tomohon ada juga Kantor Gereje Masehi Advent Hari Ketujuh wilayah Minasaha Selatan dan Tomohon. Pemeluk agama Buddha mempunyai tempat ibadah berupa Vihara yang terdapat di Kelurahan Kakaskasen III. Penduduk beragama Islam bermukim di kelurahan Kampung Jawa dan memiliki pesantren di kelurahan Kinilow. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama tahun 2015, pemeluk agama Kristen berjumlah 66.059 jiwa, Katolik berjumlah 22.293 jiwa, Islam berjumlah 2.851

jiwa, Buddha berjumlah 132 jiwa dan Hindu 83 jiwa. Selanjutnya data tahun 2016 peningkatan pesat penduduk beragama Islam dengan jumlah 3.332 jiwa. Sebagian besar masyarakat yang beragama Islam adalah masyarakat pendatang dan bermukim di satu tempat, yaitu tepatnya di kelurahan Kampung Jawa yang berada di Tomohon Selatan. Mereka umumnya berasal dari pulau Jawa.

Kendati semakin banyak masyarakat pendatang dan sebagian besar beragama Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari harmonisasi kehidupan tetap terjaga. Tidak pernah terjadi gesekan antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal kota Tomohon begitu toleran terhadap masyarakat pendatang dan tidak pernah membedakan latar belakang suku, agama dan ras apalagi melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Memang tak bisa dipungkiri ada beberapa kejadian yang mengarah ke tindakan intoleransi misalnya, kasus penikaman masyarakat asli Tomohon yang terjadi di pasar Beriman Tomohon yang dilakukan oleh seorang pedagang pakaian yang berasal dari suku Gorontalo dan beragama Islam. Oleh beberapa oknum kejadian ini mereka coba kaitkan dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tetapi tidak sampai meluas dan mempengaruhi masyarakat karena pemerintah dan aparat kepolisian dengan cepat menenangkan situasi bahwa ini kejadian murni kriminal dan bukan SARA.

Masyarakat Sulawesi Utara khususnya masyarakat kota Tomohon hidup dalam kerukunan disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai sosial budaya lokal (*local wisdom*) yang menjadi perekat. Nilai-nilai sosial budaya dominan di kota Tomohon adalah *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara*. Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* adalah budaya Minahasa yang paling menonjol dan menjiwai hidup masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya dan masyarakat kota Tomohon pada khususnya. *Si Tou Timou Tumou Tou* secara hakiki mengandung makna bahwa dalam hidupnya manusia harus bisa memanusiakan (menghidupkan) orang lain, merupakan filosofi Sam Ratulangi. Pemikiran filosofis ini mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk hidup dalam kerukunan dengan tujuan untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjadi musuh

bagi orang lain (*homo homini lupus*). Sementara itu *Mapalus* adalah tradisi suku Minahasa, terutama dalam konteks kerja dimana pekerjaan atau kegiatan apa pun dikerjakan dalam suasana gotong royong atau bersama-sama (misalnya dalam mengerjakan kebun). Dalam konsep *Mapalus* yang lebih modern, penerapannya bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; dimana pada waktu orang Kristen merayakan hari raya Natal atau Paskah yang menjaga gereja-gereja adalah pemuda-pemuda Muslim. Begitu pula sebaliknya ketika orang Muslim merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, maka yang ikut menjaga di sekitar Masjid adalah pemuda-pemuda Kristen dan ormas-ormas Kristen lainnya. Bahkan di Sulawesi Utara ada satu lembaga yang berperan untuk menjaga kerukunan antar agama, yaitu: BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama). Kedua budaya ini dalam perkembangannya dikombinasikan menjadi semboyan masyarakat Sulawesi Utara *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara). Semboyan ini dengan jelas menggambarkan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis, penuh persaudaraan.

Sebagai bukti tentang toleransi masyarakat kota Tomohon di tengah perbedaan pada tahun 2017 Tomohon memperoleh penghargaan *Harmony Award* dari Kementerian Agama sebagai kota yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Adapun penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak. dalam rapat kerja nasional 2017 di Mercure Convention Center Jakarta, Minggu (26/02/2017).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sikap toleransi masyarakat di Sulawesi Utara dan khususnya kota Tomohon secara kongrit dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Di kota Tomohon ada 3 Masjid yang besar, yakni di Kinilow, di Matani dan di Kampung Jawa Tomohon, saat pembangunan atau renovasi dan rehabilitasi tidak menjadi masalah, karena Pemkot, Kemenag dan masyarakat ikut mendukung. Keikutsertaan umat Muslim di Tomohon dapat dilihat pada saat ada acara-acara keagamaan umat Nasrani, misalnya pada saat Natal, umat Muslim ikut menjaga Gereja dan bersilaturahmi. Ada juga contoh konkrit, saat ada pagelaran

Natal tahun 2012 oleh Pemkot Tomohon, umat Muslim ikut menampilkan lagu dan irama Qasidah. Pimpinan dan tokoh agama Muslim selalu diajak pada kegiatan-kegiatan Pemkot dan Kemenag Tomohon, dan bahkan setiap acara keagamaan umat Nasrani.

Dalam kehidupan bersama, misalnya dalam peristiwa kedukaan maka orang akan berbondong-bondong untuk membantu keluarga dalam membersihkan rumah duka dan membuat tenda yang akan digunakan dalam acara duka tanpa memandang agama dan suku dari keluarga yang ditimpah duka. Dalam suasana suka (misalnya acara pernikahan) dan duka, terutama ketika ada acara makan bersama, maka akan dipisahkan makanan bagi masyarakat yang beragama Kristen dan yang beragama Muslim. Dalam kehidupan kemasyarakatan, terutama dalam acara-acara penting keagamaan, maka semua golongan agama akan dilibatkan. Misalnya ketika umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, maka ada acara buka puasa bersama antara unsur pemerintahan dan masyarakat beragama muslim. Dalam kegiatan gereja Kristiani, ketika ada kegiatan-kegiatan olah raga dan kesenian, maka akan diundang perwakilan dari masing-masing agama untuk ikut berpartisipasi.

Beberapa hal di atas membuktikan adanya saling pengertian antara warga yang memiliki perbedaan latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa. Sampai sekarang tidak pernah ada kejadian intoleransi yang mengakibatkan adanya konflik antar warga yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan latar belakang. Soal sangsi bagi masyarakat yang tidak menunjukkan sikap toleransi atau intoleran sejauh ini belum ada selain sangsi moral, yaitu terkucil dari masyarakat.

Kenyataan hidup penuh toleransi antara penduduk lokal dan pendatang di kota Tomohon perlu dijaga dan dikembangkan. Adanya permasalahan-permasalahan kebangsaan seperti munculnya paham-paham radikalisme yang ingin memecah-bela warga dan masyarakat Indonesia lewat tindakan-tindakan mereka yang intoleran terhadap pemeluk agama lain tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan toleransi di kota Tomohon. Dalam hal ini diperlukan upaya dan keterlibatan yang intens dari semua

pihak, baik pemerintah dan masyarakat kota Tomohon dalam menjaga eksistensi suasana toleransi yang saat ini sudah terjaga dengan baik.

BAB II

FENOMENA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA

Salah satu gambaran menarik dalam menggambarkan masyarakat Indonesia adalah pluralitas agama yang dianut oleh warganya. Kemajemukan ideologi ditandai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara yang multi-religius. Beberapa agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Budha dan Konghucu. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 1971 dan tahun 2000, maka diperoleh data bahwa jumlah penduduk muslim $\pm 88\%$, Kristen $\pm 10\% \pm 2\%$ Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara itu menurut data sensus penduduk tahun 2010 jumlah penganut agama masing-masing agama adalah sebagai berikut: Islam 207.176.162 jiwa, Kristen Protestan 16.528.513 jiwa, Katolik 6.907.873 jiwa, Hindu 4.012.116 jiwa, Budha 1.703.254 jiwa, Khong Hu Chu 117.091 jiwa.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan adat-istiadat. Sayangnya, implementasi proses kehidupan bermasyarakat di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini (suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sejenisnya) tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pergeseran antar kelompok agama maupun suku, budaya ataupun adat istiadat yang berbeda seolah menjadi pemicu terjadinya suatu perpecahan horizontal antar masyarakat yang berlainan tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik.

Konflik terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Posso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Di Ambon misalnya, konflik awalnya hanya terjadi antara sekelompok orang akhirnya berkembang menjadi konflik antar agama dan menyebar ke daerah-daerah sekitar. Konflik yang terjadi di berbagai daerah ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan bahkan korban materi. Dengan adanya konflik ini banyak orang dibunuh dan saling membunuh; banyak orang kehilangan tempat tinggal karena dirusak massa, ada pula yang mengungsi ke pulau-pulau lain. Konflik-konflik ini memang sungguh ironis bagi negara Indonesia yang menganut paham bhinneka tunggal ika.

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence*) berasal dari (bahasa Latin: **violentus** yang berasal dari kata **vī** atau **vīs** berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan *kewenangannya* yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>).

Menurut Krishnamurti (1982:11) kekerasan merupakan salah satu kejahatan struktural berbahaya. Kekerasan yang sulit dibongkar adalah kekerasan politik yang dipakai dalam sistem politik. Secara sistematis bentuk kekerasan, lazimnya diterapkan oleh penguasa otoriter untuk menghadapi lawan politik, melemahkan oposisi, dan sejenisnya. Kekerasan politik terkait dengan kekerasan negara atau kekerasan yang terlembagakan, karena kekerasan terjadi bukan secara kebetulan tetapi didukung bangunan sistem sosial politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

Berikut ini adalah beberapa jenis kejahatan sebagaimana dikutip dari Wikipedia:

- **Kekerasan yang dilakukan perorangan** perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya.
- **Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok**, yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai “monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah” yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain, genosida, dll.).
- **Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik** yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis (skizofrenia, dll.)).
- **Kekerasan dalam politik** umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatas namakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.

- **Kekerasan simbolik** (Bourdieu, **Theory of symbolic power**), merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural (Johan Galtung, **Cultural Violence**) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.

Sementara itu menurut Menurut Johann Galtung (1981), terdapat empat jenis kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan langsung (*direct violence*),

Yaitu tindakan yang menyerang secara fisik atau psikologis seseorang secara langsung, dalam arti bahwa kekerasan yang terjadi kontak langsung antara pelaku yang bertanggung jawab dan korban dan berakibat bagi korban. Kekerasan ini meliputi pemusnahan etnis, kejahatan perang, pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, serta perkosaan dan penganiayaan. Kekerasan langsung mengancam HAM, khususnya hak untuk hidup.

2. Kekerasan tak langsung (*indirect violence*),

Yaitu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Dalam arti kekerasan yang terjadi melalui sebuah medium, tidak secara langsung mengenai korban baik secara fisik maupun psikologis.

Kekerasan tak langsung terdiri atas kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*). **Kekerasan karena kelalaian** menyebabkan seseorang dalam bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya. Jenis kekerasan ini meliputi kekerasan sosial (misalnya distribusi makanan yang tidak merata) dan 'kekerasan bisu' (misalnya kelaparan). **Kekerasan perantara** merupakan hasil dari intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Salah satu bentuk kekerasan perantara yaitu *ecocide* (tindak penghancuran, mengganggu dan perusakan lingkungan alam karena mengganggu kesehatan, menyebabkan manusia menderita dan sengsara).

3. Kekerasan represif

Kekerasan yang dilakukan dengan mengekang kebebasan hak-hak seseorang, yang meliputi pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial. Dalam hal ini, kekerasan dilakukan dengan menekan pihak-pihak tertentu.

4. Kekerasan alienatif

Kekerasan dalam hal ini mengakibatkan seseorang terasingkan dengan lingkungannya. Mencakup pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya atau intelektual. Jenis kekerasan ini penting untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non-materi. Salah satu bentuk kekerasan ini adalah *ethnocide*, yaitu kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu.

B. Agama

1. Pengertian Agama

Dalam kehidupan sehari-hari kita sehari-hari kata agama adalah kata yang familiar dan sering kita dengar. Tapi apakah kita pernah sadar dan bertanya tentang arti dan makna dari kata agama. Agama menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti "tradisi". Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *religare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>)

Sementara itu menurut Wirutomo, dkk. (2011:129-130) agama bisa diartikan sebagai berikut:

Pertama, agama dalam masyarakat kita dianggap sebagai suatu yang sakral, suci dan murni. Untuk menjaga kesucian dan kesakralan itu, kita diajarkan untuk menerima agama secara *taken for granted* (apa adanya) tanpa mempertanyakan lagi. *Kedua*, masalah kesucian agama ini dijaga secara ketat oleh orang-orang yang sering disebut sebagai pemegang otoritas keagamaan seperti guru/tokoh/pemuka/pemimpin agama. Kuatnya otoritas keagamaan dilanggengkan oleh masyarakat sendiri. Sering dijumpai, orang awam takut atau tidak percaya diri untuk mendiskusikan agama. Lalu guru/tokoh/pemuka/pemimpin agama dianggap sebagai sosok referensi yang paling valid bagi pengetahuan agama. *Ketiga*, adanya “perkawinan” antar agama dengan negara. Hal ini menjadikan agama memiliki kekuasaan yang besar. Hegemoni agama lalu ditanamkan dan dipelihara secara sistematis melalui sarana yang paling krusial membentuk sistem pengetahuan masyarakat, yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dari masa ke masa dapat dikatakan tidak memberikan ruang untuk mengkritisi agama dan justru menjadi media penanaman nilai-nilai keagamaan yang *taken for granted* itu.

Di sisi lain Koentjaraningrat (1974:136-137) membedakan pengertian agama, religi dan kepercayaan. *Agama* bisa dipakai untuk menyebut semua agama yang diakui secara resmi dalam negara kita, yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan (Konghucu). *Religi* bisa dipakai kalau kita membicarakan tentang sistem-sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi, seperti: Advent, Pantekosta, dan segala macam gerakan kebatinan, dan sebagainya. *Kepercayaan* yang mempunyai arti yang khas, ialah komponen kedua dalam tiap agama maupun religi.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah ungkapan lubungan antara manusia dengan Yang Ilahi, yaitu kekuasaan yang kudus yang dianggap lebih tinggi dari pada manusia itu sendiri. Kepada Yang Ilahi manusia mengalami daya tarik (*fascinosum*) tetapi sekaligus juga merasa

takut (*tremendum*). Namun di antara semua perasaan itu manusia terutama mengalami ketergantungan kepada Yang Ilahi.

2. Cara Beragama

Berikut ini adalah beberapa cara beragama sebagaimana dikutip dari Wikipedia (2012):

1. **Tradisional**, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu amal keagamaanya.
2. **Formal**, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya.
3. **Rasional**, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun.
4. **Metode Pendahulu**, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati (perasaan) dibawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh

ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.

3. Unsur-unsur Agama

Menurut Leight, Keller dan Calhoun sebagaimana dikutip dari Wikipedia (2012), agama terdiri dari beberapa unsur pokok:

- Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi
- Simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.
- Praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya, dan hubungan horizontal atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agama
- Pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi.
- Umat beragama, yakni penganut masing-masing agama

A. Pengertian Kekerasan Atas Nama Agama

Kekerasan agama selama berabad-abad merupakan kejahatan terburuk yang telah mengisi peradaban manusia. Sesuatu yang paradoks, karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi agama juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Dalam editorial bukunya, "Violence and the Sacred in the Modern World", Marl Juergensmeyer sebagaimana dikutip oleh Rizky, A (2011) menyatakan:

Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are evoked by some of religion's most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist

chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Juergensmeyer menganalisis bahwa salah satu sumber utama konflik dan kekerasan dunia adalah agama. Dia memberikan beberapa contoh kekerasan yang terjadi karena masalah agama yang melibatkan Islam dan Kristen. Dalam perjalanan sejarah manusia konflik yang dipicu oleh masalah agama tidak bisa disepelekan karena telah berlangsung sejak lama.

B. Data dan Fakta Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa sejak jatuhnya Soeharto pada 28 Mei 1998 membawa Indonesia pada era baru yang dikatakan sebagai era reformasi. Pada masa peralihan kekuasaan itu, masyarakat dihadapkan pada peristiwa terorisme; berlanjutnya konflik-konflik horizontal yang mengobarkan sentimen etnis-keagamaan dan tindakan anarkis lainnya. (Kusumadewi dalam Wirutomo, dkk. 2011:152).

Kekerasan atas nama agama di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Dalam konteks ini, isu dominan yang berkembang dalam konflik-konflik itu adalah konflik Islam dan Kristen. Menurut laporan dari Dhakidae (2003) sebagaimana dikutip oleh Kusumadewi (2011) menunjukkan jumlah masjid dan gereja yang telah ditutup, dirusak dan dibakar di Indonesia sejak kemerdekaan hingga mencapai puncaknya pada periode 1995 hingga 1999. Selama periode itu tercatat ada 40 masjid dan 370 gereja telah ditutup, dirusak dan dibakar.

Periode	Masjid		Gereja	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1945-1954	0	0	0	0
1955-1964	0	0	2	0,33
1965-1974	1	1,8	46	7,53
1975-1984	6	10,91	89	14,57
1985-1994	8	14,55	104	17,02
1995-1999	40	72,73	370	60,56
Total	55	100	611	60,56

Sumber: Dhakidae (2003), Kusumadewi dalam Wirutomo, dkk. (2011:155).

Konflik di Maluku dan Poso pada medio 1999-2002 dapat dikatakan sebagai masa puncak eskalasi konflik antar pemeluk agama. Dua indikator utama untuk mengukur hal ini adalah banyaknya korba jiwa dan insiden kekerasan. Konflik Maluku merupakan rentetan konflik yang bernuansa keagamaan dengan jumlah korban paling besar, sementara jumlah insiden kekerasan pada konflik di Poso termasuk yang besar dan berjalan secara kontinu.

Konflik Ambon pertama kali terjadi pada tanggal 19 Januari 1999. Dalam kerusuhan ini baik pihak Muslim maupun Kristen paling sedikit lima ribu orang menjadi korban dan ribuan lainnya luka-luka. Konflik yang pada awalnya hanya terjadi di kota Ambon, ibukota propinsi Maluku dengan cepat menjalar ke wilayah-wilayah kepulauan Maluku lainnya dan ke propinsi Maluku Utara.

Kerusuhan Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian. Kerusuhan Poso I (25-29 Desember 1998), Poso II (17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso).

Pada masa-masa selanjutnya, ketika konflik sudah mulai mereda, kekerasan berskala lebih kecil terjadi secara bergantian. Target dari aksi-aksi anarkis yang dilakukan para aktivis Islam radikal semakin bervariasi; tidak saja kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai musuh utama namun juga kepada kelompok agama lainnya. Beberapa peristiwa penyerangan terhadap kelompok agama maupun bangunan fisik milik kelompok agama tertentu dilancarkan. Penyerangan terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah yang dianggap sebagai aliran sesat dalam Islam adalah satu kasus yang terus menerus menjadi pemberitaan media massa. Bulan September 2002, penyerangan dilakukan terhadap kelompok tersebut di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penyerbuan berlanjut pada bulan Desember 2002 di Kuningan-Jawa Barat. Penyerangan terjadi lagi pada Juli 2005 terhadap kampus Mubarak, sebuah gedung universitas milik Ahmadiyah di Parung, Bogor. Perusakan masjid Ahmadiyah lainnya terjadi di Majalengka dan Ciaruten pada Agustus 2005. Menyusul kemudian, penyerbuan terhadap Masjid Kodian dan Majelis Taklim Jamaah Ahmadiyah pada Januari 2006 di Leuwisadeng, Bogor. (Kusumadewi dalam Wirutomo, 2011:158-159).

Setara Institute for Democracy and Peace, misalnya mencatat, dalam setahun (2007) setidaknya 185 tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" dipertontonkan kepada publik dengan gamblang. Tercatat 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja terjadi pada 2004-2007. Rinciannya, pada 2004 terdapat 30 kasus, 2005 ada 39 kasus, 2006 ada 17 kasus, dan 2007 ada 22 kasus. Provinsi yang terbanyak terjadi kasus-kasus tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Poso, dan Bengkulu. (Togatovo, 2012).

Wahid Institue melaporkan adanya peningkatan kekerasan atas nama agama di Indonesia. Tercatat ada 232 kasus terkait dengan kekerasan atas nama agama di 2009, sedangkan di 2008 dilaporkan ada 197 kasus. (Rizki, 2011).

Sementara itu menurut Setara Insitute, terdapat 91 peristiwa yang termasuk di dalam pelanggaran kebebasan beragama. Beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dicatat Setara Institute

antara lain insiden Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Desa Ciketing, Bekasi, 12 September 2010. Penolakan atas pembangunan gereja berujung pada penusukan pendeta dan penatua HKBP. Selanjutnya, perusakan rumah dan masjid di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Bogor, 2 Oktober 2010. Di Tasikmalaya, massa menggembok panti asuhan milik Ahmadiyah pada Desember 2010. Dalam aksi tersebut, 10 anak terkunci di dalam panti asuhan, padahal mereka akan mengikuti ujian sekolah. Kasus terakhir, dimana jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, diserang oleh sekelompok orang dan menimbulkan korban jiwa sebanyak tiga orang dan korban luka parah pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011. (Safitri, 2011).

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati D Saptaningrum mencatat, sedikitnya ada 21 kasus yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama antara Januari hingga April 2012. "Varian kasusnya pun beranekaragam, Elsam mencatat ada 11 varian pelanggaran terhadap jaminan kebebasan beragama dalam periode tersebut," Penutupan tempat ibadah dan kriminalisasi keyakinan menduduki peringkat pertama, yang masing-masing terdapat empat kasus. Berikutnya, berupa tindakan kekerasan, pengrusakan tempat ibadah, penyerangan aktivitas peribadatan, dan pembubaran kelompok kepercayaan yang masing-masing terdapat dua kasus. "Selanjutnya, masing-masing satu kasus berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena tuduhan sesat, pembubaran dan pelarangan aktivitas keagamaan," (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcb8b567941d/kekerasan-atas-nama-agama-masih-meningkat>)

Masih menurut Indriaswati, persebaran kasusnya pun kian meluas. Bila sebelumnya terkonsentrasi di Jawa, khususnya bagian Barat, sekarang kasus serupa mulai menyeruak ke wilayah-wilayah lain. Indriaswati mencontohkan, kasus GKI Yasmin di Bogor masih belum terselesaikan, sekarang muncul kasus serupa di Tambun, Bekasi. Penolakan dan penutupan tempat ibadah juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Jambi dan Riau.

Sementara itu tindak kekerasan atas nama agama yang masih hangat di benak kita adalah kasus Sampang. Massa membakar pemukiman kaum Syiah, saat terjadi kerusuhan Syiah-Sunni di Desa Karanggayam, Omben Sampang, Jatim, Minggu (26/8). Bentrokan yang melibatkan warga Sunni dan Syiah tersebut dipicu ketidaksenangan warga Sunni terhadap kepulauan sejumlah santri warga Syiah dari Pesantren Yapi, Pasuruan. Akibatnya, seorang meninggal, empat lainnya luka parah, dan 37 rumah dibakar.

C. Akar Kekerasan atas Nama Agama Indonesia

1. Kesalahan Interpretasi dan Penafsiran Ayat-ayat Kitab Suci

Perlu disadari bahwa faktor kekerasan agama tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Faktor internal juga dapat memberikan kontribusi yang besar. Masalah interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu masalah utama yang bisa mendorong umat beragama melakukan tindak kekerasan. Di dalam sejarah kekristenan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh gereja karena kesalahan dalam melakukan penafsiran terhadap Kitab Suci. Orang-orang yang tekstualis memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab secara literal dan menerapkannya di dalam konteks yang berbeda. Proses eksegesi yang sebenarnya diabaikan sehingga mereka gagal untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dan memusatkan perhatian terhadap teks secara mentah tanpa melakukan penggalian apapun.

Berdasarkan hal di atas agama terkesan merupakan sumber dari kekerasan akan tetapi pemahaman yang tekstualis terhadap Kitab Suci agamalah yang bisa menjadi variabel yang paling signifikan dalam mendorong timbulnya perilaku kekerasan agama. Di samping mendorong perilaku kekerasan agama, tekstualisme dan Islamisme juga berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan umum dan kekerasan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan sumber identitas yang sangat kuat dalam diri seseorang. Agama profetik seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Persaingan antar agama yang

memicu konflik sangat mudah terjadi apabila salah satu kelompok merasa identitasnya terancam. Misalkan bisa kita lihat pada konflik Ambon dan Poso jika dalam konteks dalam negeri.

Potensi ini menjadi semakin besar ketika para pemimpin politik berusaha mengkonstruksi identitas negara berdasarkan agama tertentu yang mayoritas. Di satu sisi itu bisa menimbulkan arogansi dari kelompok pemeluk agama yang mayoritas dan perasaan terancam dan terintimidasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas.

Namun demikian, sejarah kekristenan telah membuktikan bahwa semakin dekat gereja secara institusi dengan politik pemerintahan semakin bobrok kondisi keagamaannya. Usaha-usaha untuk membentuk negara Kristen telah dilakukan dan terbukti gagal. Calvin mencoba menciptakan sebuah kota yang ilahi di Geneva dan tidak berhasil. Demikian juga pada abad ke-4 ketika Konstantinus bertobat dan menyatukan gereja dengan negara, pada akhirnya itu pun mengalami kegagalan baik di dalam sisi pemerintah maupun gereja itu sendiri. Gereja pada akhirnya terlibat secara aktif dalam tindak kekerasan yang imoral dan melawan ajaran dari agamanya sendiri.

2. Solidaritas Akibat Ketidakadilan

Faktor kedua yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan atas nama agama adalah rasa solidaritas terhadap sesama pemeluk agama karena ketidakadilan yang mereka terima di negara mereka. Lingkungan pergaulan, di manapun itu, yang tidak kondusif serta berpotensi menumbuhkan pola pikir sempit atau skeptis bahkan radikal terhadap agama yang ia anut. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke Timur Tengah atau Afganistan bahkan beberapa negara lainnya seperti Filipina yang di mana pada awalnya tujuan mereka pergi ke sana ialah untuk studi namun kemudian setelah pulang kembali ke Indonesia mereka berubah menjadi teroris diakibatkan oleh pengaruh lingkungan serta ajaran selama mereka berada di sana dari orang-orang berpola pikir sempit serta radikal. Contoh lainnya ialah di mana tersangka teroris seperti Imam Samudera dan Amrozi yang memang sejak muda sudah dilatih dan tinggal di lingkungan militan teroris di Afganistan

sehingga wajar jika begitu pulang ke Indonesia mereka sudah jadi teroris.

3. Ketidakpuasan Ekonomi

Ketidakpuasan ekonomi dan hal-hal yang bersifat material yang dia peroleh dalam hidup, sehingga untuk melampiaskan kekesalan dan ketidakpuasannya dia melakukan aksi teror dengan dalih atas nama agama karena mungkin saja hal itu justru akan mengobati ketidakpuasannya dalam bidang ekonomi tersebut.

4. Fundamentalisme Agama

Aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan kelompok-kelompok tertentu atas nama agama jelas menodai cita-cita luhur Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta semangat toleransi antar sesama. Bahkan, tindakan-tindakan anarkis itu mencoreng ajaran dan misi suci kehadiran agama-agama, yaitu mengarahkan umat ke jalan yang paling damai (Abdullah, 2011).

Jika kita mencermati kekerasan atas nama agama yang terjadi selang 10 tahun terakhir ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akar semua kejadian itu adalah Fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama telah memicu terjadinya konflik/kekerasan atas nama agama. Menurut Ohoitumur (2004), dalam konteks hubungan antar agama, terdapat sekurang-kurangnya tiga model relasi antarumat beragama, yakni; *eksklusivisme*, *inklusiivisme*, dan *pluralisme*. *Eksklusivisme* adalah suatu paham yang mengklaim bahwa inti kepercayaan setiap agama bisa benar, ada pengakuan dan penghargaan terhadap tradisi-tradisi agama lain, tetapi semua manusia diselamatkan hanya melalui satu agama tertentu. Setiap agama punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam paham ini. *Inklusiivisme* merupakan paham yang lebih ekstrim, di mana paham ini mempunyai pandangan bahwa tidak ada satu pun agama yang menjadi pemilik kebenaran mutlak, karena setiap agama mengandung kebenaran dasar tertentu. Pada setiap agama ada benih kebaikan yang menyelamatkan, dan karena itu setiap agama harus dihormati, namun tidak semua agama bisa disebut sebagai jalan

keselamatan yang paripurna. Konsekwensinya, kecenderungan menganggap agama tertentu lebih unggul dari agama yang lain tetap ada pada inklusivisme religius ini. *Pluralisme religius* adalah keyakinan bahwa semua agama mempunyai legitimasi yang setara dan bahwa tak satu pun agama bisa mengklaim diri sebagai pemilik kebenaran dan keselamatan mutlak.

Kecenderungan untuk jatuh ke paham *eksklusivisme* menghantar agama-agama jatuh ke dalam suatu fundamentalisme agama. Contoh kongkrit dari kecenderungan ini adalah banyaknya aksi kekerasan di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatas namakan agama tertentu. Menurut Barnes dalam Ohoitumur (2004), akar fundamentalisme agama berasal dari tradisi-tradisi formatif yang menghasilkan harmoni *internal* yang kemudian menjadi suatu kekuatan untuk menyerang suatu ancaman *eksternal*. Fundamentalisme agama menyebabkan agama-agama memandang agama lain sebagai musuh yang harus disingkirkan. Menurut Ohoitumur (2002) "... fundamentalisme tidak dimaksudkan keniscayaan setiap agama dalam memiliki kebenaran-kebenaran fundamental yang diyakini sebagai hakikat agamanya. Fundamentalisme agama umumnya bercorak peyoratif dan merupakan suatu gerakan perlawanan terhadap keyakinan yang dianut oleh kebanyakan umat dari suatu agama. Sayangnya, percakapan tentang gerakan-gerakan garis keras dalam lingkungan agama sering kali dikaburkan oleh kegagalan membedakan fundamentalisme agama dari radikalisme agama."

Menurut Assegaf dalam Sumartana (2001) ada beberapa faktor mengapa agama menjadi penyebab kekerasan, yaitu: (1) eksklusivitas dari beberapa pemimpin dan penganut agama, (2) sikap tertutup dan saling curiga antaragama, (3) keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol-simbol, (4) agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekadar kebijaksanaan, dan (5) kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Fundamentalisme agama dalam konteks Indonesia sering dikaitkan secara erat dengan radikalisme agama. Menurut Azra (2002:112), isitlah "radikal" menurut pengertian kamus secara sederhana mengacu kepada keadaan atau orang atau gerakan

tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh yang bukan tidak sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan kekerasan-bukan dengan cara-cara damai. Fundamentalisme dipandang sebagai suatu paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu yang radikal. Golongan atau orang-orang yang menganut paham fundamentalisme disebut sebagai fundamentalis. Dalam konteks keagamaan orang-orang fundamentalis dimengerti sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran asli seperti tertulis dalam masing-masing Kitab Suci atau sumber-sumber ajaran masing-masing. Lebih jauh lagi, Martin E. Marty dan R. Scott Appleby dalam Pangalila (2010) mengatakan bahwa: “gerakan fundamentalisme dan kaum fundamentalis ditandai oleh sikap yang melawan atau berjuang (*fight*), yakni: (a) melawan kelompok manapun yang mengancam eksistensi dan identitasnya; (b) berjuang untuk menegakkan cita-cita yang meliputi persoalan hidup secara umum, seperti keluarga dan agama; (c) berjuang dengan kerangka nilai dan identitas yang umumnya diambil secara harafiah dari Kitab Suci atau ditafsirkan secara eksklusif; (d) berjuang melawan komunitas manapun yang dianggap menyimpang dari fundamen teologis yang mereka anut; (e) berjuang atas nama Tuhan atau atas nama simbol keagamaan.

Kecenderungan untuk jatuh ke fundamentalisme agama pada intinya menyebabkan kesulitan yang amat besar bagi terwujudnya masyarakat yang harmonis, khususnya masyarakat Indonesia yang multikultural dalam konteks hubungan antar agama-agama. Multikulturalisme yang seharusnya menjadi jaminan bagi penghargaan bagi agama-agama dan demi tercapainya negara Indonesia yang sungguh-sungguh ber-*bhineka* justru terhambat oleh fundamentalisme agama.

D. Solusi Mengatasi Kekerasan Atas Nama Agama

Franz Magnis Suseno (2012), menyatakan bahwa tugas negara adalah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Negara sebagai otoritas netral, yang harus menjamin kebebasan beragama dan

beribadah warga negaranya, tidak boleh menyatakan suatu agama atau kepercayaan itu tidak benar atau sesat. Berikut ini adalah beberapa solusi yang bisa ditempuh dalam mengatasi kekerasan atas nama agama di Indonesia:

1. Pendidikan Toleransi

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Menurut Raihani (2011:25) "Tolerance literally means patience with differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked." Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai. Sejalan dengan pengertian di atas, Muldon, *dkk.* (2011:324) mendefinisikan toleransi sebagai berikut:

In its most basic form, tolerance requires that an individual who disapproves of another or of her actions nonetheless refrains from interfering with that other; thus, tolerance can be understood as the act of enduring or putting up with something you disapprove of. John Horton (1996: 32) casts tolerant acts as conflicts of reasons, some of which motivate an individual to disapprove of another and interfere with her actions and some of which motivate an individual to refrain from interfering in spite of his initial disapproval. One tolerates another when the reasons against interference trump the reasons in favor of interference. Similarly, David Heyd (1996: 11) casts tolerant acts as clashes of perspectives. One tolerates another when one ignores considerations of the other's actions and focuses instead on the other as a person. Thus, in Horton's picture, reasons that motivate individuals to tolerate others are reasons that manage to trump one's initial disapproval, while in Heyd's picture, we are concerned with the relevant aspects of others' personhood that motivate individuals to act tolerantly.

Pendapat Muldon, dkk. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam bentuknya yang paling dasar, toleransi mensyaratkan bahwa seorang individu yang tidak suka terhadap orang lain atau tindakannya tetap menahan diri dan tidak mengganggu orang tersebut, toleransi dapat dipahami sebagai tindakan bertahan atau kompromi dengan sesuatu yang tidak disukai. John Horton (1996: 32) mengartikan toleransi sebagai benturan alasan, beberapa di antaranya memotivasi seseorang untuk menyetujui yang lain dan mencampuri tindakannya dan beberapa yang memotivasi seseorang untuk menahan diri dari campur tangan meskipun pada awalnya tidak setuju. ... Tidak jauh berbeda, David Heyd (1996: 11) mendefinisikan toleransi sebagai benturan cara pandang. Seseorang bersikap toleran terhadap orang lain bukan karena penolakan terhadap tindakan orang tersebut, melainkan pertimbangan dari sisi yang lain, yaitu sebagai seorang manusia. Dengan demikian, dalam gambaran Horton, alasan yang memotivasi individu untuk bersikap toleransi terhadap orang lain adalah mengelola alasan kesetidaksetujuan awal. Atinya Heyd lebih menekankan pada aspek-aspek yang relevan dari kepribadian orang lain yang memotivasi individu untuk bertindak toleran.

Mengenalkan keberagaman agama, suku, ras, bahasa sejak dini harus menjadi agenda prioritas sekolah. Rasa toleransi terhadap keberagaman itu harus dibangun sejak dini dalam diri anak-anak. Dengan demikian, nantinya, mereka akan hidup dengan pemahaman yang benar akan keberagaman dan bisa menghormati keberagaman dalam interaksi mereka dengan teman-temannya.

Endang (2009:94) mengatakan bahwa; khusus berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, lembaga pendidikan sekolah merupakan wahana yang paling tepat untuk melatih dan sekaligus menerapkan nilai-nilai ini. Hal ini utamanya disebabkan di dalam lingkungan sekolah siswa memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik agama, susku, latar sosial ekonomi, latar pendidikan orang tua, daerah termasuk adat adat istiadat dan budaya. Dalam kondisi keberagaman ini sudah barang tentu akan ditemukan banyak perbedaan dalam sikap dan perilaku siswa. Sekolah dipandang sebagai wahana yang mempercepat

implementasi dari pluralisme melalui berbagai bentuk kegiatan seperti workshop, latihan-latihan dan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus dipahami dan bahkan saling dihormati, sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan antar sesama siswa. Menghormati perbedaan tidak berarti menghilangkan identitas diri, karena menghormati perbedaan sesungguhnya adalah memberikan peluang dan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan karakteristik dirinya.

2. Dialog Interreligius

Tak bisa dipungkiri bahwa tekanan dan ancaman akibat fundamentalisme agama telah menyebabkan pluralisme agama di Indonesia tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang unik dan patut dicermati secara intelektual dan dihargai dalam praksis hidup kongkrit. Kecenderungan ini telah menyebabkan pluralisme agama lebih ditandai oleh pertentangan dan konflik yang kemudian menjurus pada sikap permusuhan dan separatis. Di Indonesia, situasi dan kondisi seperti ini telah menjadi persoalan tersendiri. Isu perbedaan kultur dan agama telah menjadi isu sentral dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai contoh; kerusuhan di Ambon, Poso, kasus HKBP, konflik Syiah dan Sunni di Sampang.

Fundamentalisme agama telah menyebabkan kesulitan untuk mempraktekkan toleransi dan kerukunan antar umat berada di Indonesia. Fundamentalisme agama menyebabkan kurangnya penghargaan akan keunikan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh agama-agama di Indonesia. Menjadi pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk memposisikan kembali keunikan agama di Indonesia, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama?

Menurut Panikkar (1994), dialog yang dialogis antar umat beragama bisa menjadi jaminan bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang plural dalam agama. "Dialog yang dialogis itu baru terjadi secara personal dan pluralistik di mana yang satu tidak dapat mereduksi yang lainnya, dan tidak dapat pula dipisahkan satu dari yang lainnya."

Sementara itu menurut Baidhawry (2010); Dialog bukan semata percakapan bahkan pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen untuk saling belajar dan dapat berubah dan berkembang. “Berubah” artinya dialog terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman melalui mana prasangka, stereotip, dan celaan dapat dikurangi dan dieliminir. “Tumbuh” karena dialog mengantarkan pada informasi, klarifikasi dari sumber primer dan dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran menuju kematangan cara beragama yang menghargai “kelainan” (*the otherness*).

Dalam kenyataan hidup beragama, ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama-agama, seolah kita mendapatkan pengalaman antarkultur (*intercultural experiences*). Lewat dialog antar agama-agama, maka kita melibatkan secara kreatif kekuatan-kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi antar agama-agama bisa dihindari. Pengalaman multikultural ini membuat kita mampu bangkit dan sadar dengan perspektif baru yang lebih memadai.

Multikulturalisme agama untuk dialog, bukanlah suatu pertentangan, tetapi merupakan teknologi masa depan yang muncul dari pandangan rasional otentik berbasis wahyu progresif yang merupakan dasar bagi semua pengalaman keagamaan dan kultural. Dialog antar agama-agama membawa bangsa Indonesia pada pandangan dunia keagamaan dan kultural yang tidak parsial atau ideologi sipil yang tidak diskriminatif.

Pada intinya tujuan dialog antara agama adalah pemahaman terhadap agama orang lain. Dialog bukan dimaksudkan untuk mengalahkan agama lain atau untuk mencapai kesepakatan penuh atau pada suatu agama universal, tetapi cita-cita yang hendak dicapai dalam dialog ialah cita-cita komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal-balik antara budaya dunia yang berbeda-beda, membiarkan mereka bicara dan mengungkapkan pandangan mereka dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi tujuan dialog bukan untuk mencapai keseragaman bentuk

atau reduksi dari keberagaman manusia ke dalam agama, ideologi atau tradisi yang satu-satunya.

Dengan dialog antar agama yang semacam ini, maka fundamentalisme agama yang merupakan rintangan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang multikultural dalam agama tidak menjadi hisapan jempol semata, tetapi benar-benar menjadi suatu kenyataan.

3. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan

Solusi berikutnya yang dapat mengurangi kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah lewat penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam semua tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Memang tak bisa dipungkiri bahwa tujuan paling pertama dan terutama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara suatu bangsa menjadi baik (*to be good and smart citizens*). Di Indonesia pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sikap toleransi dan saling menghargai secara tersirat telah diamanahkan pada implementasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”, lebih lanjut dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral

dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:i):

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "*nation and character building*." Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*,

PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Penutup

Demikianlah kita telah melihat data dan fakta kekerasan atas nama agama yang telah terjadi di Indonesia. Kejadian-kejadian ini meningkat seiring dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dialog interrelegius untuk terciptanya toleransi antar umat beragama yang coba ditawarkan dalam tulisan ini akan berhasil bila adanya kerjasama antara semua pihak, terutama tokoh-tokoh agama di Indonesia.

BAB III

KONSEP DAN TEORI

DALAM MEMAKNAI TOLERANSI

A. Konsep Toleransi

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk toleransi merupakan suatu keniscayaan. Toleransi berasal dari kata Latin *tolerare* yang secara sederhana diartikan “membiarkan.’ Membiarkan dalam arti ini adalah suatu tindakan yang tidak mempermasalahkan perbedaan yang ditemui. Dalam pengertian ini, toleransi adalah sikap yang objektif, adil, dan sikap permisif terhadap mereka yang berbeda pendapat, praktek, ras, agama, kebangsaan dengan kita, orang yang berbeda dari kita, dan bebas dari sikap fanatik. Menurut Drobizheva (2003) dalam Ananina & Danilov (2015): *“tolerance is a personal or group quality manifesting itself as 'willingness to accept the "others" the way they are and to interact with them on the basis of understanding and consent'.*” Toleransi di sini diartikan sebagai kualitas pribadi atau kelompok yang mewujudkan dirinya sebagai ‘keinginan untuk menerima “orang lain” seperti mereka dan untuk berinteraksi dengan mereka berdasarkan pemahaman dan persetujuan’.

Pengertian tentang toleransi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:9) yang mengatakan bahwa toleransi pada hakikatnya merupakan bentuk sikap maupun tindakan yang di dalamnya ada jiwa saling menghormati adanya perbedaan etnis, suku, agama, sikap, tindakan dan pendapat sesama yang dianggap berbeda dengannya.

Selanjutnya, menurut Ananina & Korableva dalam Ananina & Danilov (2015) mengatakan bahwa: *“tolerance is defined as a means of social interaction between the subject and the object characterized by a certain distance in their relationship.”* Berdasarkan pengertian ini, maka toleransi bisa dikategorikan sebagai berikut: *“1) an expectation of some other kind of behaviour; 2) judging the other's behaviour as deviant / its interpretation as deviant; 3) noticing the difference between the behaviour of others and your own behaviour; 4) importance of behavioural peculiarities; 5) ability to influence other people's behaviour; 6) influencing somebody else's behaviour to your own advantage”* (Loginov, 2013; Ananina & Danilov, 2015).

Menurut Endang (2012:92), toleransi pada hakekatnya tumbuh dalam suasana keberagaman, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya yang di dalamnya terkandung kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh karena itu, maka semakin tinggi keberagaman suatu bangsa, maka akan semakin tinggi juga adanya keharusan untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan tingginya toleransi dalam masyarakat, maka dengan sendirinya akan terwujud adanya keharmonisan hidup dan keserasian, dan terhindar dari adanya ketegangan-ketegangan sosial atau konflik-konflik, bahkan tidak akan ada pertentangan dan permusuhan antar individu-individu dalam suatu masyarakat.

Sementara itu menurut Raihani (2011:25) *“Tolerance literally means patience with differences. In some instances, it connotes the attitude of passiveness towards something disliked, and often it means putting up with or enduring something disliked.”* Toleransi secara harafiah diartikan sebagai kesabaran (penerimaan) terhadap perbedaan. Dalam beberapa kasus, toleransi dikonotasikan sebagai sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang tidak disukai, dan sering berarti tahan atau menahan sesuatu yang tidak disukai. Sejalan dengan pengertian di atas, Muldoon, Borgida, & Cuffaro (2012:324) mendefinisikan toleransi sebagai berikut:

“In its most basic form, tolerance requires that an individual who disapproves of another or of her actions nonetheless refrains from interfering with that other; thus, tolerance can be understood as the act

of enduring or putting up with something you disapprove of. John Horton (1996: 32) casts tolerant acts as conflicts of reasons, some of which motivate an individual to disapprove of another and interfere with her actions and some of which motivate an individual to refrain from interfering in spite of his initial disapproval. One tolerates another when the reasons against interference trump the reasons in favor of interference. Similarly, David Heyd (1996: 11) casts tolerant acts as clashes of perspectives. One tolerates another when one ignores considerations of the other's actions and focuses instead on the other as a person. Thus, in Horton's picture, reasons that motivate individuals to tolerate others are reasons that manage to trump one's initial disapproval, while in Heyd's picture, we are concerned with the relevant aspects of others' personhood that motivate individuals to act tolerantly."

Pendapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam bentuknya yang paling dasar, toleransi mensyaratkan bahwa seorang individu yang tidak suka terhadap orang lain atau tindakannya tetap menahan diri dan tidak mengganggu orang tersebut. Toleransi dapat dipahami sebagai tindakan bertahan atau kompromi dengan sesuatu yang tidak disukai. Toleransi sebagai benturan alasan, beberapa di antaranya memotivasi seseorang untuk menyetujui yang lain dan mencampuri tindakannya untuk menahan diri dari campur tangan meskipun pada awalnya tidak setuju. Seseorang bersikap toleran terhadap orang lain bukan karena penolakan terhadap tindakan orang tersebut, melainkan pertimbangan dari sisi yang lain, yaitu sebagai seorang manusia. Dengan demikian, alasan yang memotivasi individu untuk bersikap toleran terhadap orang lain adalah mengelola alasan kesetidaksetujuan awal.

Secara luas toleransi bisa diartikan sebagai pemberian tempat secara luas untuk keberagaman dan perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok lain. Karena itu, maka sangat dibutuhkan pemberian penekanan kembali bahwa merupakan suatu hal yang tidak benar apabila toleransi diartikan sebagai pengurangan hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disamakan dengan keadaan yang dimiliki oleh orang atau kelompok lain, atau di lain

pihak mengorbankan hak-hak orang lain agar menjadi sama dengan kondisi suatu kelompok tertentu. Toleransi pada hakekatnya sangat menekankan pada pemberian penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok tersebut, tetapi juga dalamnya dipersatukan di dalam kerangka kebersamaan bagi kepentingan yang sama. Toleransi pada intinya adalah sikap menghormati, menerima dan menghargai keberagaman yang ada serta merupakan cara hidup kita sebagai manusia atau bentuk ekspresi diri kita. Toleransi sejati terpelihara oleh kata hati, kepercayaan, keterbukaan, komunikasi, pengetahuan dan kebebasan pemikiran kita. Toleransi secara singkat merupakan bentuk harmoni di tengah perbedaan yang ada dalam masyarakat (UNESCO APNIEVE, 2000:54 dalam Endang (2012).

Dari beberapa pengertian tentang toleransi di atas, maka karakteristik sikap toleransi dalam penelitian ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kementerian Pendidikan Nasional (2010:9) yang mengatakan bahwa toleransi pada hakikatnya merupakan bentuk sikap maupun tindakan yang di dalamnya ada jiwa saling menghormati perbedaan etnis, suku, agama, sikap, tindakan dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, maka karakteristik paling dasar dari toleransi adalah (a). menghargai perbedaan agama, (b). Menghargai perbedaan etnis/suku, (c). Menghargai perbedaan bahasa, (d). menghargai perbedaan pendapat, sikap dan tindakan. Kemudian menurut Tillman (2004:91), butir-butir penting dari toleransi adalah: (a). Kedamaian adalah tujuan, toleransi metodenya, (b). Toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan, (c). Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian, (d). Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang toleransi yang telah disebutkan sebelumnya, maka toleransi bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

1. Toleransi negatif. Bisa dilihat dalam suatu masyarakat yang anggotanya terdapat seorang atau kelompok yang berasal dari

latar belakang etnis atau suku yang berbeda dengan suku atau etnis masyarakat setempat. Perbedaan latar belakang ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan kebiasaan atau bahkan adat istiadat anggota masyarakat tersebut dengan masyarakat setempat. Karena perbedaan tersebut tentu saja adat-istiadat atau kebiasaan mereka yang berbeda dengan masyarakat setempat. Dalam posisi ini mereka mungkin saja memiliki relasi dan posisi yang lebih tinggi dari pada masyarakat setempat. Kendati kebiasaan, tutur kata, sikap dan perbuatan masyarakat pendatang bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat di mana mereka tinggal, tetapi dibiarkan begitu saja tanpa ada keberanian masyarakat setempat untuk menegur, mengkritik atau memberikan nasehat. Intinya dalam jenis toleransi ini seluruh kebiasaan masyarakat pendatang diterima begitu saja tanpa ada kritik. Oleh karena itu, dalam jenis toleransi ini ada unsur keterpaksaan dalam menerima adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pendatang (Rahman, 2018).

2. Toleransi positif. Toleransi jenis kedua ini dapat dilihat pada masyarakat dimana ada masyarakat pendatang yang adat istiadat dan kebiasaannya berbeda dengan penduduk setempat. Kendati berbeda latar belakang suku, ras, agama dan adat istiadat dengan penduduk setempat, tetapi mereka bergaul dengan baik dengan penduduk di mana mereka tinggal. Karena cara bergaul mereka yang baik, masyarakat setempat menerima mereka dengan baik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama bahkan adat istiadat yang mereka miliki. Toleransi positif dalam hal ini memiliki tingkatan di atas toleransi negatif (Rahman, 2018).
3. Toleransi ekumenis. Dalam jenis toleransi ini perbedaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan, agama bahkan kepercayaan dipandang sebagai sebuah kekayaan yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Perbedaan yang ada tidak menjadi masalah dalam komunikasi dan relasi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Perbedaan di sini dijadikan sebagai sarana belajar dan saling memperkaya satu sama lain. Toleransi ekumenis merupakan jenis toleransi tertinggi (Rahman, 2018).

Toleransi beragama berarti pengakuan akan keterbatasan suatu agama sebagai institusi pencarian, karena agama dalam wajah manusiawinya ini terkait erat dengan keterbatasan manusiawi dan keterbatasan ruang dan waktu. Toleransi di sini lalu berarti kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan diri di hadapan kemahabesaran Tuhan serta di hadapan orang dan/atau institusi lain (Andang, 1998:101).

Toleransi dalam masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural menjadi tuntutan paling dasar. Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Proses pengimplementasiannya dalam kehidupan yang penuh keanekaragaman dan perbedaan ini (agama, ras, budaya, suku bangsa, dan lain-lain) menyebabkan apa yang disebut dengan *cross cutting affiliation*. *Cross cutting affiliation* menjadi kekayaan sekaligus potensi dalam pengembangan budaya bangsa (Rahman, 2018). Namun dalam kenyataannya tidak segampang apa yang terlintas dalam pikiran kita. Adanya konflik dan pertentangan antar suku, agama, atau masyarakat berbeda adat istiadat dan budaya telah menjadi sumber terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat yang multikultural tersebut. Sejak tahun 1997 negara kita dilanda berbagai macam konflik. Terjadi berbagai macam konflik di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Ambon, Papua, Kalimantan, Poso, dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Konflik antar golongan dalam masyarakat seakan-akan tak terelakkan lagi di berbagai daerah di negara kita ini. Kendati demikian, konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia bisa diselesaikan karena keterlibatan elemen-elemen bangsa seperti pimpinan agama, pimpinan suku dan pemerintah setempat.

Selanjutnya pada tingkatan yang lebih tinggi, *cross cutting affiliation* akan menyebabkan munculnya *cross cutting loyalties*. Dalam hal ini *cross cutting loyalties* merupakan suatu proses terbentuknya sikap loyal terhadap adanya hubungan silang budaya yang sudah terbentuk dari *cross cutting affiliation*. *Cross cutting loyalties* ini berdampak positif pada adanya integrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia di tengah perbedaan agama, suku, etnis, asal

daerah, kepercayaan, keyakinan bahkan adat istiadat dan kebiasaan (Rahman, 2018).

Toleransi yang berhakikat kerendahan hati manusia itu ternyata bisa berdampak positif, baik bagi manusia dengan pluralitas agamanya maupun bagi agama itu sendiri. Bagi manusia secara umum, toleransi akan membawa kerukunan dan juga kerja sama demi kebaikan bersama. Bagi agama sendiri, toleransi berarti pula memilih untuk bersikap terus mencari, tidak berkubang dalam kemampuan institusi. Dengan memilih bersikap terus mencari, agama menjadi lebih dinamis. Pengakuan tulus akan kemahabesaran Tuhan justru bisa memacu agama untuk lebih mencari makna kemahabesaran itu, juga dalam konteks kini dan di sini untuk lebih memahami kehendak-Nya. Dalam Bahasa Cogley, agama lalu bisa berinteraksi dengan kemajuan zaman secara aktif, bukan melulu reaktif. Akhirnya, bisa juga dikatakan bahwa prinsip “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” seperti tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Kaafirun ayat 6 adalah bentuk kearifan yang dalam, bukan sekadar sopan santun pergaulan yang menjamin keamanan semu, melainkan kearifan yang aktif, kearifan demi kemajuan, demi pencarian yang tak kunjung selesai, karena Tuhan senantiasa lebih besar (Andang, 1998:101).

B. Konsep Keberagaman

Keberagaman atau keragaman berasal dari kata “ragam.” Keberagaman secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu keadaan beragam-ragam; terdiri atas beberapa jenis; perihal beragam; dan hal berbeda jenis (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

Keberagaman dalam konteks kehidupan masyarakat adalah suatu keadaan dimana ada perbedaan mendasar dalam berbagai segi kehidupan, yaitu utamanya dalam perbedaan agama, keyakinan, ideologi, suku, ras, adat istiadat dan kesopanan dan perbedaan situasi ekonomi (Setiadi, Hakam, & Effendi, 2006:151).

Selanjutnya menurut Herimanto dan Winarno, (2014:97) keberagaman merupakan bagian dari manusia sebagai insan sosial dimana mereka membentuk sebuah persekutuan hidup. Masing-

masing kelompok sebagai sebuah kesatuan hidup manusia pun memiliki keberagaman. Di sini masyarakat yang adalah sebuah persekutuan hidup memiliki perbedaan dan keragaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal suku, ras, agama, status sosial, budaya ekonomi, tempat tinggal, bahkan jenis kelamin dan lain sebagainya.

Keberagaman yang dimiliki manusia dalam kehidupan sosialnya menciptakan keadaan masyarakat yang majemuk. Majemuk dalam kondisi ini diartikan sebagai keadaan beragam, berjenis-jenis dan beranekaragam. Dalam konteks ini adanya perbedaan suku, etnis, agama, adat dan asal daerah merupakan bagian dari ciri masyarakat Indonesia yang memiliki sifat majemuk. Furnivall (1948) merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan konsep masyarakat majemuk (*plural society*). Furnivall mengatakan bahwa ciri utama yang dimiliki oleh masyarakat adalah hidup secara kelompok yang secara fisik berdampingan, namun juga oleh kehidupan sosial mereka terpisah dan dalam sebuah satuan politik dimana mereka tergabung di dalamnya (Herimanto dan Winarno, 2014:97; Nasikun, 2011:35).

C. Konsep Etnis

Kata etnis (*ethnic*) secara etimologis diturunkan dari bahasa Yunani *ethnos* yang menunjuk makna orang atau bangsa. Kata *ethnos* sering memiliki arti semua kelompok sosial yang di dalamnya terdapat adat istiadat, ras, nilai dan norma budaya, bahasa, dan hal lain, dimana hal-hal ini mengindikasikan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok yang disebut minoritas atau kelompok mayoritas (Liliweri, 2005:8-9). Sementara itu, menurut (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), etnik atau etnis memiliki arti sebagai “punya ikatan dengan suatu kelompok masyarakat di dalam sebuah kebudayaan atau sistem sosial dan memiliki makna atau peran khusus yang disebabkan oleh faktor kesamaan agama, adat, bahasa, keturunan dan lain-lain ...”

Menurut Koentjaraningrat (1993) golongan etnik atau *ethnic group* atau suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang di dalam kehidupannya diikat oleh adanya identitas dan kesadaran

akan adanya “kesatuan kebudayaan”. Identitas dan kesadaran ini selalu (meskipun tidak sering) diperkuat dengan adanya bahasa yang sama. Warga kebudayaan yang bersangkutan menentukan kesatuan kebudayaan ini. Dalam tinjauan etnografi, adanya suatu kebudayaan yang satu dari suatu suku bangsa di dalamnya termasuk adanya kesatuan komunitas dimana mereka berdomisili dalam sebuah wilayah administratif tertentu atau daerah geografi ekologi tertentu. Dalam penelitian mengenai suku bangsa menurut kerangka etnografis faktor asal-usul sejarah suku-suku bangsa ikut disertakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu suku atau bangsa dapat ditelusuri melalui pendekatan wilayah atau lokasi dimana kelompok suku tersebut tinggal atau berdomisili ataupun bisa melalui wilayah dimana asal suku tersebut bisa ditunjukkan. Contohnya, secara historis Sumatra merupakan asal dari suku Batak.

Menurut F. Baart (1988) dalam Herimanto dan Winarno (2014:102), etnik merupakan sebuah kelompok masyarakat yang pada umumnya memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang baik secara biologis, memiliki kesamaan nilai budaya dan memiliki kesadaran terhadap kebersamaan di dalam sebuah bentuk budaya yang membangun interaksi sendiri dan jaringan komunikasi, dan membentuk sendiri apa yang merupakan kekhasan sebuah kelompok agar dapat diterima oleh kelompok di luar kelompok lain dan bisa dilihat perbedaannya dengan kelompok lain atau populasi lainnya.

Menurut Wirutomo (2011:89), etnis atau etnisitas adalah konsep yang kompleks dan tidak sama dengan pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata etnis diturunkan dari bahasa Yunani kuno, *ethnos* yang diartikan sebagai bangsa dan *ethnikos* yang diartikan “lainnya”. Etnik atau etnisitas memfokuskan kajiannya pada pemisahan antara suatu bangsa dengan kelompok-kelompok lain yang dipandang sebagai bukan bangsa. Dalam masyarakat Yunani kuno, dibedakan antara *ethnos*, yang merujuk pada masyarakat bukan anggota masyarakat Grika Yunani, serta anggota bangsa Yunani itu sendiri, yang disebut Genos Hellenon (Tilaar, 2007:4). Definisi etnisitas melukiskan tentang bagaimana terjadinya interaksi di antara golongan etnik dengan suatu suku bangsa, oleh

karena itu etnisitas pada hakekatnya mempunyai dua sisi yang terarah pada adanya dominasi dan emansipasi (Pieterse, 1996:25 dalam Wirutomo (2011:89). Dari pengertian tentang etnisitas, maka dapat disimpulkan dua hal penting: (1) etnisitas bisa mendorong kelompok etnis dalam melakukan gugatan dan protes jika terjadi ketidakadilan atau tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah bangsa atau negara; (2) etnisitas bisa pula menggambarkan politik kebudayaan dari suatu kelompok suku atau etnis yang dominan.

Lake dan Rothchild dalam Wirutomo (2011:89) mengungkapkan bahwa etnisitas atau etnik sering memiliki arti identitas bersama yang didasarkan atas ciri-ciri fisik, bahasa, tali temali persaudaraan, persamaan sejarah, budaya atau daerah asal. Suatu kelompok etnik pada dasarnya merujuk ke suatu kelompok yang memiliki persamaan dalam hal sejarah, keturunan serta identitas budaya: nilai, tradisi, bahasa, kebiasaan serta adanya pola perilaku yang berwujud kongkrit atau semu. Dari penjelasan tersebut, etnis atau etnisitas lebih merupakan konsep budaya yang mendasarkan diri pada tanda-tanda seperti bahasa, agama, pakaian, artefak, dan lain-lain.

Menurut Narroll (1964) dalam Liliweri (2005:9), sebuah etnik atau kelompok etnis bisa diidentifikasi sebagai sebuah kelompok yang: (1). memiliki kemampuan bertahan dan berkembang secara biologis; (2). memiliki kesamaan kebudayaan dan adat istiadat serta memiliki kesadaran terhadap kebersamaan di dalam suatu model kebudayaan; (3). membangun interaksi sendiri serta jaringan komunikasi; (4). menetapkan apa yang menjadi ciri khas kelompoknya yang dapat dibedakan dari kelompok lain dan diterima oleh kelompok lain.

Berkaitan dengan definisi etnis, Thomas Sowell yang merupakan penulis buku *Ethnic of America* mengatakan: "Sebuah kelompok etnik adalah kumpulan orang atau sekelompok orang yang memiliki praktek hidup dan pandangan yang sama terhadap norma dan nilai yang ada dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Sebagai contoh kesamaan suku bangsa, agama, bahasa, negara asal, kebudayaan, serta kesamaan lain yang kesemuanya bernaung dalam sebuah kelompok yang bernama kelompok etnis." (Liliweri, 2005:9).

Di sisi lain Eriksen (1993:1-15) dalam Wirutomo (2011:89-90) mengungkapkan bahwa etnik adalah suatu aspek dalam hubungan sosial di antar kelompok. Dalam berinteraksi suatu kelompok menganggap dirinya berbeda budaya dibandingkan anggota kelompok lain. Ketika perbedaan budaya selalu menghasilkan ketidaksamaan dalam proses interaksi antara anggota kelompok-kelompok tersebut, hubungan sosial yang terbentuk akan mengandung unsur etnis. Perbedaan budaya tidak serta merta menciptakan suatu kesadaran kelompok etnik; hubungan sosial yang terjadi dengan mereka yang berbedalah yang menghasilkan kategori “kita” dan “mereka”. Sehingga identitas kelompok etnik harus didefinisikan dalam konteks relasinya dengan kelompok etnis lain.

Etnisitas atau etnis adalah sebuah pandangan yang pada intinya berisi kepercayaan orang terhadap nilai, norma, simbol, keyakinan dan praktik budaya secara bersama-sama. Terbentuknya sebuah “kelompok etnis” didasarkan pada simbol budaya yang dimiliki bersama-sama dan telah bertumbuh dalam bingkai sejarah, politik dan sosial tertentu dan yang telah menimbulkan adanya rasa terlibat yang sebagian dilandasi oleh adanya mitologi leluhur yang diakui bersama. Meski demikian, mengikuti pendapat antiesensialis, jelas sudah bahwa kelompok-kelompok etnis yang tidak memiliki landasan berdasarkan ciri-ciri budaya universal atau ikatan primordial yang dimiliki oleh kelompok tertentu, tetapi tercipta karena adanya proses diskursus. Etnis tercipta melalui kebiasaan orang menyebutkan identitas kelompok dan bagaimana mereka mengidentifikasi dirinya melalui simbol-simbol dan tanda-tanda yang menyebabkan munculnya etnisitas itu sendiri (Barker, 2005:257).

Sehubungan dengan pengertian etnis, Handelman sebagaimana dikutip oleh Tilaar (2007:5), membedakan tingkat perkembangan di dalam sebuah komunitas budaya manusia ke dalam empat tingkatan:

1. Kategori etnis
2. Jaringan etnis
3. Asosiasi etnis
4. Masyarakat etnis.

Pada tingkat kategori etnis, keterkaitan seorang individu dengan masyarakatnya adalah sebuah pertalian yang sedikit longgar dan sekedar menggambarkan bahwa ada perbedaan budaya di antara kelompoknya dengan dunia di luar dirinya. Pada tingkat selanjutnya yaitu jaringan etnis telah ada interaksi teratur di antara anggota etnis tersebut dan melalui jaringannya terjadi pembagian sumber-sumber di antara masing-masing anggota. Pada tingkat asosiasi etnis, anggota-anggotannya telah menumbuhkan ketertarikan yang sama dan telah terbentuk organisasi-organisasi politik melalui adanya pernyataan-pernyataan bersama. Pada tingkatan masyarakat etnik atau *ethnic community* suatu masyarakat sudah mempunyai daerah yang relatif sama dan memiliki ikatan dengan organisasi politik sama, seperti yang nampak dalam sebuah negara bangsa (*national state*). Bentuk yang terakhir inilah yang dapat kita katakan konsep nasion atau bangsa (Tilaar, 2007:5).

Suku atau etnis adalah identitas sosial dan budaya yang dimiliki seseorang. Artinya, proses untuk mengidentifikasi seseorang individu bisa ditelusuri melalui tradisi, budaya, bahasa, kepercayaan, dan melalui pranata yang dihidupi dan dari etnis mana seseorang berasal. Oleh karena itu, identitas sosial budaya seseorang atau sebuah kelompok bisa diketahui, contohnya melalui bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, kita masih bisa membedakan orang Madura dan Batak kendati sama-sama memakai bahasa Indonesia melalui dialek dan gaya bicara bahasa Indonesia mereka (Herimanto dan Winarno, 2014:103-104).

Dari beberapa definisi tentang etnis atau etnisitas, maka dapat disimpulkan bahwa etnis berkaitan dengan identitas seseorang dan proses identifikasi. Etnisitas merupakan gabungan dari identifikasi diri sendiri dan identifikasi oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam interaksi antara individu yang satu dengan yang lain di masyarakat, identitas etnis mempunyai beberapa dimensi, yaitu penentuan identitas yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan; identitas hasil persepsi pihak lain dan identitas hasil penentuan oleh bangsa dan negaranya. Dasar dari identifikasi diri sendiri adalah kepercayaan terhadap kesamaan keturunan, tradisi budaya termasuk bangsa dan agama, sejarah, juga memori tentang migrasi,

kolonialisasi. Sedangkan identifikasi oleh orang lain terutama berdasarkan pada ciri-ciri fisik, budaya dan perilaku yang sangat jelas terlihat beda atau dipersepsikan berbeda oleh seseorang yang melakukan identifikasi terhadap orang lain. Negara, untuk kepentingan politik tertentu, juga memiliki kekuasaan untuk menentukan kelompok etnis dominan atau beberapa kelompok etnis yang dianggap sebagai komponen utama pembentukan negara (Wirutomo, 2011:90-91).

Menurut Liliweri (2005:12-13), makna kelompok etnik mengandung dua hal utama, yakni pengertian luas maupun pengertian sempit. *Pertama*, pengertian secara luas berhubungan dengan kehadiran sebuah kelompok tertentu yang memiliki ikatan dengan karakteristik tertentu: misalnya dari segi fisik, sosio-budaya, sampai ideologi. Dengan demikian, dalam arti luas, sekelompok orang beragama tertentu dapat kita kategorikan sebagai suatu kelompok etnik; komunitas pedagang kaki lima, komunitas *Lion's Clubs*, komunitas tukang becak, komunitas alumni UI, keluarga mahasiswa Batak, IDI maupun ISAHl adalah kelompok etnik. Sedangkan dalam arti sempit memang kita akan merujuk arti etnik pada kelompok suku bangsa karena alasan memiliki kebudayaan yang sama. *Kedua*, pengertian etnis secara sempit sering dihubungkan dengan etnik. Oleh karena itu, terminologi kelompok etnis adalah konsep yang menjelaskan sebuah kelompok, yang mencakup kelompok ras atau yang tidak kelompok ras, yang dianggap berada secara sosial dan sudah membangun subkulturnya sendiri.

D. Konsep Pluralisme

Pluralisme secara etimologi merupakan penggabungan dari kata Bahasa latin *plural* (jamak) dan *isme* (paham/ajaran). Oleh karena itu secara sederhana pluralisme diartikan sebagai sebuah paham atau teori yang mengartikan realitas sebagai sesuatu yang terdiri dari banyak substansi (Partanto & Dahlan, 1994).

Menurut Frans Magnis Suseno, pluralisme tak lain kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas. Pluralisme tidak berarti menyatakan bahwa semua agama sama saja, tidak ada kaitan dengan

pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang dianggap paling benar. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama dengan mereka. Oleh karena itu, pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat tetap bersatu. Pluralisme tidak hanya berarti membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Karena seorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Seorang humanis dengan sendirinya seorang pluralis (Magnis-Suseno, 2008:27-28).

Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang meniscayakan adanya diversitas dalam masyarakat memiliki dua “wajah,” konsensus dan konflik. Konsensus mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu akan survive (bertahan hidup) karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan bersama yang harus ditaati, sedangkan teori konflik justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena adanya konflik. Teori ini tidak menafikan adanya keharmonisan dalam masyarakat. Keharmonisan terjadi bukan karena adanya kesepakatan bersama, tetapi karena adanya pemaksaan kelompok kuat terhadap yang lemah (Sumbulah, 2010).

E. Konsep Masyarakat

Masyarakat merupakan sebuah istilah yang sangat sering digunakan dalam menggambarkan adanya perkumpulan-perkumpulan hidup manusia, entah melalui tulisan-tulisan ilmiah ataupun melalui penggunaan bahasa dalam kehidupan setiap hari. Kata *society* yang berasal dari bahasa Inggris diturunkan dari akar kata bahasa Latin *socius*, artinya “kawan”. Kata Arab *syaraka* yang diartikan *ikut serta atau berpartisipasi* merupakan akar dari istilah masyarakat.” (Koentjaraningrat, 2002:143-144).

Karena sifat manusia di dalam suatu kelompok sifatnya dinamis, selalu mengalami perubahan seiring perubahan waktu, maka kita tidak bisa menemukan sebuah definisi tunggal tentang masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pemahaman para ahli mengenai masyarakat (Kolip dan Setiadi, 2011:35). Menurut Emile Durkheim dalam Kolip dan Setiadi (2011), masyarakat merupakan sebuah fakta objektif dari individu-individu yang masuk keanggotaannya.

Kata *society* atau masyarakat oleh Gilin dan Gillin (1954) didefinisikan sebagai: "... the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative." ("... pengelompokan terbesar di mana kebiasaan umum, tradisi, sikap dan perasaan tentang kesatuan yang operatif.") (Koentjaraningrat, 2002:147).

Sementara itu, Max Weber mendeskripsikan masyarakat merupakan aksi atau struktur yang pada intinya ditentukan oleh adanya nilai-nilai dominan dan harapan yang ada pada warganya. Sementara itu, Paul B. Horton melihat masyarakat sebagai suatu kumpulan manusia yang dalam kehidupannya hidup bersama cukup lama, relatif mandiri, memiliki kebudayaan yang sama dan mendiami wilayah tertentu, serta melaksanakan semua kegiatannya dalam kelompoknya tersebut. Selanjutnya ia menyatakan bahwa suatu masyarakat merupakan sebuah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain.

Selanjutnya Mac Iaver (1957) sebagaimana dikutip oleh Soekanto (2012) mengatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah kelompok manusia yang berdomisili dalam sebuah daerah tertentu dan memiliki sifat-sifat yang saling ketergantungan, memiliki kebudayaan bersama dan pembagian kerja yang jelas. Sedangkan menurut Ralph Linton (1936) sebagaimana dikutip oleh Soekanto (2012) mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang dalam kehidupannya sudah cukup lama hidup bersama dan bekerja bersama, kemudian bisa mengatur dirinya serta memiliki pemikiran tentang dirinya sendiri yang merupakan sebuah kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Menurut Koentjaraningrat (2002:146-147) masyarakat merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul satu sama lain. Dalam kenyataannya kelompok manusia ini berinteraksi sejalan dengan sebuah sistem kebudayaan tertentu dengan sifatnya yang berkelanjutan dan terikat oleh sebuah perasaan kesamaan identitas. Selanjutnya Soekanto (2012) mengatakan bahwa komunitas atau masyarakat merujuk kepada sekelompok masyarakat yang dalam arti geografis mendiami suatu wilayah tempat tinggal dan terpisahkan oleh batas-batas tertentu dan jika dalam perbandingan dengan masyarakat dari luar batas teritorialnya didasarkan pada interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tentang masyarakat, bisa ditemukan titik temu yang substansial, yaitu bahwa masyarakat pada hakekatnya adalah kumpulan manusia yang memiliki komponen-komponen dasar sebagai berikut:

- a. Adanya sejumlah besar orang, ada interaksi di antara satu individu dengan individu lain serta terdapat interaksi antar individu dan kelompok, serta adanya interaksi di antara kelompok yang tergabung dalam satu kesatuan sosial kemudian menghasilkan kebudayaan sebagai sebuah produk kehidupan.
- b. Tercipta sistem dan struktur sosial budaya antara kelompok dalam skala mikro atau kecil serta dalam skala makro atau luas/besar.
- c. Berdomisili dalam sebuah daerah tertentu serta hidup pada wilayah itu dalam jangka waktu yang cukup lama sampai beberapa keturunan (Kolip dan Setiadi, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai masyarakat yang disampaikan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang dalam kehidupannya berdomisili dalam teritori yang jelas dalam rentang waktu cukup lama, mempunyai aturan-aturan dan norma-norma sebagai pedoman dalam membangun kehidupan mereka guna mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan bersama, serta telah beranak pinak atau telah melakukan regenerasi atau beranak cucu (Kolip dan Setiadi, 2011:37).

Selanjutnya dari pengertian-pengertian mengenai masyarakat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat adalah:

1. Ada interaksi di antara anggota-anggota dalam suatu masyarakat

Adanya proses interaksi sosial di dalam masyarakat dimana sebuah hubungan sosial bersifat dinamis dan berkaitan dengan relasi antar individu maupun di antara kelompok-kelompok ataupun di antara individu dengan kelompok dimana kontak sosial dan komunikasi menjadi syarat mutlak terjadinya interaksi sosial.

2. Tinggal pada suatu daerah yang memiliki batas-batas yang jelas Rukun Tetangga atau Rukun Warga, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, serta Negara merupakan suatu wilayah dimana suatu kelompok berdiam dan beraktivitas menurut suatu keadaan geografis tertentu dan merupakan tempat tinggal bagi komunitasnya.

3. Antara anggota kelompok ada saling ketergantungan

Ada kergantungan antara satu dengan lainnya terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup antara anggota dalam masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu. Masing-masing anggota di dalam masyarakat ini memiliki keterampilan yang searah dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Anggota masyarakatnya hidup dalam suasana saling memenuhi dan melengkapi dalam kehidupannya agar tetap berhasil.

4. Mempunyai kebudayaan atau adat istiadat tertentu

Kebudayaan dan adat istiadat ada agar tatanan kehidupan masyarakat bisa teratur, termasuk di dalamnya bagian yang sangat luas dalam cara bagaimana interaksi antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat, misalnya dalam kesenian, perkawinan, kesenian, mata pencaharian, dan bentuk-bentuk kekerabatan.

5. Ada identitas bersama

Setiap kelompok harus mempunyai identitas dimana mereka bisa dikenali oleh anggota masyarakat lainnya, identitas ini penting terutama dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Identitas kelompok bisa berupa pakaian, lambang-lambang bahasa, simbol-simbol tertentu dari perumahan, benda-benda tertentu misalnya mata uang, alat pertanian, kepercayaan, senjata tajam dan lain-lain.

Adapun menurut Soekanto (2012) kehidupan masyarakat dapat dicirikan sebagai berikut:

- a. Individu yang hidup bersama paling kurang beranggotakan dua orang individu.
- b. Bergaul dan bercampur dalam kurun waktu yang lama. Perkumpulan manusia ini akan menimbulkan sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan mereka dan akan menimbulkan manusia-manusia baru.
- c. Ada kesadaran akan kehidupan sebagai suatu kesatuan.
- d. Sebagai sistem bersama dan menghasilkan kebudayaan karena adanya perasaan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya menurut Soekanto (2012) untuk terbentuknya suatu masyarakat atau kelompok sosial diperlukan beberapa persyaratan tertentu, diantaranya:

- a. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa ia adalah bagian dari kelompok tersebut;
- b. Di antara anggota satu dengan yang lainnya memiliki hubungan timbal-balik;
- c. Memiliki salah satu aspek yang dimiliki semua anggota kelompok yang menyebabkan hubungan mereka semakin erat, misalnya berupa perasaan senasib, tujuan yang sama, kepentingan yang sama, bahkan ideologi politik yang sama dan lain sebagainya. Faktor memiliki musuh bersama bisa pula menjadi faktor pemersatu/pengikat.
- d. Memiliki pola perilaku, berkaidah dan berstruktur;
- e. Berproses dan bersistem.

Sementara itu Marion Levy dalam Kolip dan Setiadi (2011:37) menguraikan kriteria masyarakat dalam kehidupan kelompok sebagai berikut:

- a. Mampuan bertahan lebih dari usia anggotanya.
- b. Reproduksi atau kelahiran merupakan cara merekrut seluruh atau sebagian anggotanya.
- c. Swasembada merupakan sistem tindakan utama.
- d. Setia secara bersama-sama pada sistem tindakan utama, *yang kemudian ditambahkan oleh Parson, yaitu: membuat sosialisasi kepada generasi selanjutnya.*

Selanjutnya tipe-tipe lembaga sosial oleh J. L. Gillin dan J. P. Gillin (Soekanto, 2012) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sesuai perkembangannya
 - a. *Crescive institution*, adalah lembaga sosial pertumbuhannya disebabkan oleh adat istiadat secara tidak sengaja. Misalnya: hak milik, agama dan lembaga perkawinan.
 - b. *Enacted institution*, adalah lembaga sosial yang untuk tujuan tertentu sengaja dibentuk. Misalnya: Lembaga Pendidikan dan Lembaga Piutang (Bank).
2. Sesuai dengan sistem nilai yang diperoleh masyarakat
 - a. *Basic institution*, adalah lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memelihara aturan di masyarakat. Misalnya: negara, sekolah dan keluarga.
 - b. *Subsidiary institution*, adalah lembaga sosial yang memiliki kaitan dengan masalah yang oleh masyarakat dianggap kurang penting, misalnya rekreasi. Kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan menjadi ukuran yang dipakai dalam menentukan penting atau tidaknya suatu lembaga sosial. Misalnya: setelah mendapat gaji pertama mentraktir teman-teman.
3. Sesuai penerimaan masyarakat
 - a. *Approved and sanctioned institution*, adalah lembaga sosial yang oleh masyarakat diterima. Misalnya: perusahaan dagan dan lembaga sekolah.

- b. *Unsanctioned institution*, adalah lembaga sosial yang tidak diterima oleh masyarakat kendati tidak dapat diberantas oleh masyarakat. Misalnya: perjudian, pelacuran dan sindikat kejahatan.
4. Sesuai penyebarannya
- a. *General institution*, adalah lembaga sosial yang sangat populer di kalangan sebagian besar masyarakat dunia. Misalnya: lembaga agama.
 - b. *Restricted institution*, adalah lembaga sosial yang tidak dikenal oleh banyak orang dan hanya dikenal oleh sedikit masyarakat, misalnya pemeluk agama tertentu. misalnya: institusi agama, Buddha, Hindu, Islam, Kristen, dan Katolik.
5. Sesuai fungsinya
- a. *Operative institution*, adalah lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan cara-cara atau pola-pola yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dari masyarakat bersangkutan. Misalnya: lembaga industri.
 - b. *Regulative institution*, adalah lembaga sosial yang memiliki tujuan mengawasi tata kelakuan atau adat-istiadat yang dimiliki masyarakat. misalnya: pengadilan dan kejaksaan sebagai lembaga hukum.

F. Konsep Masyarakat Lokal dan Pendatang

Masyarakat lokal dalam konsep Soekanto (2012) disebut masyarakat setempat (*community*). Kata *community* bisa diartikan menjadi “masyarakat setempat”, dimana kata ini merujuk pada anggota sebuah suku atau bangsa, kota ataupun desa. Disebut masyarakat setempat/lokal adalah apabila anggota-anggota sebuah kelompok, besar atau kecil, sedemikian rupa hidup bersama kemudian merasa bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama.

Selanjutnya menurut Soekanto (2012), sebuah masyarakat lokal pasti mempunyai tempat tinggal atau lokalitas (wilayah) tertentu. Meskipun kumpulan manusia ini adalah masyarakat yang sifatnya berpindah-pindah, tapi pada waktu-waktu tertentu anggotanya pasti

bertemu pada suatu wilayah tertentu, contohnya saat melaksanakan upacara-upacara tradisional.

Menurut Koentjaraningrat (2002:146-147), masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi atau bergaul. Dalam interaksinya mereka terikat oleh sebuah sistem adat istiadat tertentu dimana sistem adat tersebut bersifat terikat dan kontinu karena adanya suatu rasa identitas bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan masyarakat lokal merupakan sekelompok manusia yang menetap dan tinggal dalam waktu yang lama, memiliki ikatan sejarah emosional dengan wilayahnya dan memiliki ikatan budaya yang sama.

Sementara itu masyarakat pendatang dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang melakukan perpindahan ke suatu wilayah dan tinggal serta beradaptasi dalam proses interaksi bersama masyarakat pribumi/lokal.

G. Konsep Agama dan Masyarakat

Menurut para ilmuwan sosial, kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut agama. Bahkan, dalam kehidupan manusia tak luput dari agama. Agama-agama lahir pada babak sejarah premodern, sebelum masyarakat dan dunia diwarnai perkembangan pesat ilmu dan teknik (Kahmad, 2006:119).

Agama secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki arti "tidak kacau". Diturunkan dari suku kata *a* artinya "tidak" dan *gama* artinya "kacau". Agama dalam hal ini diartikan sebagai aturan yang dibuat untuk mengatur manusia dalam kehidupannya agar tidak ada dalam situasi kekacauan. Dalam arti khusus, agama bisa memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris *religion*, kata bahasa Belanda *religie* dimana kedua kata itu diturunkan dari kata *religio* dalam bahasa Latin, diturunkan dari akar kata *religare* artinya mengikat (Kahmad, 2006:13). Secara umum agama dapat diartikan sebagai pengungkapan relasi diantara manusia dengan Yang Ilahi, yang memiliki kekuasaan yang kudus dan keberadaannya jauh lebih tinggi dari keberadaan manusia itu

sendiri. Manusia mengalami daya tarik (*fascinosum*) kepada Yang Ilahi, tetapi sekaligus juga merasa takut (*tremendum*). Namun di antara semua perasaan itu manusia terutama mengalami ketergantungan kepada Yang Ilahi. "Tuhan, Allah, Dewa, Sang Hyang Ada, dan lain-lain" merupakan sebutan penganut masing-masing agama terhadap Yang Ilahi. Pengalaman akan Yang Kudus, Yang Suci atau Yang Ilahi itu disebut iman atau kepercayaan. Pengalaman ini mengenai manusia secara utuh, yaitu mengenai kemampuannya untuk berpikir, berkehendak dan bertindak.

Sementara itu Gelles & Levina (1995:445) mengartikan agama: "*Religion is any set of institutionalized beliefs and practices that deal with the ultimate meaning of life. Religions provide blueprints for social behavior based on a divine, supernatural, or transcendental order.*" Agama merupakan sekumpulan keyakinan yang dilembagakan dan praktik yang berhubungan dengan makna tertinggi kehidupan. Agama menyajikan cetak biru untuk perilaku sosial berdasarkan urutan ilahi, supranatural, atau transendental.

Menurut Nottingham (1994:9), ... agama adalah hasil dari kebudayaan atau bagian dari kreasi diri manusia aktivitas-aktivitasnya sebagai makhluk yang menciptakan kebudayaan. Dengan demikian menurut pandangan sarjana sosiologi, religion atau agama merupakan sebuah sarana kebudayaan untuk manusia dan melalui sarana ini manusia bisa menyesuaikan dirinya dalam keseluruhan lingkungan hidupnya dengan pengalaman-pengalamannya; mencakup di dalamnya pribadinya sendiri, anggota kelompok, lingkungan dan alam lain yang ia alami sebagai sesuatu yang tidak terjangkau penalaran manusia (*transcendental*). Dalam lingkungan tersebut terakhir inilah - perasaan, pikiran, bahkan perbuatan manusia berhadapan dengan faktor-faktor yang dia rasakan berada di luar jangkauan pengalamannya setiap hari dengan dirinya sendiri, dengan dunia nyata bahkan teman-temannya atau yang *yang sakral* - membuat kita percaya merupakan inti agama itu sendiri.

Selanjutnya menurut Kahmad (2006:14), agama menurut pengertian sosiologi berarti gejala sosial umum yang tanpa kecuali dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berada di dunia ini. Agama

adalah bagian dari sistem sosial dan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial. Selanjutnya Agama pun merupakan unsur dari kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selain unsur lain, di antaranya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, sistem organisasi sosial dan sistem peralatan.

Dalam kaitan dengan pengertian agama dalam konteks sosial, Habermas mengatakan bahwa agama berkembang dalam tiga fase. Pada tahap awal, Habermas memandang agama sebagai bagian dari elemen *Lebenswelt* yang harus dilewati atau dilampaui. Di tahap kedua, Habermas mulai memandang agama sebagai bagian dari *good life* yang perlu diperhitungkan oleh liberalisme politik. Dan akhirnya, di usia senja Habermas memandang agama sebagai sistem pandangan dunia total berhadapan dengan sekularitas. Pada fase ini, Habermas mendesak para warga beragama maupun sekular saling belajar. Sekularitas harus belajar dari agama, dan sebaliknya (Menoh, 2015:95).

Dari beberapa pengertian tentang agama, maka dapat disimpulkan bahwa agama memiliki serangkaian aturan yang berlaku mutlak bagi seluruh manusia, individu dan bangsa, pada setiap waktu dan tempat. Peraturan-peraturan ini betul-betul adil karena dibuat sendiri oleh sang pencipta alam semesta. Secara terperinci agama memiliki peranan yang bisa dilihat dari: aspek keagamaan (*religijs*), kejiwaan (*psikologis*), kemasyarakatan (*sosiologis*), hakikat kemanusiaan (*human nature*), asal usulnya (*antropologis*) dan moral (*ethics*).

Oleh karena itu, sesuatu yang mempersatukan merupakan hakekat dari peranan sosial agama. Secara harafiah agama menghasilkan suatu komunio, yang mengikat anggota-anggota dari kelompok masyarakat bahkanpun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membuat mereka bersatu. Agama menjamin adanya persetujuan bersama dalam masyarakat, karena nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan. Peranan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kekuatan yang mengikat, melestarikan dan mempersatukan, tetapi juga mempunyai fungsi lain sebagai

kekuatan yang dapat memecah belah, menceraikan-beraikan bahkan bisa juga menghancurkan atau menyebabkan konflik (Nottingham, 1994).

Emile Durkheim mendefinisikan agama merupakan sebuah sistem yang integral dari praktik-praktik dan kepercayaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang sakral. *Sakral* dibedakan dari yang *profan*. Sakral adalah hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan *supranatural*, sementara profane adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi (Durkheim, 2003 dalam Wirutomo (2011:131). Dalam pandangannya agama berasal dari masyarakat itu sendiri dan dalam agama terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Hal yang diyakini sakral, menimbulkan kekaguman dan kehormatan dan melebihi kehidupan duniawi.
- b. Kumpulan keyakinan yang dihayati sebagai sesuatu yang sakral.
- c. Ada kegiatan ritual keagamaan.
- d. Ada kumpulan orang percaya yang mengikuti ritual yang sama.

Emile Durkheim memberikan kesimpulan bahwa agama dalam masyarakat primitif memiliki tujuan utama membantu orang berhubungan dengan sesamanya, bukan dengan tuhan. Ritual-ritual keagamaan membantu manusia dalam mengembangkan *sense of community* atau rasa sepaguyuban, sebagai contoh ketika secara bersama-sama mereka mengambil bagian di dalam pesta kelahiran, kematian, dan perkawinan; dan secara bersama melaksanakan perayaan musim menanam dan memanen (Kahmad, 2006:122).

Sejalan dengan pendapat Emile Durkheim, maka Ronald Johnstone dalam Wirutomo (2011:131) mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan dan praktek ketika sekelompok orang merumuskan dan merespon apa yang mereka rasakan sebagai sesuatu yang suci dan biasanya bersifat *supranatural*. Dalam penjelasan lebih lanjut ia menggambarkan tentang lima karakteristik dasar dari apa yang disebut sebagai agama. *Pertama*, agama merupakan fenomena kelompok. *Kedua*, agama berkaitan dengan yang sakral dan *supranatural*. *Ketiga*, agama berhubungan dengan *body of beliefs* atau semesta keyakinan. *Keempat*, agama merupakan

seperangkat praktek dan, *kelima*, agama berhubungan dengan kewajiban-kewajiban moral atau *moral prescription*.

Selanjutnya menurut Nottingham (1994:38), pada umumnya agama menjelaskan kenyataan bahwa nilai yang dimiliki oleh hampir semua masyarakat tidak hanya sebagai kesatuan nilai yang tercampur-aduk, melainkan tersusun dalam tingkat (hirarki). Agama menetapkan nilai-nilai yang *tertinggi* dalam hirarki ini.

Sementara itu, menurut Mukti Ali (1999:61), untuk dapat memiliki pemahaman tentang agama lain dalam masyarakat, maka seseorang harus memiliki kriteria sebagai berikut: *pertama*, sifat intelektual. Dalam sifat ini seseorang harus memiliki informasi dan pengetahuan yang komprehensif dan menyeluruh tentang agama orang lain agar bisa memahami dan mengetahui fenomena secara menyeluruh. *Kedua*, kondisi emosional yang cukup. Cara untuk memahami agama lain adalah dengan memiliki kemampuan emosional yang cukup karena agama melibatkan keseluruhan hidup manusia. Keseluruhan hidup manusia meliputi: intelektual, emosi serta kemauannya. Intinya dalam usaha untuk memahami agama orang lain dibutuhkan adanya “feeling, perhatian, *metexis* atau perhatian.” *Ketiga*, kemauan. Kemauan diperlukan bagi orang yang ingin memahami agama orang lain. Dalam orang yang ingin mempelajari agama orang lain harus ditunjukkan dan diorientasikan ke arah tujuan yang konstruktif. *Keempat*, pengalaman. Pengalaman di sini adalah pengalaman dalam arti luas. Pengalaman seseorang terhadap agama yang berbeda darinya menjadi modal penting dalam upaya memahami agama lain. Hal ini disebabkan karena keseluruhan proses kehidupan manusia selalu berkaitan dengan agama. Orang yang memiliki pengalaman yang luas tentang agama lain dapat menghubungkan pikiran-pikiran orang dalam pelbagai macam tindak-lakunya, perasaannya, dan cara berpikinya.

Menurut Nottingham (1994:51-66) dalam kaitan antara masyarakat dan agama, maka bisa dibagi tipe-tipe masyarakat sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat yang memiliki nilai-nilai sakral dan terbelakang

Tipe pertama ini diwakili oleh masyarakat kecil, terbelakang dan terisolasi. Masyarakat ini masih rendah dalam hal tingkat perkembangan teknik dan pembedaan kelas-kelas sosial mereka relatif kecil atau pembagian kerja relatif kecil. Dalam masyarakat ini keluarga adalah lembaga yang dianggap paling penting kemudian spesialisasi dalam pengaruh kehidupan ekonomi dan pemerintahan masih sangat sederhana. Perkembangan dalam hal perubahan sosial masih pelan (Nottingham, 1994:51).

Masing-masing anggota dalam jenis masyarakat ini menganut agama yang sama secara bersama; oleh sebab itu mereka memiliki keanggotaan yang sama di dalam kelompok agama dan masyarakat. Organisasi keagamaan itu sendiri merupakan suatu lembaga yang tidak begitu jauh terpisah dan merupakan salah satu aspek dari keseluruhan aktivitas kelompok. Di sini agama mempengaruhi setiap aktivitas kelompok, entah yang bersifat politik, ekonomi, rekreatif dan kekeluargaan (Nottingham, 1994:51).

Jumlah anggota masyarakat tipe ini cukup kecil, oleh karena itu adat istiadat diketahui paling tidak melalui pembicaraan dari mulut ke mulut oleh semua anggotanya. Tipe masyarakat ini memiliki penanda bahwa: *pertama*, agama menginternalisasikan efek sakralnya secara mutlak dalam sistem nilai masyarakat; *kedua*, selain keluarga lembaga belum mengalami perkembangan, di sini agama merupakan fokus utama dalam mengintegrasikan dan mempersatukan masyarakat secara keseluruhan (Nottingham, 1994:52).

Terhadap keseluruhan proses sosialisasi seorang individu, agama memberikan bentuk pada keseluruhan proses sosialisasi. Sosialisasi nampak jelas kelihatan dalam upacara-upacara keagamaan saat momen kelahiran, masa remaja, perkawinan serta pada waktu urgen lain yang merupakan bagian dari hidup manusia. Nilai-nilai keagamaan memiliki hubungan erat dengan pengaturan pribadi, yang diwariskan secara langsung kepada orang yang beranjak dewasa oleh keluarga dan masyarakat. Dengan tidak adanya variasi model-model kepribadian yang bisa menyainginya, terutama model-model duniawi (sekuler), agama memegang peranan penting dalam mempersatukan pengikutnya dan dalam tingkah laku dan

kepribadian anggota-anggota dari jenis masyarakat ini (Nottingham, 1994:52-53).

2. Masyarakat Setelah Zaman Industri yang Sementara Mengalami Perkembangan

Tipe masyarakat ini dalam kehidupannya tidak terlalu terisolasi, perubahannya agak cepat, daerahnya lebih luas dan jumlah penduduknya lebih besar, dan dalam hal tingkat perkembangan teknologinya lebih maju dibandingkan tipe masyarakat pertama. Secara umum masyarakat ini memiliki ciri: punya kemampuan baca tulis sampai tingkat tertentu, kelas-kelas sosial yang beraneka raga, dan pembagian kerja yang luas (Nottingham, 1994:52-53).

Dalam tipe masyarakat ini agama sebagai sebuah organisasi walaupun ia merupakan organisasi formal yang terpisah dan berbeda, serta mempunyai tenaga profesional sendiri, tetapi memberi ciri pada masyarakat ini dan sekaligus menghimpun seluruh anggota kelompoknya (Nottingham, 1994:52-53)

Kendati agama dalam tipe masyarakat ini memberikan ikatan dan arti terhadap sistem nilai, tetapi juga pada waktu yang sama lingkungan yang sekuler dan lingkungan yang sakral masih bisa dilihat perbedaannya (Nottingham, 1994:52).

3. Masyarakat Industri dan Sekuler

Tipe masyarakat ketiga ini memiliki sub-sub tipe di dalam kelompoknya. Tipe masyarakat ini sangat dinamik. Pengaruh teknologi sangat kental mempengaruhi seluruh segi kehidupan, pada umumnya merupakan bentuk penyesuaian kepada alam fisik, tetapi hal yang penting juga adalah adanya penyesuaian dalam hubungan kemanusiaan mereka. Agama dipengaruhi oleh efek perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat (Nottingham, 1994:52-53).

Toleransi terhadap perbedaan agama, yang merupakan ciri dari masyarakat jenis ini, antara lain merupakan akibat dari ketidakacuhan dalam menghadapi pengaruh sistem nilai sekuler yang semakin berkembang; organisasi-organisasi keagamaan itu sendiri tidak luput dari pengaruh sekularisasi ini (Nottingham, 1994:61)

H. Konsep Akulturasi

Istilah akulturasi berasal dari bahasa Latin “acculturate” yang berarti “tumbuh dan berkembang bersama”. Secara umum, pengertian akulturasi (acculturation) adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut.

Menurut Koentjaraningrat (2002:247-248), di antara para sarjana antropologi kata *acculturation* atau *culture contact* atau akulturasi mempunyai berbagai arti, namun ada kesepahaman bersama bahwa akulturasi berkaitan proses sosial yang ditimbulkan ketika suatu kelompok manusia dengan sebuah kebudayaan tertentu berhadapan dengan kebudayaan asing beserta unsur-unsurnya yang secara perlahan-lahan dioleh dan diterima menjadi kebudayaannya dengan tidak membawa akibat kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri.

I. Konsep Budaya

Menurut Geertz (1977) budaya adalah: *“an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life”*. Dari definisi ini Geertz menjelaskan bahwa budaya adalah “Pola transmisi historis dari arti yang termasuk dalam simbol-simbol, atau sebuah sistem konsepsi yang disajikan dan diwariskan di dalam cara manusia berkomunikasi, yaitu dalam bentuk simbol-simbol, mengembangkan dan melestarikan pengetahuan yang mereka miliki dan bagaimana mereka menyikapi kehidupannya.” Berdasarkan definisinya tentang budaya, Geertz mau menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz melihat budaya sebagai “lengkung simbolis” atau “*blueprint*” yang dengannya seseorang bisa menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Sutrisno & Putranto, 2005:212).

Menurut Kluckhohn dalam Geertz (1975:4-5) budaya dapat diartikan sebagai berikut:

(1) "the total way of life of people of a people"; (2) "the social legacy the individual acquires from his group"; (3) "a way of thinking, feeling, and believing"; (4) "an abstraction from behavior"; (5) a theory on the part of the anthropologist about the way in which a group of people in fact behave; (6) a "store-house of pooled learning"; (7) "a set of standardized orientations to recurrent problem"; (8) "learned behavior"; (9) a mechanism for the normative regulation of behavior; (10) "a set of techniques for adjusting both the external environment and to other men"; (11) "a precipitate of history"

Dari pengertian di atas, maka secara garis besar menurut Kluckhohn budaya meliputi: (a). Total cara hidup manusia, (b). Warisan sosial dari individu yang diperoleh dari kelompoknya, (c). Sebuah cara berpikir, perasaan, dan kepercayaan, (d). Sebuah abstraksi dari tingkah laku, (e). Sebuah teori dalam ilmu antropologi tentang bagaimana cara sekelompok orang dalam kelompok bertingkah laku sebuah gabungan dari apa yang dipelajari, (f). Segenap pedoman dasar untuk menyelesaikan masalah, (g). Tingkah laku yang dipelajari, (h). Sebuah mekanisme peraturan yang baku tentang tingkah laku, (i). Segenap teknik untuk menyesuaikan diri ke lingkungan luar dan ke orang lain, (j). Sebuah penerapan dari sejarah dan berbalik, mungkin dalam keputusan, sebagai kiasan, seperti peta, seperti sebuah saringan, dan seperti susunan angka-angka.

Selanjutnya ada enam unsur pokok budaya menurut Kroeber dan Kluckhohn sebagaimana dikutip oleh Sutrisno & Putranto (2005:8-9).

1. *Definisi deskriptif*: budaya di sini dipandang sebagai sebuah totalitas komprehensif dimana keseluruhan hidup sosial disusun dan menunjuk sejumlah bidang kajian dimana budaya terbentuk.
2. *Definisi historis*: di sini budaya merupakan warisan yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi.
3. *Definisi psikologis*: budaya memiliki peran sebagai alat yang membantu menyelesaikan masalah yang membuat orang belajar, berkomunikasi atau menyahakan kebutuhan hidup emosional dan materialnya.

4. *Definisi struktural*: melihat kenyataan tentang budaya sebagai sebuah abstraksi berbeda dari perilaku nyata dan ingin menunjukkan pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya.
5. *Definisi genetis*: melihat asal-usul budaya dan bagaimana budaya bisa tetap bertahan dan eksis. Dalam pengertian ini budaya dilihat sebagai hasil interaksi antar manusia serta eksis karena proses pewarisan secara turun temurun ke setiap generasi.

Dari berberapa pengertian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa budaya memiliki cakupan yang luas. Budaya berisi seluruh bidang kehidupan manusia. Budaya lahir di suatu masyarakat tertentu dan menjadi abstraksi dari perilaku kongkrit masyarakat tersebut.

Sementara itu menurut Koentjaraningrat (2002:181), bahasa Sansekerta *buddhayah*, bentuk jamak kata *buddhi* (akal atau budi) merupakan asal usul kata budaya atau kebudayaan. Di sini budaya berarti hal-hal yang berkaitan dengan “akal” atau “budi”. Dengan demikian budaya memiliki arti: “hal-hal yang memiliki kaitan dengan akal.” Kata bahasa Latin *Colere* (mengolah atau mengerjakan) kemudian diturunkan ke dalam bahasa Inggris *culture* atau budaya. Diartikan sebagai kegiatan berkebun atau mengolah tanah. Oleh karena itu, kata *culture* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “budaya”.

Kemudian Edward B. Tylor (1871) sebagaimana dikutip oleh Munch & Smelser (1992:39) bahwa budaya adalah: “*that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits aquired by man as a member of society*”. Budaya atau peradaban merupakan sebuah totalitas kompleks dari kepercayaan, seni, pengetahuan, hokum, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh manusia dalam hakekatnya sebagai bagian dari suatu masyarakat.

Selanjutnya Fallon, O’Keeffe, & Sugai, (2012:9) mengartikan budaya sebagai berikut:

“Culture is the extent to which a group of individuals engage in overt and verbal behavior reflecting shared behavioral learning histories, serving to differentiate the group from other groups, and predicting how individuals within the group act in specific setting conditions. That is, “culture” reflects a collection of common verbal and overt behaviors that are learned and maintained by a set of similar social and environmental contingences (i.e., learning history), and are occasioned (or not) by actions and objects (i.e., stimuli) that define a given setting or context.”

Budaya berkaitan erat dengan kelompok individu, terutama tingkahlaku verbal yang dipelajari secara turun temurun. Bagaimana kelompok tertentu membedakan dirinya dengan kelompok lain dan bagaimana individu itu bertindak dalam situasi yang spesifik. Artinya, “budaya” mencerminkan perkataan dan perilaku-perilaku umum yang dipelajari dari konteks dan lingkungan budaya tertentu secara terus-menerus baik yang disebabkan oleh tindakan atau objek (stimulus) yang didefinisikan sebagai konteks tertentu.

Sementara itu dalam naskah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Tahun 2010 budaya memiliki arti: “....totalitas sistem keyakinan (*belief*), nilai, norma, moral, sistem berpikir, nilai, moral, dan norma yang dimiliki oleh manusia yang merupakan hasil dari masyarakat. Kesemuanya dihasilkan dari proses interaksi manusia baik dengan sesama dan lingkungan alam dimana dia berada. Sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya semuanya dihasilkan oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan merupakan hasil dari manusia sebagai makhluk sosial sekaligus juga mereka mengatur interaksi manusia dengan sesama manusia dan alam kehidupan. Sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni berkembang ketika kehidupan manusia terus berkembang.

Berkaitan dengan pengertian di atas, Soemardjan dan Soemardi (Soekanto, 2012:151) mengartikan budaya atau kebudayaan merupakan seluruh hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Kebudayaan, teknologi, kebudayaan jasmaniah (*material culture*) dan kebendaan merupakan hasil karya masyarakat dan semuanya itu dibutuhkan manusia dalam menaklukkan alam semesta dan menguasainya dimana hasil dan kekuatannya semua digunakan bagi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka secara singkat kebudayaan merupakan totalitas hasil karya dan tindakan manusia, sistem gagasan yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan melalui proses belajar dijadikan milik diri manusia. Secara singkat bisa disimpulkan bawa budaya atau kebudayaan berkaitan erat dengan seluruh kegiatan manusia di dalam kehidupannya yang kongkrit.

Menurut Koentjaraningrat (1974:11) pengertian-pengertian tentang budaya itu begitu luas karena dianggap menyangkut totalitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk kepentingan untuk menganalisis terminologi budaya atau kebudayaan, maka budaya atau kebudayaan bisa dikategorikan ke dalam beberapa unsur. Masih menurut Koentjaraningrat (2002:203-204), unsur-unsur kebudayaan (*cultural universals*) adalah sebagai berikut:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

Selanjutnya berkaitan dengan wujud kebudayaan, J. J. Honingman (1959:11-12) sebagaimana dikutip oleh Koentjaraningrat, (1990:186) menyebutkan bahwa wujud kebudayaan adalah sebagai berikut: (a) *ideas*, (b) *activities*, dan (*artifacts*). Sementara itu wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Lebih jauh lagi, menurut Soelaeman (2010:42-43) sebagaimana dikutip dari Kluckhohn menyebutkan lima masalah pokok kehidupan manusia dalam sistem sosial budaya:

1. *Hakikat hidup manusia (MH)*. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup (nirvana = meniup habis), ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik, “mengisi budaya”.
2. *Hakikat karya manusia (MK)*. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
3. *Hakikat waktu manusia (MW)*. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda-beda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
4. *Hakikat alam manusia (MA)*. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksplorasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
5. *Hakikat hubungan manusia (MM)*. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang berpandangan individualistis (menilai tinggi kekuatan sendiri).

Dari pengertian-pengertian tentang budaya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks berkaitan dengan kehidupan manusia. Budaya dekat dengan kehidupan manusia dan budaya adalah hasil karya manusia itu sendiri.

J. Konsep Kearifan Lokal / *Local Wisdom*

Secara etimologis *local wisdom* (kearifan lokal) diturunkan dari kata *wisdom* (kearifan) dan *local* (lokal). *Local* artinya setempat, lokal,

sementara itu *wisdom* diartikan sebagai kebijaksanaan atau kearifan. Dari pengertian di atas, kearifan lokal atau *local wisdom* bisa diartikan sebagai nilai-nilai, gagasan, nilai, budaya lokal atau setempat yang sifatnya bernilai baik, penuh kearifan, bijaksana, tertanam serta dijadikan pedoman bagi seluruh anggota suatu masyarakat (Syamsiar, 2010).

Disiplin ilmu antropologi lebih mengenal *local genius* untuk menyebut istilah *local wisdom* atau kearifan lokal. Quaritch Wales adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah *local genius*. Istilah *local genius* dalam konteks Indonesia telah dibahas panjang lebar oleh para antropolog, di antaranya Haryati Soebadio. Menurutnya *local genius* juga merupakan juga *cultural identity* atau suatu kepribadian atau identitas budaya suatu bangsa. *Local Genius* membuat suatu bangsa bisa mengolah dan menyerap budaya asing yang disesuaikan dengan kemampuan dan watak pribadinya (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Menurut Moendardjito sebagaimana dikutip oleh Ayatrohaedi (1986:40-41) *local genius* merupakan unsur budaya potensial dimana kemampuannya telah teruji dan terus bertahan sampai saat ini. Adapun ciri-ciri kearifan lokal adalah:

1. Memiliki kemampuan dalam bertahan terhadap pengaruh budaya asing.
2. Punya kemampuan menampung unsur-unsur budaya dari luar.
3. Punya kemampuan menggabungkan kedalam budaya asli unsur-unsur budaya luar.
4. Memiliki kekuatan sebagai pengendali.
5. Pemberi arah terhadap kemajuan kebudayaan.

Local Genius atau Kearifan lokal merupakan semua modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal dalam suatu daerah tertentu dan merupakan wujud kekhasan dan ciri keaslian daerah itu dengan tidak ada campur tangan dan pengaruh daerah lain. Umumnya *local genius* atau kearifan lokal bisa dibedakan kedalam dua bagian, yaitu: (1). *Tangible* atau kearifan lokal yang bisa kelihatan dengan panca indera/mata, contohnya warisan budaya bersejarah, kegiatan-kegiatan keagamaan dan objek-objek budaya, (2). *Intangible* adalah kearifan lokal yang tidak bisa dilihat oleh panca indra, misalnya

kegiatan budaya, makna atau nilai dari suatu objek yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat.

Di sisi lain menurut Purba (2002) sebagaimana dikutip oleh Marfai (2012:33) mengartikan *wisdom* atau kearifan merupakan sebuah pemberian arti secara kolektif, kebijaksanaan dan pengetahuan yang ada pengaruhnya terhadap penanggulangan masalah dalam kehidupan dan mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian. Jadi intinya kearifan di sini adalah pengejawantahan kesimpulan pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok masyarakat yang mengalami proses perkembangan, diaman komunitas atau kelompok masyarakat ini melalui interaksi yang lama terhimpun sebagai akibat dari proses dan pengalaman panjang dan di dalamnya ada sebuah sistem bahkan ada ikatan hubungan yang bersifat mutualisme

Sejalan dengan pendapat di atas, Gobyah (2003) mengartikan *local genius* atau kearifan lokal sebagai suatu yang diakui benar atapun merupakan kebenaran yang telah ajeg dan mentradisi dari sebuah wilayah atau daerah. Perpaduan antara berbagai nilai yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai suci firman Tuhan diartikan sebagai kearifan lokal. Di sini *local genius* berkembang sebagai sebuah keunggulan budaya masyarakat lokal dan juga dalam arti luar kondisi geografis suatu masyarakat. Sebagai sebuah produk kebudayaan sejak zaman dulu, kearifan lokal pantas terus menerus dijadikan sebagai pegangan hidup. Nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dianggap sangat umum/universal kendati bernilai lokal. Caroline Nyamai-Kisia sebagaimana dikutip oleh (Gobyah, 2003), mendefinisikan kearifan lokal sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan asal dari pengetahuan yang secara dinamis dihayati oleh suatu masyarakat, diteruskan dan dikembangkan oleh suatu masyarakat tertentu dan menyatu dengan bagaimana mereka memahami tentang budaya dan lam di sekitar mereka.

Menurut Andi dan Syarifuddin (2007) dalam Marfai (2012:34), kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai, sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya secara arif.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kearifan lokal merupakan dasar atau patokan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan pada tingkat daerah dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan pengolahan sumber daya alam. Kearifan budaya lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang sudah lama ada dalam masyarakat dan terintegrasi dengan norma, budaya dan sistem kepercayaan serta termanifestasi dalam mitos dan tradisi yang dalam waktu yang relatif lama telah dianut bahkan bertahan dari terpaan budaya asing.

Fungsi kearifan lokal menurut Sartini (2006) dalam (Marfai, 2012) adalah:

1. Sebagai sarana pelestarian dan konversi sumber daya alam.
2. Sebagai saran untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Sebagai saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
4. Sebagai pangsang, kepercayaan, kepercayaan dan sastra.
5. Memiliki arti sosial, contohnya dalam ritual integrasi kerabat/komunal.
6. Memiliki makna sosial, contohnya dalam ritual daur hasil tani.
7. Memiliki arti moral dan etika.
8. Memiliki arti politis, contohnya dalam ritual *ngangkuk merana* serta *patron client* kekuasaan.

Berdasarkan beberapa pengertian dan fungsi kearifan lokal yang telah disebutkan di atas, maka kearifan lokal adalah kebudayaan masyarakat setempat yang telah bertahan dalam kehidupan kongkrit masyarakat dan dijadikan patokan dalam bertindak dan berperilaku. Kearifan lokal telah menjadi nilai-nilai budaya yang menjadi perekat sekaligus menjadi jati diri masyarakat di mana mereka berada.

K. Konsep Modal Sosial

Menurut Putnam (2007) definisi modal sosial adalah: “*features of social organisation, such as trust, norms, and networks, than can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.*” Modal sosial merupakan semua ciri dalam sebuah organisasi masyarakat, contohnya norma, kepercayaan, serta jejaring dimana efisiensi

masyarakat dalam mana aksi-aksinya yang terkoordinasikan bisa bisa diperbaiki. Selanjutnya (Putnam, 2007) mengartikan bahwa modal sosial merupakan sebuah organisasi dari asosiasi-asosiasi yang sifatnya horisontal yang ada di antara oknum-oknum yang memiliki pengaruhnya bagi produktivitas masyarakat lokal dimana mereka berada. Termasuk di sini adalah *civic engagement* atau jaringan pertalian warga masyarakat bahkan norma-norma sosial yang diakui oleh suatu masyarakat. Pemikiran dasar dari teori Putnam, yaitu: (1) secara empiris norma-norma dan jejaring saling terkait; serta (2) konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang penting dari norma-norma dan. Kesimpulannya kunci konsep modal sosial Putnam adalah bahwa modal sosial berfungsi memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk keuntungan timbal balik atau secara bersama dari anggota sebuah asosiasi (Haridison, 2013).

Pierre Bourdieu and Wacquant (1992) dalam Haridison (2013), mendefinisikan modal sosial sebagai:

“Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition. Acknowledging that capital can take a variety of forms is indispensable to explain the structure and dynamics of differentiated societies”.

Modal sosial dalam hal ini berkaitan dengan adanya berbagai sumber daya yang maya dan aktual yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompoknya akibat dari adanya jejaring yang telah bertahan dalam waktu yang lama dalam hal ini bisa berupa pengakuan yang sedikit sediki terlembagakan dan akibat hubungan timbal balik dari perkenalan (Field, 2010:23).

Selanjutnya Coleman (2000), mendefinisikan modal sosial sebagai:

“Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors - whether persons or corporate actors - within that structure. Like other forms of capital, social capital is productive,

making possible the achievement of certain ends that in its absence would not be possible."

Dari pengertian di atas, maka menurut Coleman modal sosial dapat ditinjau menurut fungsinya yang merupakan penggabungan berbagai entitas yang berbeda-beda dan tidak hanya merupakan entitas tunggal yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) merupakan penggabungan dari beberapa aspek struktur sosial, serta (2) tindakan-tindakan individu yang difasilitasi oleh unsur-unsur dari struktur tersebut. Di sini modal sosial memiliki sifat produktif, dimana dimungkinkan adanya upaya untuk mencapai beberapa tujuan yang membutuhkan kehadirannya. Contoh misalnya, modal manusia dan modal fisi, di sini modal dapat ditukar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi ia juga tidak sepenuhnya dapat ditukar. Dalam hal ini tidak semua modal sosial yang memiliki nilai guna bagi seorang individu bisa berguna bagi orang lain. Berbeda dengan modal lain, di sini modal sosial erat kaitannya dengan bagaimana struktur relasi interpersonal atau dengan kelompoknya dibentuk (Haridison, 2013).

Selanjutnya, Fukuyama (1995) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah (2004) mendeskripsikan modal sosial berkaitan dengan bagaimana seorang individu dalam aktivitasnya dan dalam interaksinya dengan orang lain dapat menyesuaikan diri, terutama dalam mencapai tujuan bersama suatu organisasi atau komunitas. Dewasa ini istilah modal manusia sering dipergunakan oleh para ekonom karena istilah modal bukan hanya berkaitan dengan peralatan, mesin, tanah, melainkan juga manusia sebagai insan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Di sini keterampilan penting yang dimiliki manusia atau modal sosialnya adalah bagaimana ia mampu beraktivitas dalam interaksi dan relasinya dengan orang lain. Oleh karena itu proses pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil jika tidak ada amanah, kejujuran, penghargaan dan kepercayaan. Jadi di sini konsep Fukuyama tentang modal sosial terarah pada aspek yang lebih luas dimana hal yang menyebabkan suatu masyarakat bersatu atau bersekutu dalam mencapai tujuan bersama didasarkan atas kebersamaan, serta dalam prosesnya

mereka terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang mereka patuhi dan telah tumbuh dalam waktu yang lama.

Selanjutnya Portes (1998) dalam Hasbullah (2004) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan individu dalam memberikan jaminan yang bermanfaat yang berpatokan pada keanggotaannya dalam struktur-struktur sosial dan jejaring sosial lainnya. Sedangkan Woolcock (1998) dalam Hasbullah (2004) mengartikan modal sosial berkaitan dengan seberapa besar derajat kohesi sosial dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan *social trust*, dan memperlancar kerjasama dan koordinasi yang sifatnya saling memberikan keuntungan.

Modal sosial menurut Lang & Hornburg (1998) merujuk pada *stocks of social trust* atau ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat, jejaring serta norma-norma yang bisa digunakan oleh suatu masyarakat dalam menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi bersama. Semantara itu Fukuyama (1995) memberikan konsepsi bahwa merupakan sebuah norma yang tidak formal dimana ia mendorong terjadinya kerjasama yang bersifat mutualisme (saling menguntungkan satu sama lain).

Selanjutnya Suharto (2016), mengertikan modal sosial merupakan sebuah *resource* atau sumber yang dihasilkan oleh adanya komunikasi dan interaksi di antara individu-individu yang merupakan anggota sebuah komunitas atau masyarakat. Kendati begitu, dalam kenyataannya pengukuran terhadap interaksi jarang dilibatkan dalam pengukuran modal sosial. Di sini terpeliharanya dan terciptanya atau kepercayaan antar warga suatu masyarakat merupakan hasil dari interaksi mereka setiap hari. Suatu interaksi bisa berlangsung dalam konteks individual ataupun lembaga (institusional). Dalam konteks individual, terjadinya sebuah interaksi yang melahirkan ikatan emosional sebagai akibat dari relasi intim antara individu yang ada di dalamnya. Dalam konteks kelembagaan (institusional), interaksi bisa muncul manakala tujuan dan visi sebuah organisasi mempunyai persamaan dengan tujuan dan visi kelompok atau organisasi lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang modal sosial di atas, Hasbullah (2004:8-9) mengatakan bahwa masing-masing ahli yang mempopulerkan istilah modal sosial ada perbedaan penekanan mengenai unsur-unsur yang membentuknya. Bahkan dalam hal pendekatan analisis pun ada perbedaan di antara para tokoh tersebut. Kendati demikian, dari semua perbedaan yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep modal sosial pada intinya menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan, mencapai tujuan dan selalu melakukan penyesuaian dan perubahan secara berkesinambungan. Masyarakat dalam konteks ini selalu terikat dengan norma dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak, bertingkahtlaku serta berhubungan dengan pihak lain terutama dalam upaya mereka untuk melakukan perubahan dan untuk mencapai tujuan bersama. Sikap saling memperhatikan, sikap yang partisipatif, saling memberi dan menerima saling mempercayai serta diperkuat oleh norma dan nilai-nilai yang mendukungnya merupakan roh modal sosial. Keinginan kelompok atau masyarakat untuk secara terus menerus proaktif dalam upaya membentuk jaringan-jaringan kerjasama, mempertahankan nilai maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru merupakan unsur lain yang memegang peran penting dalam pembentukan modal sosial.

Dari pandangan beberapa ahli tentang konsepsi modal sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan: (1) kumpulan sumberdaya potensial dan aktual; (2) entitas-entitas memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut dan entitasnya terdiri-dari atas beberapa aspek dari struktur sosial, dan; (3) horizontal merupakan sifat dari asosiasi tersebut; (3) keterampilan dalam menjamin manfaat dari para aktor; (4) norma-norma; (5) informasi; (6) resiprositas; (7) nilai-nilai; (8) kerjasama; (9) jejaring (Haridison, 2013).

Selanjutnya unsur pokok modal sosial menurut (Hasbullah, 2004:9-16) adalah:

1. Partisipasi Dalam Suatu Jaringan

Modal Sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam

suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun Modal Sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial (Hasbullah, 2004).

Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok (Hasbullah, 2004).

Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisioal atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan ada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memberi kohesifitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangunan sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok yang disebut terakhir akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi baik kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas (Hasbullah, 2004).

2. **Reciprocity**

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang

dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika. Dalam konsep Islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu. Pada masyarakat, dan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. Ini akan juga terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian, kemiskinan akan lebih memungkinkan, dan kemungkinan lebih mudah, diatasi. Begitu juga berbagai problema sosial lainnya akan dapat diminimalkan. Keuntungan lain, masyarakat tersebut akan lebih mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial dan fisik mereka secara mengagumkan (Hasbullah, 2004).

Walaupun demikian, pada suatu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat resiprositas yang kuat belum tentu dapat memiliki dampak positif yang cukup besar bagi kelompok lainnya. Ini akan tergantung pada sifat-sifat dan orientasi nilai yang berkembang di masyarakat tersebut. Untuk tipologi masyarakat yang relatif tertutup, resiprositas yang kuat akan bernilai positif untuk lingkungan sosial setempat, tetapi belum tentu menghasilkan nilai positif bagi kelompok yang lain. Sebaliknya pada suatu kelompok yang memiliki resiprositas kuat dan juga mempunyai ciri sebagai masyarakat yang terbuka, kemungkinan dampak positif yang lebih luas akan dapat direalisasikan (Hasbullah, 2004).

3. Trust

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakni bahwa yang lain akan

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 2007). Dalam teori Fukuyama (1995), *trust* merupakan suatu keadaan di mana ada saling mempercayai di antara anggota-anggota dalam suatu masyarakat dimana dengan *trust* tersebut mereka membentuk suatu kesatuan dengan yang lain serta memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan modal sosial (Hasbullah, 2004).

Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas tenggelam dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Jika rasa saling mempercayai telah luntur maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Kriminalitas akan meningkat, tindakan destruktif dan anarkis gampang mencuat, kekerasan dan kerusuhan massa akan cepat tersulut dan masyarakat tersebut cenderung pasif, sendiri-sendiri dan pada akhirnya muncul perasaan keterisolasian diri. Pada situasi yang disebut terakhir ini, masyarakat akan gampang terserang berbagai penyakit kejiwaan seperti kecemasan, putus asa dan kemungkinan melahirkan tindakan-tindakan yang fatal baik bagi dirinya, masyarakat atau negara (Hasbullah, 2004).

Francois (2003) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah (2004) memandang *trust* sebagai komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan membentuk kekayaan Modal Sosial. Sedangkan (Fukuyama, 1995) meyakini

bahwa dimensi *trust* merupakan warna dari suatu sistem kesejahteraan bangsa. Kemampuan berkompetisi akan tercipta dan dikondisikan oleh satu karakteristik yang tumbuh di masyarakat yaitu *trust*.

Qianhong Fu (2004) dalam Hasbullah (2004) yang merujuk ke beberapa pendapat para sosiolog, membagi tiga tingkatan *trust* yaitu pada tingkatan individual, tingkatan relasi sosial dan pada tingkatan sistem sosial. Pada tingkatan individual *trust* merupakan kekayaan individu, merupakan variabel personal dan sekaligus sebagai karakteristik individu. Pada tingkatan hubungan sosial, *trust* merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi sosial. Sedangkan pada tingkatan sistem sosial *trust* merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada.

Trust akan kehilangan daya optimalnya ketika mengabaikan salah satu spektrum penting yang ada di dalamnya, yaitu rentang rasa mempercayai (*the radius of trust*). Pada kelompok, asosiasi atau bentuk bentuk group lainnya yang berorientasi *inward looking* cenderung memiliki *the radius of trust* sempit. Kelompok ini kemungkinan akan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengembangkan modal sosial yang kuat dan menguntungkan (Hasbullah, 2004).

4. Norma Sosial

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial (Hasbullah, 2004)

Aturan aturan kolektif ini misalnya, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain, norma untuk hidup sehat, norma untuk tidak mencurangi orang lain, norma untuk selalu bersama-sama dan sejenisnya, merupakan contoh-contoh norma sosial. Jika di dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau group, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri. Itulah alasan rasional mengapa norma merupakan salah satu unsur modal sosial yang akan merangsang berlangsungnya kohesifitas sosial yang hidup dan kuat (Hasbullah, 2004).

Norma, seperti juga halnya nilai, senantiasa memiliki implikasi yang ambivalen. Sebagai contoh, norma *formality* yang kuat sekali dianut di tengah masyarakat Melayu dapat menciptakan suasana yang khidmat dalam hubungan sosial antar anggota kelompok atau sesama anggota masyarakat. Tetapi di sisi lain, norma ini cenderung tidak merangsang munculnya ide-ide baru, karena semua bentuk hubungan lebih mengutamakan kulit luar yaitu suatu label ketimbang pada dimensi substansi isinya. Misalnya seorang perangkat desa akan dipandang sebagai penguasa dan secara formal lebih menonjolkan label penguasanya bukan pada muatan tanggung jawab pemerintahan dan sosial yang disandang oleh seorang pemimpin desa. Konfigurasi norma yang tumbuh di tengah masyarakat juga akan menentukan apakah norma tersebut akan memperkuat kerekatan hubungan antar individu dan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat tersebut (Hasbullah, 2004).

5. Nilai-Nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh-contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam kehidupan masyarakat. Nilai senantiasa memiliki kandungan konsekuensi yang ambivalen. Nilai harmoni misalnya, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial yang tercipta, tetapi di sisi lain dipercaya pula untuk

senantiasa menghasilkan suatu kenyataan yang menghalangi kompetisi dan produktifitas (Hasbullah, 2004).

Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai harmoni biasanya akan senantiasa ditandai oleh suatu suasana yang rukun, indah, namun, terutama dalam kaitannya dengan diskusi pemecahan masalah misalnya, tidak produktif. Modal sosial yang kuat juga sangat ditentukan oleh konfigurasi nilai yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Jika suatu kelompok memberi bobot tinggi pada nilai-nilai kompetisi, pencapaian, keterusterangan dan kejujuran maka kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari keterusterangan, kompetisi dan pencapaian (Hasbullah, 2004).

Nilai senantiasa berperan penting dalam kehidupan manusia. Pada setiap kebudayaan, biasanya terdapat nilai-nilai tertentu yang mendominasi ide yang berkembang. Dominasi ide tertentu dalam masyarakat akan membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertindak masyarakatnya (*the rules of conducts*) dan aturan-aturan bertingkah laku (*the rules of behavior*) yang secara bersama sama, menurut istilah para sosiolog, membentuk pola-pola kultural (*cultural pattern*) (Hasbullah, 2004).

6. Tindakan yang Proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dari *premise* ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja dari sisi material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial, dan menguntungkan kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan-bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif (Hasbullah, 2004).

Perilaku proaktif yang memiliki kandungan modal sosial dapat dilihat melalui tindakan-tindakan dari yang paling sederhana sampai

yang berdimensi dalam dan luas. Suatu masyarakat yang terbiasa proaktif untuk memungut sampah yang berserakan di ruang-ruang publik, membersihkan lingkungan tempat tinggal, melakukan inisiatif untuk menjaga keamanan bersama, merupakan bentuk tindakan yang di dalamnya terkandung semangat keaktifan dan keperdulian. Begitu pula dengan inisiatif untuk mengunjungi keluarga, teman, mencari informasi yang dapat memperkaya ide, pengetahuan dan beragam bentuk inisiatif individu yang kemudian menjadi inisiatif kelompok, merupakan wujud proaktif yang bernuansa modal sosial (Hasbullah, 2004).

L. Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Utara

Berdasarkan pengertian budaya yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, maka dalam konteks ini nilai budaya bisa diartikan sebagai sesuatu yang secara turun-temurun dianggap berharga oleh suatu masyarakat dan dijadikan patokan atau pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut (Koentjaraningrat, 1990) sebagaimana dikutip oleh Budimansyah, D., & Suryadi, (2008:63) mengatakan bahwa manusia dalam kehidupannya agar menjadi produktif harus diajarkan dengan berbagai keterampilan dalam upayanya]menguasai jenis-jenis keterampilan dan keahlian berkaitan dengan ilmu dan teknologi serta berbagai sikap dan nilai dan sikap yang menjadi patokannya dalam berperilaku, dan juga yang menjadi pendorong semangatnya dalam berkarya. Banyak nilai yang mempengaruhi perilaku manusia berasal dari *cultural value system* atau sistem nilai budaya yang bisa diartikan sebagai: "*tingkatan paling abstrak dari kebiasaan hidup dan adat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat.*" Di sini sistem nilai budaya bisa dipilah ke dalam beberapa konsepsi yang diyakini dan dihati oleh hampir semua anggota suatu masyarakat, terutama dalam hubungan dengan beberapa hal yang dianggap bernilai dan sangat bermakna dalam kehidupan mereka.

Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara merupakan nilai-nilai budaya Sulawesi Utara yang paling dominan. Berikut ini penjelasan masing-masing budaya tersebut:

1. *Si Tou Timou Tumou Tou: Manusia Hidup Untuk Memanusiakan Orang Lain*

a. Ruang Lingkup *Si Tou Timou Timou Tou*

Si Tou Timou Tumou Tou adalah nilai budaya Sulawesi Utara yang pertama. *Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan ungkapan filosofis orang Minahasa terutama sejak Kekristenan masuk ke Tanah Minahasa, kemudian secara intelektual diangkat kembali oleh Sam Ratulangi.

Secara etimologis ungkapan ini menurut Ir. A. O. D. Pangaila sebagaimana dikutip oleh Sondakh (2002:17-19) dapat dijelaskan sebagai berikut:

→ *Si* adalah “penunjuk orang”, *Tou* adalah “manusia.” Kedua kata ini berarti:

- (1) “manusia sebagai makhluk hidup, manusia insani, manusia kodrat”
- (2) “manusia yang mampu berdiri sendiri secara dewasa dan bertanggung jawab.

→ *Timou: Tou* = “manusia” + infiks - im - :

- (1) “dilahirkan hidup”,
- (2) “hidup, hidup sebagai manusia”
- (3) “hidup sebagai manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri”

→ *Tumou: Tou* + infiks - um - :

- (1) “mendorong, memberi semangat hidup, mendewasakan kehidupan sesama manusia”
- (2) “ikut bertanggung jawab atas kehidupan sesama manusia”
- (3) “tidak hidup semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga memperhatikan sesama manusia”
- (4) “turut membentuk kehidupan sesama manusia.”

Berdasarkan arti etimologis di atas, maka bisa disimpulkan *Si Tou Timou Tumou Tou* mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Manusia dilahirkan dan hidup sebagai manusia,
- b. Manusia yang hidup, adalah hidup secara dewasa, bertanggung jawab dan mandiri,
- c. Manusia dewasa, bertanggung jawab dan mandiri ditandai oleh “pengabdianannya” untuk “membentuk dan melahirkan”

manusia-manusia baru yang dewasa (melalui proses pendidikan), bertanggung jawab dan mandiri kelak di kemudian hari, untuk selanjutnya manusia baru yang telah terbentuk itu melanjutkan lagi tugas pengabdianya dalam rangka “memanusiakan” manusia sesamanya (Sondakh, 2002)

Konsep *Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara dan secara khusus orang Minahasa yang diwariskan secara turun temurun. Dalam konsep ini terkandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan yang bisa berfungsi sebagai pendorong, pengendali kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun untuk pengembangan dirinya. Oleh karena itu menurut Tilaar (1998:11) ungkapan *Si Tou Timou Tumou Tou* ini merupakan konsep yang unggul. Keunggulan konsep ini oleh Tilaar diuraikan secara ringkas sebagai berikut: *Pertama*, konsep tersebut lahir dari budaya Minahasa yang menunjukkan sifat dinamika. Hidup itu bukan statis. Manusia itu menjadi. Manusia itu suatu proses yang menjadi sesuatu. *Si tou Minahasa* harus menjadi “Si Tou Minahasa.” Antara “si tou” dengan “Tou” ada perbedaan eksistensial. *Kedua*, konsep tersebut mengandung kadar *elan vital* manusia Minahasa. Budaya dan masyarakat Minahasa mempunyai dorongan hidup yang kuat karena tidak mengenal sekat-sekat sosial pembatas seperti dalam struktur sosial feodalisme. *Keempat*, konsep tersebut mengandung arti bahwa hidup manusia itu bukan hanya sekedar hidup tetapi mengarah kepada sesuatu: Suatu konsep teleologis. *Kelima*, konsep yang dinamis dan futuristik-teleologis tersebut mempunyai arah yang mendunia, artinya realistik. “Si tou timou” bukan hanya sekedar hidup, ia tumbuh atau “tumou” menjadi “tou” atau seorang yang kongkrit realistik. *Keenam*, konsep tersebut mengacu kepada suatu konsep manusia seutuhnya, atau suatu konsep integralistik mengenai manusia. *Ketujuh*, konsep “*Si Tou Timou Tumou Tou*”, disamping merupakan konsep yang integralistik, juga tidak melebur nilai individual dalam kebersamaan yang anonim. *Kedelapan*, konsep ini mengimplikasikan bahwa dalam proses untuk menjadi Manusia Minahasa, adalah merupakan suatu proses me-Minahasa dalam

budaya minahasa. Proses me-Minahasa tidak terjadi dalam ruang kosong tetapi dalam ruang lingkup budaya Minahasa.

2. Taksonomi Nilai Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*

Berikut ini adalah taksonomi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (1998:14-17):

a. Dimensi

Konsep *Si Tou Timou Tumou Tou* mengandung 4 dimensi. Dimensi *si tou* (St) menunjukkan bahwa manusia Minahasa / Sulawesi Utara itu ada. Namun keberadaannya itu sekedar menyatakan bahwa dia ada, sekurang-kurangnya dalam peta dan statistik, juga dalam sejarah. Dimensi kedua ialah *si tou timou* (St2) yang menunjukkan bahwa adanya manusia Minahasa itu bukan sekedar berada di suatu tempat, ia juga bertumbuh. Dimensi ketiga ialah *si tou timou tumou* (St3) menunjukkan bahwa pertumbuhan seorang Minahasa / Sulawesi Utara itu bukan sekedar hanya bertumbuh, berkembang, dan kemudian mati, tetapi pertumbuhan itu mempunyai arah atau tujuan, atau adanya suatu "eschaton". Yang terakhir ialah dimensi *si tou timou tumou Tou* (St3T). perhatikan bahwa *Tou* yang berakhir ditulis dalam huruf besar karena menunjukkan perbedaan esensial dengan *tou* sebagai adanya. Inilah wujud atau citra manusia Minahasa / Sulawesi Utara.

b. Proses

Di dalam dimensi perkembangan citra manusia Minahasa / Sulawesi Utara tampak dengan jelas adanya suatu proses. Dari seseorang yang potensial menuju kepada seseorang Minahasa / Sulawesi Utara yang mendukung suatu citra tertentu. Setiap dimensi mengandung arah dalam proses perwujudannya. Dalam *si tou* (St) yang penting adalah keberadaan manusia Minahasa / Sulawesi Utara, sekurang-kurangnya dalam peta atau statistik, sedangkan dalam *si tou timou* (St2) diasumsikan bahwa proses bertumbuh itu terjadi dalam lingkungan tertentu ialah lingkungan budaya Minahasa / Sulawesi Utara. Pada dimensi *si tou timou Tumou* (St3) arah pertumbuhan itu semakin meluas horizonnya yaitu mendudukkan proses tersebut dalam usaha menjadikan manusia Minahasa /

Sulawesi Utara sebagai anggota dalam masyarakat Indonesia. Dan akhirnya dimensi *si tou timou tumou Tou* (St3T) mengandung proses ke arah manusia Minahasa / Sulawesi Utara yang Pancasila. Perlu kiranya berkesinambungan atau lebih tepat bersifat siklikal dan konsentris, artinya proses itu akan berulang-ulang dan semakin mendalam namun tetap berpusat pada manusia Minahasa / Sulawesi Utara itu atau *si tou* (St).

c. Eshatologi

Setiap dimensi dan proses menjadi manusia Minahasa / Sulawesi Utara ada serangkaian nilai yang sekiranya dominan. Dalam *si tou* (St), nilai-nilai budaya Minahasa / Sulawesi Utara yang positif seperti ingin maju, berdiri sendiri, ingin tahu, kesamaan citra manusia, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip penentu. Pada *si tou timou* (St2) antara lain nilai persaingan yang sehat, dan dalam *si tou timou* (St3) nilai kerjasama atau *Mapalus* dapat menjadi nilai yang dominan, sedangkan dalam *si tou timou tumou Tou* (St3T) nilai integralistik menjadi pedoman. Termasuk dalam nilai integralistik ini nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Minahasa / Sulawesi Utara.

d. Wawasan

Baik dalam proses maupun dalam sistem nilai, proses memanusia itu terikat dengan wawasan, mulai dari wawasan lokal sampai ke wawasan nasional bahkan universal. Wawasan lokal dari proses itu tentunya dimulai dalam wawasan Minahasa / Sulawesi Utara yang semakin meluas ke arah budaya Nusantara. Yang penting dalam hal ini ialah adanya lingkungan budaya yang terpelihara dan berkembag. Oleh sebab wawasan pertama proses *si tou* (St) itu adalah lingkungan keluarga, maka budaya Minahasa / Sulawesi Utara itu pun perlu dihidupkan dan dihidupi di dalam keluarga.

e. Lingkungan Budaya

Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses memanusia terjadi dalam suatu kondisi interaksi dengan sesama manusia yang

berbudaya. Betapa bahayanya seseorang yang dibesarkan dalam suatu lingkungan tanpa budaya. Budaya adalah wadah dimana seseorang dapat menemukan jati dirinya atau identitasnya. Seseorang yang tercabut dari kebudayaannya sulit untuk dapat menentukan arah hidupnya atau mengembangkan kepribadiannya secara penuh.

f. Kualitas Manusia

Akhirnya, hasil akhir dari proses memanusia ini ialah manusia Minahasa / Sulawesi Utara yang berkualitas tertentu, yang telah memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya Minahasa / Sulawesi Utara dengan dimensi nasional. Pada akhirnya pengembangan manusia Minahasa / Sulawesi Utara atau *si tou Minahasa / Sulawesi Utara* adalah manusia Indonesia seutuhnya yang dapat menyumbangkan nilai-nilai yang terbaik orang Minahasa / Sulawesi Utara bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

3. *Mapalus* (Gotong-royong)

Budaya dominan masyarakat Sulawesi Utara berikutnya adalah, budaya *Mapalus*. *Mapalus* dalam arti yang sederhana berarti bentuk kerjasama atau gotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Istilah *Mapalus* itu sendiri merupakan gabungan dari kata *ma* (saling) dan *palus* (tuang, tumpah). Jadi secara etimologis *Mapalus* berarti saling menumpah atau saling menuang. Konsep “*Si Tou Timou Tumou Tou*” dalam kenyataan hidup insan Minahasa / Sulawesi Utara, sejak semula telah tumbuh dan berkembang dalam wujud ethos kerja *Mapalus* atau *Maendo* (Bahasa Tountemboan). Dalam konteks ini *Mapalus* bisa dipandang merupakan suatu bentuk aktualisasi terkongkrit mengani arti terdalam dari “*Si tou timou tumou tou.*” Nilai budaya *Mapalus* dalam prakteknya secara jelas dapat dilihat dari empat asas aktualisasinya, yaitu musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keagamaan dan kerjasama), serta lima aspek dalam pengornisian prinsip hidup *Mapalus*, yaitu: keterbukaan, tolong menolong, kebersamaan, disiplin kelompok, dan hasil guan-daya guna. Nilai dasar yang merupakan esensi dalam *Mapalus*, bisa

menjadi benteng yang efektif dalam membendung proses modernisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi beserta peluang terjadinya proses *the humanisasi* yang diakibatkan oleh proses industrialisasi. (<http://happycristian.blogspot.com/2012/03/makna-di-balik-ungkapan-sitou-timou.html>).

Mapalus merupakan budaya Minahasa / Sulawesi Utara yang berkaitan dengan sebuah teknik atau sistem kerjasama untuk kepentingan bersama. Menurut Turang (1997) *Mapalus* merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualisasi hakekat manusia sebagai makhluk kerja bersama, berke-Tuhan-an, dan taat pada kaedah sistem nilai masyarakat. *Mapalus* pada hakekatnya merupakan sebuah bentuk gotong royong atau kerjasama tradisional dan tidak sama dengan perkumpulan atau asosiasi yang merupakan bentuk kerjasama atau gotong royong modern. *Mapalus* bukan sekedar suatu “kerjasama” (*cooperation*) yang bekerjasama untuk suatu kepentingan belaka, melainkan suatu keutuhan hidup “kerja bersama” (*working togetherness*) dalam bidang ekonomi, budaya, organisasi dan manajemen kerja bersama, masyarakat, keagamaan, pertahanan dan keamanan. Di dalam *Mapalus* terkandung arti dan makna yang secara filosofis sangat mengakar. *Mapalus* atau *Local Wisdom and Local Spirit* suku Minahasa / Sulawesi Utara berkohehi dan terpatri di dalamnya tiga bentuk prinsip dasar hidup manusia di tengah masyarakat atau kelompok di mana dia hidup yang meliputi; *Teaching Mind, Transforming Life and Touching Hearts*. *Mapalus* merupakan bentuk aktivitas dalam kehidupan masyarakat Minahasa / Sulawesi Utara serta bagian dari aktivitas hidup orang Minahasa / Sulawesi Utara. *Touching hearts* dimana manusia memiliki panggilan dasar melalui hatinya yang tulus dari lubuk hati yang paling dasar dan dalam (*touching hearts*) untuk dengan tanggung jawaba dan penuh kesadaran membuat orang lain manusia dan masyarakatnya (*teaching mind*) di dalam jiwa dan semgant untuk saling mensejahterakan dan menghidupkan sesamanya, anggota kelompoknya di dalam suatu komunitas (*transforming life*). *Mapalus* yang pada hakekanya merupakan suatu sistem kerja di dalamnya terkandung: etos partisipatif, etos resiprokal, responsibilitas, solidaritas, *good leadership*,

gotong royong, transparansi, disiplin, *trust* dan kesetaraan (Umbas, 2011).

Dewasa ini, *Mapalus* banyak dipakai menjadi asas suatu organisasi kemasyarakatan di Minahasa sebagai akibat dari semakin berkembangnya fungsi-fungsi organisasi sosial dengan mempertahankan asas *Mapalus*. *Mapalus* dalam konteks ini didasarkan pada asas keagamaan, kekeluargaan, dan kesatuan dan persatuan. *Mapalus* sebagai sebuah asa organisasi bisa dibedakan menjadi:

- *Mapalus* nelayan
- *Mapalus* tani
- *Mapalus* bantuan duka dan perkawinan
- *Mapalus* kelompok masyarakat dan
- *Mapalus* uang.

Menurut Senduk (2000), dalam penerapannya, *Mapalus* memiliki fungsi untuk menangkal krisis ekonomi yang dialami dunia, sekaligus menjadi alat dalam memobilisasi dan memotivasi manusia dalam penguatan pembangunan, serta merupakan alat dalam membina jiwa dan semangat kerja yang produktif dalam kesuksesan operasi mandiri, sebagai contoh dalam program ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian. Prinsip ekonomi *Tamber* merupakan sebuah prinsip solidaritas yang merupakan pencerminan dari budaya *Mapalus* dimana ia teraktualisasikan ke dalam perekonomian masyarakat Minahasa. Prinsip ekonomi *Tamber* merujuk pada suatu kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, atau warga sewanua (sekampung) secara sukarela dan cuma-cuma, tanpa menghitung-hitung atau mengharapkan balas jasa. Di sini prinsip ekonomi *Tamber* memiliki asas dasar kekeluargaan. Dalam konteks adat, prinsip ekonomi *Tamber* ini di dalamnya terkandung makna sebagai cagar budaya atau perekat kultural dimana terkandung makna keakraban sosial dan juga merupakan ungkapan kepedulian sosial.

Menurut Umbas (2011) dalam Pangalila (2013), *Mapalus* berdasarkan sifat, struktur dan cirinya merupakan suatu sistem nilai yang didalamnya terdapat *interrelation* atau keterikatan atau menyatunya tiap-tiap nilai, yaitu antara tanggungjawab, resiprokal,

kesetaraan, disiplin, solidaritas, partisipatif, pluralisme, kasih dan keadilan sosial. *Mapalus* merupakan perwujudan budaya Minahasa / Sulawesi Utara. Merupakan juga sistem sosial dan sistem etika yang pada zaman dahulu tujuannya utamanya adalah sebagai sebuah media atau sarana untuk masyarakat Minahasa di dalam usaha produksi, namun karena usaha produksi adalah bagian dari sebuah produksi sosial, maka *Mapalus* pada intinya telah mengalami perkembangan dan termasuk di dalamnya seluruh aspek ekonomi, yang mencakup proses produksi, distribusi bahkan konsumsi. Dalam lingkup proses produksi, prinsip dan asas *Mapalus* diyakini mengandung nilai-nilai universal yang bisa dipromosikan ke tingkat yang lebih luas dan lebih umum.

Menurut Inkiriwang (1993:2-3) dalam Turang (1997), makna yang terkandung dalam *Mapalus* adalah sebagai berikut:

- *Ma* (saling): menggambarkan pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara timbal balik atau berbalasan. Ini berarti bahwa terdapat sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lainnya untuk maksud tertentu.
- *Palus* (tuang, tumpah): mengandung makna dari yang berisi ke yang kosong; yang ada mengisi pada yang kosong. Adapun ukuran berapa besar atau banyaknya tidak dapat ditakar karena dilaksanakan dengan tidak segan-segan atau spontan secara sukarela.

Kesimpulannya bahwa kata *Mapalus* itu tidak lain ialah bentuk kerja sama tolong-menolong yang timbul secara spontan atau sukarela di antara sejumlah orang tertentu. Kerjasama tolong-menolong tersebut walalupun secara sukarela akan tetapi mengandung prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*).

Menurut Turang (1997:5-6), *Mapalus* merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai suatu aktualisasi hakekat manusia sebagai makhluk kerja bersama, berke-Tuhan-an dan taat pada kaedah sistem nilai masyarakat. Oleh karenanya, tempo dulu *Mapalus* sangat dihormati oleh masyarakat Minahasa. *Mapalus* bukan suatu “kerjasama” (*cooperation*) yang bekerjasama untuk suatu kepentingan belaka, melainkan suatu keutuhan hidup “kerja bersama” (*working togetherness*) dalam bidang

ekonomi, budaya, organisasi dan manajemen kerja bersama, masyarakat, keagamaan, pertahanan dan keamanan. Ada 5 (lima) azas *Mapalus*, yaitu:

- (1) Azas religious
- (2) Azas kekeluargaan
- (3) Azas musyawarah dan mufakat
- (4) Azas kerja bersama
- (5) Azas persatuan dan kesatuan.

Dewasa ini konsep *Mapalus* bagi masyarakat Sulawesi Utara, secara khusus Minahasa telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini *Mapalus* telah mengakar menjadi nilai budaya masyarakat yang nampak jelas dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara kongkrit budaya *Mapalus* dapat dilihat lewat kegiatan-kegiatan bersama masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Sebagai contoh: kegiatan saling menjaga tempat ibadah ketika perayaan-perayaan besar agama.

Menurut Umbas (2011) dalam Pangalila (2013), nilai budaya *Mapalus* mengandung beberapa nilai kehidupan yang penting, yaitu: *Pertama*, nilai-nilai yang memerdekakan (*to deliberate*). Prinsip utama dari kegiatan *Mapalus* agar anggota atau siapapun yang terlibat akan dibebaskan dari beban-beban manusiawi yang kadang-kadang tidak dapat dipikul sendiri. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dari belenggu keterbatasan individu, karena itu *Mapalus* lebih mengedepankan kolektivisme. Sehingga kemerdekaan adalah kerelaan memberikan diri untuk kepentingan bersama di mana individu di dalamnya terbebas dari belenggu keterbatasannya. *Kedua*, nilai-nilai yang mensejahterakan (*to welfare*), adalah harapan dan cita-cita untuk dicapai demi kesejahteraan bersama. Tidak ada dalam kamus *Mapalus* yang berharap agar terjadi kemelaratan. *Ketiga*, nilai-nilai yang memanusiaikan (*to humanity*) di atas dari semua itu, *Mapalus* memiliki cita-cita luhur agar masyarakat secara luar mampu menjadikan manusia sebagai makhluk yang patut ditempatkan secara bermartabat. Karena itulah gagasan *Si Tou Timou Tumou Tou* menjadi sumber inspirasi bagi pelaksanaan *Mapalus*.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, maka *Mapalus* sebagai nilai budaya lokal masyarakat Sulawesi Utara

menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan sesama manusianya. Lewat *Mapalus* manusia menemukan kepenuhan eksistensinya sebagai manusia dalam relasinya dengan orang lain (Pangalila, 2013).

4. *Torang Samua Basudara*

Torang Samua Basudara merupakan semboyan yang dicetuskan oleh tokoh nasional asal Sulut E. E. Mangindaan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Semboyan *Torang Samua Basudara* sudah tumbuh dan berkembang sejak lama menjadi nilai dan budaya dominan bagi masyarakat Sulawesi Utara. *Torang Samua Basudara* sebagai sebuah semboyan telah diimplementasikan dan dihayati dalam kehidupan kongkrit masyarakat Nyiur Melambai/Sulawesi Utara. Bahkan semboyan ini telah diakui secara luas sebagai suatu kearifan lokal yang kuat dan kokoh bahkan menjadi penangkal terhadap macam-macam ancaman konflik, utamanya ketika di Indonesia pada rentang tahun 1998-2000 terjadi konflik sosial. *Torang Samua Basudara* telah menjadi slogan yang sangat populer di Bumi Nyiur Melambai / Sulawesi Utara. Slogan ini bukan hanya slogan kosong, tetapi telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Sulawesi Utara. Ini terbukti dari kondusifnya keamanan, kerukunan, dan harmoni masyarakat Sulawesi Utara. Prinsip *Torang Samua Basudara* menjadi identitas masyarakat Sulawesi Utara yang secara perlahan telah menjadi perhatian secara nasional dan internasional (Pangalila, 2013).

Prinsip *Torang Samua Basudara* mengedepankan supremasi toleransi yang merupakan fondasi paling mendasar untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Masyarakat Sulawesi Utara merupakan masyarakat multi dimensi yang terbentuk dari berbagai kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai corak, dan sifat yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan, pergaulan dan pengalamannya. Aneka pengalaman, pendidikan, budaya membentuk karakter setiap orang. Adalah tidak mungkin memaksakan selera kita kepada orang lain. Yang mungkin adalah setiap pribadi menyesuaikan diri dengan orang lain (Pangalila, 2013).

Nilai budaya *Torang Samua Basudara* secara jelas menjadi alat pemersatu dan penjaga kerukunan hidup masyarakat Sulawesi Utara. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama, ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

Secara mendalam nilai budaya *Torang Samua Basudara* mengandung dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai *Torang Samua Basudara* sebagai *the way of life* (cara dan pandangan hidup).
2. Menjunjung tinggi rasa toleransi.
3. Rasa hormat kepada orang tanpa memandang ras, agama dan keyakinan
4. Siap membantu sesama tanpa memandang latar belakang.
5. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mengedepankan demokrasi
(<http://sirwayans.wordpress.com/2012/05/23/torang-samua-basudara/>).

Dari berbagai pengertian dan dimensi nilai budaya *Torang Samua Basudara* di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara dalam kehidupan setiap hari tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, bahasa sebagai halangan untuk berelasi dengan orang lain. Masyarakat dari latar belakang apa pun dianggap saudara yang harus dihargai hakikatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan (Pangalila, 2013).

M. Multikulturalisme

Istilah multikulturalisme berakar dari kata *culture* atau budaya/kebudayaan. Dari segi etimologinya, multikulturalisme berasal dari kata *multi* artinya banyak, dan *cultural* artinya budaya, isme yang artinya aliran/paham. Dari asal kata multikultural bisa diartikan sebagai paham yang mengakui adanya keragaman budaya dalam suatu bangsa atau dalam arti tertentu ada pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Mahfud, 2009:75).

Menurut Azra (2007) multikulturalisme merupakan pemahaman manusia tentang dunia yang kemudian diaplikasi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan, dimana ada penerimaan terhadap kenyataan adanya keragaman budaya, agama, suku, dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme bisa juga dilihat sebagai pemahaman tentang dunia yang pada akhirnya termanifestasi dalam kesadaran politik. Sejalan dengan pendapat ini Mahfud (2009:75) mengatakan bahwa dalam konsep multikulturalisme masing-masing individu merasa dihormati dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat. Penolakan oleh suatu kelompok terhadap adanya kebutuhan terhadap pengakuan (*politic of recognition*) adalah akar setiap ketimpangan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan manusia. Menurut Kymlicka (2002), masyarakat modern sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diditerimanya perbedaan kebudayaan mereka. Hal itu sering disebut sebagai dari 'multikulturalisme'. Namun istilah 'multikulturalisem mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri.

Dalam konteks filsafat, multikulturalisme berkembang melalui pemikiran-pemikiran dua filsuf kontemporer, yaitu John Rawls dan Charles Taylor (Tilaar, 2007:75). Secara filsafati, multikulturalisme merupakan bentuk yang paling berat dari postmodernisme. Postmodernisme sering dipandang sebagai akses bagi terjadinya benturan peradaban. Karena benturan peradaban itu, maka postmodernisme sering dianggap "membunuh rasio". Oleh karena itu, maka kenyataan dan kewajiban yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah multikulturalisme. Dengan multikulturalisme, postmodernisme punya kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (*the right of cultural diversity*). Dengan menjalankan kewajiban ini, maka postmodernisme yang sangat menggarisbawahi sekat-sekat yang ditimbulkan oleh *incommensurability* pun sama sekali tidak menganjurkan "benturan kebudayaan". Sebaliknya yang dianjurkan ialah "toleransi" dalam bentuk norma *non-cruently* antar manusia dan

dengan demikian juga menjadi norma bagi perbedaan-perbedaan budaya (Ohoitumur, 2002).

Singkat kata, dalam konteks filsafati multikulturalisme merupakan produk dari postmodernisme. Sebagai produk dari postmodernisme, multikulturalisme menganggap bahwa *ethnosentrisme*, *xenosentrisme* maupun *xenophobia* bukan tutur kata dan sikap yang relevan bagi postmodernisme. Yang relevan bagi postmodernisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki “hak hidup” yang wajib dihormati (Ohoitumur, 2002).

Parekh (1997) sebagaimana dikutip (Azra, 2007) mengatkaan bahwa ada lima jenis multikulturalisme:

1. Multikulturalisme isolasionis, jenis yang pertama ini merujuk pada kelompok masyarakat di mana masyarakat berbeda budaya secara otonom menjalani kehidupan mereka dan menjalin interaksi dalam suasana yang terbatas.
2. Multikulturalisme akomodatif, dalam jenis ini, masyarakat dengan budaya yang dominan menyesuaikan serta membuat akomodasi terhadap kebutuhan golongan atau kelompok minoritas. Dalam masyarakat ini segala aspek kehidupan dan peraturan diarahkan pada pemberian kebebasan terhadap kaum minoritas. Selanjutnya kaum minoritas menghormati dan menyesuaikan diri dengan budaya dominan di mana mereka tinggal.
3. Multikulturalisme otonomis, masyarakat dalam kategori ini hidup dalam pluralism sehingga masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada berupaya untuk mewujudkan adanya *equality* atau kesetaraan dengan kebudayaan yang dominan serta memiliki keinginan untuk dapat hidup secara otonom dan terlibat dalam proses politik. Unsur pokok dalam multikulturalisme jenis ini adalah upaya untuk memiliki kesederajatan antara buday mayoritas dan budaya minoritas.
4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu

terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

N. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan salah satu ide penting yang dilontarkan oleh Max Weber. Baginya, tidak semua tindakan sosial harus diteliti dan layak dijadikan objek kajian sosiologi. Sebab, hanya tindakan sosial bermakna (*meaningful action*) yang dianggap penting oleh Weber. Tindakan sosial yang penuh makna melewati serangkaian proses berpikir dan dilakukan secara sadar, bukan sekadar respons dari stimulus (Arisandi, 2015). Dengan demikian tindakan sosial setidaknya dapat dibagi dua. *Pertama*, tindakan sosial yang bermakna. *Kedua*, tindakan spontan dan reaktif. Namun demikian, tindakan yang kedua tidak lagi disebut sebagai tindakan sosial karena hanya sekadar reaksi atau respons dari stimulus (Arisandi, 2015:66).

Dalam konteks teori tindakan sosial Weber juga menyebutkan bahwa *verstehen* merupakan metode yang ia kembangkan. Hal ini disebabkan karena menurutnya sosiolog bahkan pula manusia, memberikan apresiasi terhadap lingkungan sosialnya, memahami tindakan mereka karena memperhatikan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat yang bersangkutan (Jones dkk., 2016:117).

Selanjutnya menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Wirawan, (2014:79) menekankan pada peran seorang individu manusia sebagai seorang aktor kreatif di masyarakat merupakan aktor dan dalam hal ini realitas sosial tidak merupakan suatu hal yang statis karena keterpaksaan karena fakta sosial. Di sini berarti bahwa setiap tindakan manusia bukan semuanya ditentukan oleh

nilai, kebiasaan dan norma dan hal lainnya yang termasuk dalam cakupan fakta sosial. Kendati akhirnya Weber mengamini bahwa dalam suatu masyarakat ada pranata sosial serta struktur sosial. Di sini pranata sosial serta struktur sosial adalah dua konsep saling terkait dan merupakan faktor pembentuk suatu tindakan sosial.

Menurut Weber sebagaimana dikutip oleh Jones, dkk., (2016:116), tindakan sosial merupakan faktor pembentuk dunia seperti yang ada saat ini. Tindakan manusia menurut Weber dilakukan karena ia telah memutuskan untuk melakukannya serta demi mencapai tujuan yang ia hendaki. Manusia memilih tindakan karena ia telah memilih sasaran dan memperhitungkan keadaannya secara matang. Hasil dari tindakan manusia adalah struktur sosial; sementara itu cara hidup merupakan hasil produk dan pilihan termotivasi. Keadaan sosial yang dihasilkan karena tindakan tersebut menjadi hambatan sebagai kekuatan struktural, tetapi bagaimana pun tindakan sejatinya tetap mental – yang dipilih dalam konteks persepsi pelaku dari hambatan struktural itu. Artinya, menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan merupakan bukti pemahaman manusia tentang realitas sosial yang dihasilkan oleh tindakannya.

Selanjutnya, Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat bagian:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zweck Rational*)

Tindakan sosial ini merupakan suatu tindakan yang dibuat seseorang dengan didasarkan pada pilihan sadar yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tujuan tindakan serta adanya sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tindakan tersebut. Misalnya, seorang siswa terlambat sampai di sekolah akibat tidak adanya sarana transportasi. Ia pada akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah sepeda motor supaya tidak terlambat dapat tiba lebih awal di sekolah. Tindakan yang ia lakukan ini telah melalui proses pertimbangan yang matang demi mencapai tujuan tertentu. Singkatnya orang yang beransukutan telah menentukan nilai dan tujuan yang hendak ia capai atau bahkan juga tindakan tersebut menjadi sebuah sarana dalam mencapai tujuan yang lain.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Jenis tindakan kedua ini mempunyai sifat dimana sarana-sarana yang ada pada intinya hanya sekedar untuk perhitungan sadara dan sebagai bahan pertimbangan. Di sini lain, tujuan yang hendak dicapai telah ada dalam hubungan dengan nilai individual yang memiliki sifat mutlak. Misalnya tindakan rasional nilai adalah perilaku seseorang yang memberi tempat duduk kepada penumpang yang sudah lanjut usia. Dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial dalam konteks ini sudah melalui proses pertimbangan sehingga pelaku lebih mendahulukan nilai agama dan nilai-nilai sosial yang dihayatinya.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual dan perencanaan secara sadar merupakan tipe dari tindakan sosial afektif ini. Jenis tindakan ini bersifat tidak rasional, spontan, dan merupakan bentuk ekspresi emosional seorang individu. Contoh tindakan afektif misalnya kemesraan yang ditunjukkan oleh dua anak remaja yang dimabuk asmara atau jatuh cinta. Rangsangan dari luar yang bersifat otomatis merupakan penyebab tindakan ini. Tindakan afektif ini paling sedikit mendapat perhatian dari konsep sosiologi Max Weber.

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan tradisional pelaku menunjukkan perilakunya berdasarkan kebiasaan yang diturunkan dari para leluhur mereka. Perilaku ini tidak diiringi refleksi secara sadar atau perencanaan. Tindakan pulang ke kampung halaman (mudik) sewaktu lebaran adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan jenis tindakan ini (Arisandi, 2015:66; Ritzer, 2011:126).

Berdasarkan teori tindakan sosialnya, Weber kemudian menyuraikan lima ciri pokok bidang penelitian dalam sosiologi:

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.

3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (Ritzer, 2011:132).

Dari pengertian-pengertian tentang tindakan sosial di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa tindakan sosial dalam konsep Max Weber merupakan tindakan seseorang dimana dalam bertindak ia telah mempertimbangkan arti dan makna subjektifnya bagi dirinya bahkan pengaruhnya terhadap tindakan orang lain. Tindakan yang terarah pada benda mati bukan merupakan tindakan sosial. Sebuah tindakan sosial terjadi ketika tindakan tersebut betul-betul diarahkan dan memiliki pengaruh bagi individu lain atau orang lain.

O. Teori Fenomenologi

Istilah fenomenologi pertama kali dipopulerkan pada tahun 1764 oleh J. H. Lambert yang merujuk *Teori Penampakan*. Teori penampakan, logika, semiotika dan teori kebenaran, merupakan empat disiplin filosofisnya. Sejak dipopulerkan oleh Lambert fenomenologi terus berkembang dan mulai dipakai dalam beberapa terminologi terkait (Bagus, 2000:234). Dari segi etimologi, kata fenomenologi diturunkan dari kata "*phenomenon*" (realitas yang tampak) dan "*logos*" (ilmu). Secara terminologi, fenomenologi merupakan sebuah ilmu yang berorientasi pada perolehan penjelasan mengenai realitas sebagaimana adanya atau yang kelihatan (Soekanto, 2012:68).

Menurut Bagus (2000:234), fenomenologi dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara luas fenomenologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang apa saja yang tampak atau fenomena-fenomena. Fenomenologi dalam konteks ini adalah suatu pendekatan dalam filsafat yang pusatnya adalah pada analisis mengenai kejadian-kejadian atau realitas yang memenuhi aspek kesadaran

manusia. Secara sempit, fenomenologi merupakan ilmu mengenai segala fenomena yang tampak dalam kesadaran manusia.

Segala fenomena yang tampak merupakan hasil renungan terhadap realitas yang mempunyai makna yang membutuhkan tafsiran lebih lanjut dan tidak berdiri sendiri. Untuk bisa mengetahui hakekat atau makna paling dalam dari dari setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari, fenomenologi menerobos fenomena-fenomena yang ada. (Edmund Husserl, Alfred Schütz dan Peter L. Berger adalah tokoh-tokoh pencetus teori-teori fenomenologi).

Fenomenologi sebuah sebuah teori memiliki arti sebagai berikut: (a) pengalaman fenomenologikal atau pengalaman subyektif; (b) bidang kajian mengenai aspek kesadaran manusia sebagai seorang pribadi. Fenomenologi sebagai suatu teori banyak dipakai untuk menunjukkan aspek pengalaman subjektif dari beberapa tiap atau jenis subjek yang tampak. Secara khusus fenomenologi memfokuskan kajiannya pada pada kajian terdisiplin mengenai kesadaran ditinjau dari perspektif pertama seorang individu. Sebagai sesuatu disiplin ilmu, hal ini dikemukakan oleh Edmund Husserl (1859-1938) seorang filsuf Jerman, dan karena pengaruhnya diikuti oleh Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre dan Maurice Merleau-Ponty (Ngarawula, 2012:56).

Menurut Bertens (2006:3-4), fenomenologi menjadi rigorus (ketat), bila yang dipermasalahkan adalah status itu sendiri dari penampakan benda-benda (dalam arti luas). Singkatnya, fenomenologi menjadi rigorus, bila diajukan pertanyaan: apakah artinya “menampakkkan diri” untuk suatu benda, suatu makhluk hidup, seorang persona, suatu pengalaman sadar, suatu perasaan, suatu gambaran fantasi, dan sebagainya? Bagaimana “wilayah-wilayah” realitas (benda, binatang, manusia, dan sebagainya) berhubungan dengan proses-proses kesadaran (mengamati, memfantasikan, membentuk abstraksi, membentuk putusan, dan sebagainya? Dalam arti rigorus ini masalah ada atau masalah ontologis sengaja disisikan dari fenomenologi, entah untuk sementara atau definitif.

Fenomenologi dalam penerapannya bisa dari bidang filsafat dan dalam bidang metodologi kualitatif sebagai sebuah pendekatan. Fenomenologi mempunyai sejarah yang Panjang dalam konteks kajian sosial, sosiologi, psikologi, serta pekerja sosial. Dalam hal ini, fenomenologi adalah cara berpikir yang berfokus pada fenomena-fenomena atau pengalaman-pengalaman subjektif individu serta interpretasi-interpretasi tentang dunia. Di sini, para fenomenologis berusaha menjelaskan bagaimana dunia nampak atau muncul dihadapan manusia (Ngarawula, 2012:56).

Alfred Schutz yang merupakan murid Husserl merupakan ahli teori sosiologi-fenomenologi yang paling terkenal. Setelah munculnya fascism di Eropa, Husserl yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Di sana ia menekuni kehidupannya sebagai seorang pegawai bank dan juga sebagai seorang guru *part time* atau paruh-waktu. Pemikiran-pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ajaran filsafat pragmatis dan paradigma interaksionisme-simbolik. Bentuk interaksionisme yang lebih tajam dan sistematis adalah cara terbaik untuk mendekati karyanya. Dalam karya awalnya *The Phenomenology of the Social World*, dia memiliki minat untuk menggabungkan kajian fenomenologi dengan sosiologi berdasarkan kritik sosiologi mengenai hasil karya Weber. Dalam pandangannya reduksi fenomenologis dan mengesampingkan aspek pengetahuan kita mengenai dunia, akan menghantar kita pada sebuah *stream of experience* atau “ arus-pengalaman”. Fenomenologis dalam kajian ini bisa diartikan sebagai suatu studi mengenai bagaimana fenomena-fenomen menampakkan diri dalam kesadaran kita, serta bagaimana penampakkannya dalam pengalaman indrawi manusia secara terus-menerus (Bertens, 2006).

Fenomenologi juga meletakkan minatnya pada bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam konteks dunia inderawi yang penuh makna, yang pada awalnya menampakkan wujudnya dalam kesadaran individual secara terpisah kemudian muncul dalam kesadaran kolektif dalam interaksi dalam bingkai kesadaran. Di sini kesadaran dalam bertindak atau *acts* terhadap data inderawi masih mentah kemudian agar bisa menghasilkan makna melalui cara yang sama terhadap dua cara

pandang berbeda tanpa masuk lebih dalam kemudian mengidentifikasinya bahkan menghubungkannya berdasarkan latar belakang melalui suatu proses tertentu (Soekanto, 2012:69).

Fenomenologi yang pada mulanya berkembang dalam studi filsafat, oleh beberapa orang murid Husserl dan ahli-ahli yang lain, seperti Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schutz, Sartre, dan de Beauvoir, digunakan untuk menganalisis pengalaman hidup sehari-hari. Analisis pengalaman hidup sehari-hari berfokus, baik pada aspek-aspek subjektif maupun aspek-aspek intersubjektif. Pengalaman subjektif menunjuk pada persepsi individual tentang pengalaman hidupnya juga, termasuk realitas pengalaman hidup individual lain sebagai bagian dari kehidupannya. Pengalaman intersubjektif menunjuk pada pemahaman resiprokal yang dimiliki masing-masing individu (terjadi dalam pengalaman subjektif masing-masing individu). Penting dicatat di sini bahwa pengalaman subjektif yang diresapi oleh hubungan-hubungan intersubjektif dan realitas-realitas intersubjektif yang diinterpretasikan dalam perspektif unik dari masing-masing kesadaran individual (Bertens, 2006:3-4).

Fenomenologi pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk mengamati dalam suasana yang alami kehidupan real setiap hari. Fenomenologi melihat aspek aktif dari manusia dalam mengartikan pengalamannya kemudian bagaimana mereka memahami lingkungannya dalam konteks pengalaman individualnya dan secara langsung dalam interaksi dengan lingkungan kongkritnya. Penekanan penting dari tradisi fenomenologi ini adalah mengenai bagaimana individu mempersepsi dan menginterpretasikan pengalaman subjektifnya. Berikut ini adalah jenis-jenis tradisi fenomenologi:

1. Fenomena Klasik adalah tradisi fenomenologi yang melihat kebenaran sebagai hasil pengalaman subjektif manusia.
2. Fenomenologi Persepsi adalah tradisi fenomenologi yang melihat kebenaran sebagai hasil dari berbagai pengalaman subjektif manusia.
3. Fenomenologi Hermeneutik adalah tradisi fenomenologi yang memandang kebenaran sebagai hasil dari pengalaman subjektif

dan objektif manusia yang disertai adanya analisis dalam menarik kesimpulannya (Bertens, 2006).

Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Ngarawula (2012:56-67) mengatakan bahwa ada beberapa ciri pokok fenomenologi diantaranya:

1. Fenomenologis sering bertentangan dengan 'naturalisme' atau objektivisme dan positivismisme yang secara ilmiah sudah tumbuh dan berkembang semenjak zaman Renaisans.
2. Fenomenologis cenderung mempertahankan kognisi yang merujuk pada apa yang disebut oleh Husserl. '*Evidenz*' merupakan kesadaran mengenai sesuatu benda itu sendiri yang secara jelas bahkan berbeda dengan yang lain dan tercakup di dalamnya sesuatu dari segi itu.
3. Fenomenologis memiliki pemahaman bahwa suatu benda bukan satu-satunya elemen yang ada di dunia budaya dan alam.

P. Teori Interaksi Sosial

Menurut Gillin dan Gillin (Soekanto, 2012:55), interaksi sosial merupakan bentuk umum proses sosial atau juga bisa disebut sebagai sebuah proses sosial. Syarat utama terjadinya berbagai aktivitas sosial adalah interaksi sosial. Di sisi interaksi sosial merupakan bentuk lain dari proses sosial. Dengan kata lain interaksi sosial pada hakekatnya adalah hubungan antara individu dengan individu yang bersifat dinamis, bahkan juga hubungan antara sekelompok manusia, ataupun hubungan antara orang perorangan dengan kelompok besar manusia di dalam suatu masyarakat. Sementara itu bagi Popenoe sebagaimana dikutip oleh Supardan (2011:140) mengatakan bahwa interaksi sosial merupakan sebuah proses sosial yang di dalamnya terdapat hubungan timbal-balik pribadi lepas pribadi, kelompok, bahkan pula hubungan antara pribadi beserta kelompoknya. Dengan kata lain aktivitas-aktivitas sosial adalah penyebab terjadinya interaksi sosial.

Di antara para ahli sosiologi ada banyak yang setuju jika dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan salah satu syarat penting hadirnya kenyataan sosial dan terjadinya aktivitas sosial.

Menurut Max Weber tindakan-tindakan sosial dan motivasi individu menjadi dasar terjadinya kenyataan sosial (Johnson, 1936 dalam Narwoko & Suyanto, 2014:20). Saat terjadinya interaksi, individu atau kelompok pada intinya sedang belajar atau berusaha tentang bagaimana ia mengerti tindakan sosial seorang individu maupun kelompok lainnya. Tidak adanya saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang mereka lakukan akan menyebabkan sebuah interaksi sosial kacau atau menjadi tanpa makna (Narwoko & Suyanto, 2014:20).

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang interaksi sosial di atas, maka bisa dikatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu sosial dimana di dalamnya terdapat hubungan individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, serta antara satu kelompok dengan kelompoknya. Kehidupan bersama tidak akan tercipta jika tidak ada interaksi sosial.

Menurut (Soekanto, 2012:57), berlangsungnya suatu interaksi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Dalam prakteknya, faktor-faktor ini bisa berjalan sendiri-sendiri atau pun dalam bentuk kesatuan yang utuh.

1. Imitasi

Imitasi pada hakekatnya adalah suatu tindakan atau perilaku manusia yang didasarkan pada apa yang ia lihat atau tiru dari orang lain. Faktor penting yang mempengaruhi proses imitasi adalah tingkat jangkauan indra seorang individu, jadi apa yang ia imitasikan sebatas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan (Kolip & Setiadi, 2011:67). Imitasi memiliki kedudukan yang sentral di dalam suatu proses interaksi. Segi positif dari faktor imitasi ialah seseorang terdorong dalam menaati nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Segi negatifnya, ialah melalui proses imitasi seseorang bisa saja meniru tindakan-tindakan yang menyimpang. Di samping itu juga faktor imitasi bisa membuat orang tidak kreatif dalam kehidupannya (Soekanto, 2012:57).

Faktor imitasi merupakan bagian dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Semenjak dilahirkan di dunia ini, faktor imitasi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Dalam prosesnya

manusia akan mengimitasi dirinya, misalnya dengan menyebutkan secara berulang-ulang kata-kata melalui mulutnya, bahkan juga mengucapkan beberapa lafal tak berarti. Manusia melakukan tindakan ini karena merupakan bagian dari proses belajarnya dalam menghafal kata-kata sesuai nalurinya. Setelah itu ia akan mengimitasi perbuatan dan tindakan orang lain di sekitarnya, misalnya kata-kata yang sering dicupakan oleh orang lain, misalnya orang tua, saudara kandung bahkan kata-kata orang lain. Dalam kehidupannya setiap hari juga ia akan mendengar, melihat, serta merasakan setiap tingkah laku yang dilakukan orang lain di sekitarnya. Kemudian setelah ia mulai melakukan tindakan-tindakan otonomi yang ia lakukan tanpa bantuan pihak lain, seperti berjalan, memahami tindakan orang lain, maka ia akan mulai diperkenalkan dengan cara, atau tatanan yang bisa ia pahami secara terus-menerus. Pada akhirnya saat ia dewasa, ia akan mulai terbiasa dengan tata pergaulan yang semakin luas dan akhirnya ia menjadi manusia yang seutuhnya dan kompleks. Pada fase ini, manusia bukan hanya mempelajari atau meniru tabiat dan kebiasaan orang lain, tetapi juga akan memiliki analitis kritis yang berasal dari akal budinya (Kolip & Setiadi, 2011:67).

2. Sugesti

Faktor selanjutnya adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang menyampaikan sikap atau pandangan yang berasal dari dirinya kemudian oleh pihak lain diterima. Hampir sama dengan proses imitasi yang membedakannya adalah titik-tolakannya. Sugesti berlangsung ketika saat pihak yang menerima sugesti mengalami emosi, kemudian karena emosinya daya berpikir rasionalnya terhambat (Soekanto, 2012:57).

Sementara itu, menurut Kolip & Setiadi (2011:68), sugesti bisa dimengerti sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang didasarkan pada pola-pola yang berasal dari dirinya sendiri, misalnya saat seseorang menyampaikan sikap atau pandangan yang berasal dari dalam dirinya kemudian dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu diterima. Munculnya prasangka-prasangka sosial (*social prejudices*), norma-norma dalam kelompok, norma-norma (susila), dan lain-lain disebabkan oleh faktor sugesti. Kinerja akal

mempengaruhi seseorang dalam proses belajarnya, dimana ia bukan hanya sekedar memindahkan apa yang ia tanggap (respons) dari pihak luar, melainkan juga melalui akal ia kemudian mulai melakukan proses identifikasi serta pertimbangan lebih jauh mengenai hal yang dia tanggap. Dalam konteks ilmu-ilmu sosial, sugesti bisa diartikan sebagai: suatu proses dalam mana seorang individu tanpa kritik terlebih dahulu mengambil atau menerima sebuah cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain.

3. Identifikasi

Proses identifikasi adalah keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya agar bisa menjadi sama atau serupa dengan orang lain. Dalam konteks ini identifikasi memiliki sifat yang jauh lebih dalam dari imitasi. Melalui proses identifikasi ini kepribadian seseorang dapat terbentuk. Dalam kehidupannya seseorang membutuhkan tipe-tipe ideal tertentu, oleh karena itu proses identifikasi bisa terjadi secara tidak sadar (dengan sendirinya) ataupun melalui proses yang disengaja. Kendati proses identifikasi bisa dengan sendirinya, namun identifikasi terjadi melalui sebuah keadaan di mana seseorang yang beridentifikasi sungguh-sungguh akrab dengan pihak lain yang menjadi idealnya, sehingga sikap, pandangan, maupun kaidah-kaidah yang ada pada pihak lain tadi bisa menjiwainya dan melembaga di dalam dirinya. Menjadi jelas di sini bahwa terjadinya proses identifikasi menyebabkan mengakibatkan adanya pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan proses sugesti dan imitasi meskipun juga terdapat kemungkinan lain dimana proses identifikasi bermula dari proses sugesti atau juga imitasi (Soekanto, 2012:57-58).

Proses identifikasi terjadi saat seseorang mulai mengadapi bahwa ada peraturan-peraturan dan norma-norma atau peraturan-peraturan yang harus pelajari, ditaati dan dipenuhi dalam kehidupan ini (Kolip & Setiadi, 2011:70).

4. Simpati

Simpati adalah proses ketika seseorang tertarik terhadap orang lain atau individu lain. Dalam proses simpati faktor perasaan merupakan faktor utama, kendati demikian, keinginan untuk bekerja sama dengan pihak lain dan keinginan untuk memahami pihak lain merupakan faktor pendorong utama terjadinya proses simpati. Hal pendorong inilah yang menjadi pembeda utama antara proses simpati dengan proses identifikasi dimana faktor pendorongnya adalah keinginan untuk belajar dari orang lain yang memiliki kedudukan penting dan dihormati karena memiliki kemampuan-kemampuan atau kelebihan-kelebihan tertentu yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan atau contoh. Faktor saling pengertian merupakan aspek penting dalam berkembangnya proses simpati (Soekanto, 2012:58).

Di sisi lain menurut Kolip & Setiadi (2011:70), simpati merupakan proses dimana seseorang atau sekelompok orang tertarik terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang ataupun tertarik terhadap sekelompok orang lain. Sebagaimana dalam proses identifikasi faktor simpati muncul berdasarkan penilaian perasaan bukan dari pemikiran yang logis rasional. Ketika seseorang tiba-tiba punya perasaan tertarik terhadap orang lain, penyebabnya bukan karena orang tersebut mempunyai keunggulan atau ciri tertentu, melainkan disebabkan karena cara bertingkah laku dan berperilaku orang tersebut secara keseluruhan. Proses simpati berbeda dengan proses identifikasi. Proses simpati disebabkan oleh adanya keinginan untuk mengerti dan ingin menjalin kerja sama dengan pihak lain. Hasil dari proses simpati berupa adanya orang yang tertarik (dorongan simpatisan) dalam membangun hubungan kerja sama antara seseorang atau antara sekelompok orang yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama. Terjadinya proses identifikasi kebanyakan disebabkan oleh adanya keinginan untuk mengikuti jejak seseorang, ingin belajar dan ingin mencontohi perilaku orang lain yang dianggap paling ideal. Secara singkat bisa dikatakan bahwa dalam proses identifikasi ada keinginan untuk menjadi sama seperti orang tertentu dalam hal ini berkaitan dengan karakter yang melekat pada orang tersebut. Sementara itu dalam

proses simpati, seorang individu bisa bertingkah laku atau berpikir seakan-akan orang lain adalah dia (Geruangan, 2004;; Kolip & Setiadi, 2011:70).

Syarat-syarat terjadinya sebuah interaksi sosial menurut Soekanto (2012:58-59) adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kontak Sosial (*Social-Contact*)

Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* (yang artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh). Jadi, artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah.

Kontak sosial bisa terjadi dalam 3 bentuk, yaitu:

b. Antara orang-perorangan

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (*socialization*), yaitu suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.

c. Antara orang-perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.

d. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka.

2. Adanya Komunikasi

Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan

apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut (Soekanto, 2012:60).

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 64), bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu:

1. Asosiatif

Asosiatif terdiri dari: kerjasama (*cooperation*), asimilasi, dan akomodasi (*accomodation*). Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Asimilasi menurut definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing, sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan tunggal untuk hidup bersama. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.

2. Disasosiatif

Disasosiatif terdiri dari: persaingan, penghalang (oposisi), dan konflik. Persaingan, adalah bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai kemajuan. Penghalang (oposisi), berasal dari bahasa Latin *opponere* yang artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan. Oposisi adalah proses sosial dimana seseorang atau sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai tujuannya. Konflik, berasal dari bahasa latin *confligere* yang berarti saling memukul. Konflik berarti suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Q. Perilaku Sosial

Perilaku merupakan suatu aktivitas manusia yang dimulai dengan adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal, yang menyebabkan orang tersebut melaksanakan suatu kegiatan. Semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar (Notoatmodjo, 2005).

Perilaku sosial merupakan kumpulan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh nilai, emosi, adat, sikap, etika, genetika, persuasi dan kekuasaan. Dalam hal ini perilaku seorang dapat dikategorikan dalam perilaku yang bisa diterima, perilaku yang wajar, dan perilaku yang menyimpang, dan perilaku yang aneh. Sosiologi memandang perilaku sebagai suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar tidak ditunjukkan kepada orang lain. Perilaku sosial yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat yang lebih tinggi adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain, oleh karena itu perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial. Artinya penerimaan terhadap perilaku seseorang diatur oleh berbagai kontrol sosial dan diukur relatif terhadap norma sosial (Nawawie, 2009 dalam Sinulingga, 2012:11).

Oleh karena itu, perilaku sosial merupakan keadaan saling ketergantungan antara orang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang dan merupakan suatu keharusan dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Hal ini membuktikan bahwa manusia dalam kehidupan kongkritnya, terutama dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu terikat dan tergantung dengan orang lain bahkan bisa dikatakan juga bahwa untuk bisa melangsungkan hidup manusia harus berada dalam keadaan saling bersama dan saling mendukung dengan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupannya di tengah masyarakat, seseorang dituntut untuk bisa saling menghormati, saling begotong royong dengan orang lain, menghargai hak dan kewajiban orang lain serta memiliki jiwa toleransi terhadap sesama.

R. Teori Etnometodologi

Gaung teori etnometodologi mulai mencuat ke permukaan pada periode 1940 dan 1950-an. Saat itu, Garfinkel (sang pencetus teori etnometodologis) mempergunakan istilah tersebut dalam berbagai kesempatan seperti seminar, perkuliahan, pertemuan *American Sociological Association* (1954) dan berbagai forum ilmiah lainnya. Lambat laun, percikan gagasan Garfinkel tentang teori barunya itu mulai mencuri perhatian para mahasiswanya di kampus-kampus California. Dari sinilah, pemikiran etnometodologi Garfinkel kemudian tersebar luar ke seantero Amerika Serikat dan Eropa khususnya Inggris, Jerman, Italia, dan Perancis, bahkan sampai ke belahan dunia. Persis setelah munculnya *Studies in Ethnomethodology* (1967), gagasan-gagasan Garfinkel mengenai etnometodologi menjelma menjadi satu disiplin dan/atau teori sosial yang semakin mantap (Suyanto & Amal, 2010:185-186).

Secara etimologis kata etnometodologi diturunkan dari kata Yunani, *Etnos* (orang), *Metodos* (metode), dan *Logos* (ilmu). Dari asal usul kata, etnometodologi merupakan ilmu atau studi mengenai metode yang dipakai dalam rangkai terciptanya perasaan keseimbangan atau keteraturan dalam hakekat interaksi mereka dengan orang lain atau masyarakat tertentu. Sementara itu menurut Ritzer (2015:1), istilah *etnometodologi* yang memiliki akar dalam bahasa Yunani, secara harfiah diartian sebagai metode (jalan atau cara) yang sering dipakai orang dalam eksistensi hidup mereka setiap hari. Dengan kata lain, dunia ini dipandang sebagai kegiatan praktis yang berlangsung secara terus-menerus. Orang dipandang rasional, namun mereka menggunakan “penalaran praktis,” dan bukannya logika formal, untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Menurut Heritage (1984) sebagaimana dikutip oleh Ritzer (201:15) mengatakan bahwa etnometodologi adalah sekumpulan pengetahuan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir menggunakan akal sehat serta rangkaian metode, pertimbangan atau prosedur dimana masyarakat biasa bisa memiliki pemahaman tentang sesuatu, bertindak dan mencari tahu sesuai dengan keberadaannya dalam mereka mencari dan menemukan hakekat diri mereka sendiri.

Dalam bukunya tentang *Studies in Ethnomethodology*, Garfinkel (Ngarawula, 2012:56) menjelaskan bahwa etnometodologi lebih

merupakan aktivitas-aktivitas praktis, suasana praktis yang dapat diamati pada kehidupan sehari-hari sesuatu kelompok masyarakat. Garfinkel melalui studi-studi empiriknya menekankan pada keseharian seseorang dan aktivitas-aktivitasnya. Ia menyimpulkan bahwa: (1) perbincangan keseharian secara umum memaparkan sesuatu yang lebih memiliki makna dari pada langsung dengan kata-kata itu sendiri, (2) perbincangan itu merupakan praduga konteks makna yang umum, (3) pemahaman secara umum yang menyertai atau yang dihasilkan dari perbincangan tersebut mengandung suatu proses penafsiran terus-menerus secara intersubjektif dan akhirnya, (4) pertukaran dan kejadian-kejadian keseharian itu memiliki metodologi, terencana dan rasional sehingga dengan kejadian tersebut seseorang akan mendapatkan suatu pengertian atau makna upacapan orang lain melalui pemahaman aturan itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

R. Teori Interaksi Simbolik

Teori ini sangat dipengaruhi oleh posisi intelektual dan tradisi yang ada di Eropa terutama pada abad 19. Tradisi berpikir ini dalam perjalannya berkembang pesat di Amerika secara khusus di Chicago. Teori ini bertumbuh dan dikembangkan oleh George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik ini dalam konteks sosiologi merupakan turunan dari teori tindakan sosial (*action theory*) yang dipopulerkan oleh Max Weber (1864–1920) seorang ahli filsafat dan sekaligus ahli sosiolog. John Dewey dan C. H Cooley adalah tokoh utama yang mempopulerkan teori interaksi simbolik. Dalam teori ini, mereka banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran W. I Thomas dan George Herbert Mead.

Teori interaksi simbolik berkembang pesat ketika Mead menjadi pengajar psikologi sosial pada sekitar tahun 1916-1928 di Chicago. Saat ini situasi dunia sedang berlansung perang besar antara koalisi Jerman dan Austria melawan Inggris, Perancis, Amerika Serikat serta negara-negara sekutu lainnya. Amerika Serikat mengalami depresi ekonomi yang sangat besar setelah selesai Perang Dunia Pertama berakhir. Banyak persoalan sosial terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, diantaranya: banyak kasus perceraian,

tingginya tingkat kriminalitas, pengangguran, prostitusi, dan lain-lain. Akibat persoalan-persoalan sosial tersebut, pada waktu itu di Amerika adan banyaknya orang mengalami depresi dan serta persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Persoalan-persoalan kemasyarakatan tersebut menarik perhatian para ilmuwan sosial pada waktu itu, terutama mereka yang tertarik mengkaji kehidupan masyarakat modern.

Saat itu George Simmel, Cooley, William James, dan John Dewey memproklamirkan teori-teori mereka yang berkaitan dengan teori interaksi simbolik. Permasalahannya berkaitan dengan perspektif tersebut ialah mereka tidak berhasil membuat suatu pemikiran yang sistematis atau sintesa yang baik. George Herbert Mead (1863- 1931) adalah tokoh yang secara sistematis meletakkan dasar bagi teori interaksionisme simbolik. Mead, semasa hidupnya memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran Mazhab Chicago. Mazhab Chicago ini menaruh fokus perhatian mereka terhadap pemahaman mengani interaksi perilaku seorang individu atau pun sekelompok masyarakat.

Menurut Ritzer (2011:53), teori interaksi simbolik dalam tradisi sosiologi merupakan teori yang bersifat mikro dan lahir sebagai reaksi atau penolakan terhadap pandangan atau pemikiran paradigma perilaku sosial dan fakta sosial dengan alasan, yaitu keduanya tidak memiliki pengakuan terhadap makna penting eksistensi individu. Dalam teori interaksi simbolik; *interaksi, individu, dan inteprestasi* adalah tiga aspek penting dalam memahami arti kehidupan sosial seorang individu di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya masih menurut Ritzer (2011:50) interaksi simbolik muncul di saat teori aksi mengalami kebuntuan secara empiris dan teoritis. Dalam konteks perspektif ini juga, Weber memberikan sumbangsi dalam bentuk pendekatan. Parsons yang merupakan murid Weber juga memiliki pengaruh dalam pengembangan teori ini.

Menurut Wirutomo, dkk. (2011:15), teori interaksi simbolik berakar pada tradisi yang dikembangkan Weber yang berpandangan

bahwa walaupun manusia digerakkan oleh kekuatan sosial (*social forces*) dalam bentuk kultur maupun struktur, namun manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberikan makna secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya. Makna itu disebut *subjective meaning* (makna subjektif).

Teori interaksionisme merupakan salah satu perspektif teori dalam sosiologi yang memiliki akar pemikiran yang beragam. Banyak karya pemikir dan filsuf ternama yang mengilhami lahirnya teori ini. Kelahiran teori interaksionisme simbolik sebagai respons terhadap dominasi teori struktural fungsional yang telah mendominasi sosiologi selama lebih dari satu abad. Bagi para teori interaksionisme simbolik, teori struktural fungsional tidak mampu memecahkan persoalan klasik, namun tetap menjadi problematik, yakni bagaimana memahami pikiran orang lain. Problem inilah yang semestinya menjadi *subject matter* sosiologi menurut teori ini (Haryanto, 2012:608).

Menurut Wirawan (2014:110), yang menjadi karakteristik paling dasar teori interaksi simbolik ialah adanya adanya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat ataupun hubungan antara suatu masyarakat dengan anggotanya yang terjadi secara alami. Dalam hal ini simbol-simbol yang mereka ciptakan merupakan tanda terjadinya interaksi di antara mereka. Di sini suatu realitas sosial dipandang sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh sekelompok orang di dalam masyarakatnya. Dalam proses interaksi individu-individu yang ada di dalamnya dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, interaksi simbolik berhubungan dengan gerak fisik, suatu atau vokal, gerak tubuh, serta ekspresi tubuh seseorang. Semuanya itu memiliki arti dan maksud dan dalam perspektif ini disebut sebagai "simbol".

Menurut, interaksi simbolik berpijak pada asumsi dasar sebagai berikut:

1. Realitas sosial adalah hasil bentukan interaksi antar individu dalam kehidupan sosial (*social reality is social construction*). Dengan kata lain, "... meanings do not reside in the object but emerge from social process" (makna tidak melekat pada obyek tetapi dihasilkan oleh proses sosial) (Jary and Jary 2005 dalam

Wirutomo, 2011:17)). Sebagai contoh, bila kita makan atau minum, maka makna dari tindakan itu bisa berbeda-beda tergantung dari makna subyektif pelakunya; bisa untuk merayakan ulang tahun, menjalin persahabatan atau memang karena lapar atau haus. Bagi pendekatan ini, integrasi nasional tidak memiliki suatu makna secara independen, tetapi makna tersebut berada pada individu dan ini dibentuk dalam proses sosial sehari-hari.

2. Setiap individu mampu mendefinisikan situasi yang ada, menginterpretasikannya dan menegosiasikannya dengan lawan interaksinya. Makna sosial suatu tindakan merupakan hasil interaksi antara individu dalam suatu kehidupan sosial sehari-hari (wacana). Jadi, hal itu bukan dicetak oleh kekuatan struktur yang telah terbentuk dan "terpola".
3. Dalam interaksi sosial, individu saling bernegosiasi dengan menggunakan simbol, terutama bahasa, tetapi ekspresi wajah atau gerakan badan pun bisa merupakan simbol yang mengandung makna.
4. Manusia memiliki kesadaran dan kemampuan *self-reflexive* sehingga bisa berubah karena reaksi lawan interaksinya. Kedirian (*self*) manusia memiliki dua dimensi yaitu "I" (sebagai subyek, atau individu yang khas) dan dimensi "Me" (sebagai obyek atau yang dipengaruhi/dibentuk oleh interaksi).
5. Interaksi manusia dalam masyarakat menyerupai suatu "drama" tatkala setiap individu memainkan peran dan menampilkan dirinya dengan terus menerus demi menjaga kesan lawan interaksinya ("jaga imej"). Ini disebut sebagai *impression management*.
6. Seseorang yang gagal menjaga imej yang baik bisa mendapat cap (label) dari masyarakat. Orang yang pernah masuk penjara misalnya, seumur hidup dianggap sebagai penjahat.

Menurut Wirawan (2014:114), Secara umum, ada enam proporsi yang dipakai dalam konsep interaksi simbolik, yaitu: (1) perilaku manusia mempunyai makna di balik yang menggejala; (2) pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumber pada interaksi sosial manusia; (3) masyarakat merupakan proses yang berkembang

holistik, tak terpisah, tidak linier, dan tidak terduga; (4) perilaku manusia itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis; (5) konsep mental manusia itu berkembang dialektik; dan (6) perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif.

Menurut Blumer sebagaimana dikutip oleh Wirawan (2014:114), pokok pikiran interaksi simbolik ada tiga: (1) makna (*meaning*); (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya; (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya.

S. Teori Konflik

Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin *configere* (saling memukul). Kata bahasa Inggris *conflict* yang merupakan turunan dari kata bahasa Latin *configere* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “konflik” Wirawan (2014:114). Daniel Webster sebagaimana dikutip oleh (Pickering, 2006) mengartikan konflik sebagai:

1. Pertentangan atau persaingan di antara oknum-oknum yang tidak memiliki kecocokan satu dengan yang lainnya.
2. Perilaku atau keadaan yang bertentangan (contohnya: pertentangan antar individu, pertentangan kepentingan dan pendapat).
3. Pertikaian yang diakibatkan oleh adanya dorongan, kebutuhan, keinginan atau permintaan yang saling bertentangan.
4. Pertikaian atau perseteruan.

Pada hakekatnya konflik adalah bagian dari esensi kehidupan manusia bahkan merupakan bagian dari proses perkembangan manusia yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Perbedaan strata sosial, jenis kelamin, sistem hukum dan ekonomi, agama, suku, bangsa, aliran politik adalah bentuk-bentuk perbedaan dalam kehidupan manusia. Perbedaan-perbedaan ini dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia telah menyebabkan munculnya konflik. Konflik tidak dapat dielakkan dan akan terus terjadi selama masih

ada perbedaan tersebut. Pendapat orang bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah konflik bias diterima benar dalam situasi ini. Dalam perjalanan sejarah umat manusia konflik senantiasa terjadi di dunia bahkan dalam banyak aspek kehidupan manusia, seperti bangsa, negara, perusahaan, organisasi, termasuk juga dalam keluarga dan kelompok pertemanan sebagai sistem sosial yang terkecil. Oleh karena itu, konflik telah terjadi pada masa lampau, sedang berlangsung saat ini bahkan akan terjadi di masa di masa depan atau masa yang akan datang (Wirawan, 2010:1-2).

Berkaitan dengan konflik, Hegel mengatakan bahwa konflik adalah bagian dari dialektika. Proses konflik adalah pertentangan antara tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis merupakan suatu ide atau gerakan historis. Ide atau gerakan berisi ketidaksempurnaan yang akan menimbulkan oposisi atau antitesis. Sebagai hasil konflik antar tesis dan antitesis muncullah sintesis. Sintesis akan menjadi tesis baru yang menimbulkan antitesis baru dan kemudian menghasilkan sintesis baru dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut Hegel proses sejarah dunia merupakan suatu proses dialektik. Sejarah berkembang menuju suatu tujuan yang disadari, yaitu kebebasan. Konflik antara bangsa-bangsa tak terhindarkan karena proses historis merupakan bagian dari realitas, yaitu realitas yang berkembang menuju kebebasan yang penuh. Bangsa-bangsa dibawa mengikuti gelombang sejarah, sehingga dalam setiap era satu bangsa tertentu menjadi dominan dalam sejarah dunia. Dalam sejarah itu juga muncul tokoh-tokoh sejarah dunia dan tampil sebagai pelaku-pelaku semangat dunia. Tokoh-tokoh itu mengangkat bangsanya ke taraf yang lebih tinggi dan baru dalam perkembangan dan kesempurnaan (Hardiman, 2004:241-242).

Karl Marx menjelaskan bahwa konflik dalam konteks masyarakat di mana ia hidup pada intinya adalah pertentangan antara kelas bangsawan atau borjuis kontra kelas petani/proletar dalam memperebutkan alat-alat produksi atau sumber-sumber ekonomi. Kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat adalah sebuah kenyataan objektif yang tidak tergantung pada individu-individu. Jadi, bukan karena pemilik modal kurang cakap atau kurang bijak, lalu para pekerjanya membencinya, melainkan karena kedudukan

kedua pihak tidak sama dalam proses produksi. Dia menyebut kedudukan objektif itu sebagai “kelas,” dan dalam *Manifestasi der kommunistischen Partei*, dia masih memberi tempat pada peranan manusia sebagai agen perubahan sejarah. Kalimatnya yang termashyur: “Sejarah semua masyarakat sampai hari ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Artinya, perjuangan kelas (*Klassenkampf*) antar kelas pemodal dan kelas pekerjalah yang memperhebat kontradiksi/konflik yang meletuskan revolusi (Hardiman, 2004:241-242).

Teori konflik berkembang dalam konteks reaksi terhadap kemunculan teori struktural fungsional. Karl Marx merupakan tokoh penting dalam mencetuskan munculnya teori konflik ini. Marx mengangkat konsepsi dasar mengenai perjuangan masyarakat kelas. Ia tidak memberikan gambaran yang sedetail mungkin tentang kelas, namun ia merujuk pada masyarakat Eropa pada abad ke-19 di mana dia hidup yang terbagi menjadi kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas kaum proletar (kelas pekerja miskin). Baik kaum borjuis maupun kaum proletar berada dalam sebuah struktur sosial hirarkis, dimana kaum borjuis di sini melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consiousness*) dalam diri kaum proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda.

Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Menurut teori konflik, terjadinya konflik merupakan salah satu prasyarat terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan berbeda dengan teori struktural fungsional yang mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik *ekuilibrium*. Kendati demikian, masyarakat tetap akan mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama pada suatu titik tertentu, masyarakat. Terciptanya suatu consensus atau suatu kesepakatan disebabkan oleh adanya negosiasi-negosiasi yang dilakukan dalam konflik. Selanjutnya Berry (2005:285) mengatakan bahwa di dalam teori konflik ada pemahaman dasar bahwa setiap masyarakat selalu terbentuk karena adanya kelas-kelas dan kelompok-kelompok yang memiliki potensi besar untuk berkonflik serta posisi-posisi mereka ditentukan oleh adanya pembagian kekuasaan di dalam masyarakat di mana mereka berada.

Teori konflik memiliki anggapan dasar bahwa “paksaan” merupakan salah satu unsur yang mempersatukan masyarakat. Artinya bahwa, paksaan (koersi) merupakan penyebab terjadinya keteraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini teori konflik berhubungan erat dengan kekuasaan atau power, koersi dan dominasi. Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf adalah tokoh sosiologi modern yang mempopulerkan teori konflik.

Dahrendorf (1959) sebagaimana dikutip dari Nasikun (2011:20) mengemukakan bahwa anggapan dasar yang merupakan pangkal dari pendekatan konflik adalah:

1. Masing-masing masyarakat selalu ada dalam proses perubahan tanpa akhir dan perubahan sosial adalah kenyataan yang tidak bias dilepaskan dari kehidupan setiap masyarakat.
2. Masing-masing masyarakat di dalam dirinya terkandung konflik-konflik atau dengan perkataan lain, konflik adalah kenyataan yang tidak bias dilepaskan dari setiap masyarakat.

3. Perubahan-perubahan sosial dan proses disintegrasi yang terjadi dalam masyarakat merupakan sumbangan dari setiap unsur di dalam suatu masyarakat.
4. Masing-masing masyarakat ada dalam integrasi atau dominasi dari penguasa atau orang yang berkuasa terhadap sejumlah orang.

Menurut Wirutomo (2011:14), perspektif konflik bersifat lebih kritis. Ia melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai suatu kekuatan impersonal tetapi juga merupakan wadah pertemuan individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan (*individual self interest*) yang harus diperjuangkan. Menurut Karl Marx, kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan materi, sementara Max Weber, yang juga tergolong dalam “kubu” perspektif konflik, melihat ada tiga kebutuhan dasar, yaitu materi, kekuasaan dan status sosial. Semua orang memperebutkan ketiga kebutuhan itu, tetapi sumbernya amat terbatas (langka) sehingga terjadilah perebutan antar individu maupun kelompok. Karena itulah pada setiap masyarakat konflik merupakan sesuatu yang *inherent* (melekat) (Wirutomo, 2011).

Kelompok-kelompok yang berkonflik tersebut memiliki kekuatan yang berbeda-beda sehingga yang lebih kuat dan lebih berkuasa memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk tatanan sosial yang diperlukan demi mempertahankan *status quo*. Jadi singkatnya, perspektif ini memandang keteraturan sosial yang didukung oleh norma dan moral masyarakat adalah hasil “paksaan” dari kekuatan kelompok yang berkuasa. Dalam perebutan itu, suatu pihak (individu maupun kelompok) akan menang dan yang lain terkalahkan. Kelompok yang menang akan berusaha mempertahankan, memantapkan dan melestarikan posisinya dengan menciptakan sistem dominasi. Namun pihak yang kalah akan selalu berusaha melepaskan diri dari dominasi tersebut (Wirutomo, 2011).

Menurut perspektif konflik, stratifikasi sosial adalah sumber ketidakadilan dan merupakan alat eksploitasi bagi kelompok yang kuat terhadap yang lemah. Karenanya, orang yang berada di kelas atas akan selalu berusaha untuk tetap bertahan dan menghambat orang atau kelompok di bawah untuk naik ke jenjang yang lebih

tinggi. Agar penindasan dapat diakhiri, stratifikasi perlu dirobohkan untuk menghasilkan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) (Wirutomo, 2011).

T. Hasil-Hasil Kajian yang Relevan

Berikut adalah hasil-hasil kajian yang relevan terdahulu yang relevan dengan tulisan ini:

Hasil Penelitian Th. Wawointana (2001) dengan judul: *Pelestarian Mapalus Di Minahasa dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional: Suatu Tinjauan tentang Sistem Gotong-Royong pada Masyarakat di Kabupaten Minahasa* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sistem budaya *Mapalus* hidup baik dalam masyarakat Minahasa sejak zaman nenek moyang hingga dewasa ini. Kehidupannya itu berlangsung turun-temurun sebagai konvensi masyarakat. Dalam kehidupannya yang turun-temurun itu, berlangsunglah *Mapalus* di berbagai bidang. Bidang-bidang itu adalah bidang pertanian, perikanan, pembangunan rumah, peristiwa kedukaan, dan penggunaan uang.

Kedua, Kualitas dan kuantitas *Mapalus* akhir-akhir ini mengalami kemerosotan dan tidak sekuat prinsip semula. Tapi dibalik itu muncul pula kesadaran dari pihak-pihak tertentu akan perlunya pelestarian nilai budaya *Mapalus* yang perlu dilestarikan.

Ketiga, faktor-faktor penyebab merosotnya *Mapalus* ada dua segi utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan merosotnya *Mapalus* terkategori secara fisik dan psikis. Secara fisik adalah berubahnya sistem organisasi *Mapalus*, jumlah anggota, tingkat sosial ekonomi anggota yang bergeser, dan lingkungan tempat *Mapalus* itu hidup. Faktor psikis adalah perubahan pola pikir anggota masyarakat. Sementara itu faktor ekstern penyebab kemerosotan *Mapalus* adalah pengaruh sikap hidup, nilai-nilai kehidupan dan norma-norma kemasyarakatan, dan cara berpikir manusia.

Keempat, dengan melihat realitas pelaksanaan atau praktek *Mapalus* di Minahasa dewasa ini, dapat ditentukan langkah atau upaya yang tepat dalam pelestariannya. *Mapalus* perlu dilestarikan

karena sistem gotong-royong tolong-menolong ini merupakan satu titik mosaik budaya nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional.

Penelitian Lexi A. Lonto (2001) dengan judul: *Peran Elit Agama dalam Membina Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Kota Manado* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, realitas kehidupan antar umat beragama di Kota Manado (Sulawesi Utara) menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Masyarakat Manado, yang memeluk beraneka macam agama, yaitu Kristen, Islam, Katolik, Budha, dan Hindhu dapat hidup rukun dalam beraktivitas di berbagai bidang kehidupan. Kerukunan hidup antarumat beragama di Manado terwujud dengan tidak terlepas dari peran elite agama. Peran elite agama ini terkoordinasi melalui organisasi BKSAUA (Badan Kerja Sama Antara Umat Beragama). Melalui badan ini, para elite agama saling berembug dan mengkoordinasikan diri dengan para umatnya agar hidup rukun dan seiya-sekata dalam beraktivitas di berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam bidang sosial budaya, misalnya, peran elite agama lebih kokoh lagi dengan dilatarbelakanginya kehidupan masyarakat Manado melalui semboyan *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara). Semboyan ini lebih bermakna luas bahwa masyarakat Sulawesi Utara adalah saudara tanpa membeda-bedakan adat-istiadat, suku bangsa, dan agama. Tidak hanya itu, masih ada semboyan lagi bernama *Mapalus*, yang artinya bekerja sama dengan semangat gotong-royong tanpa pamrih. Dengan semboyan ini pun, kerukunan mereka tercipta, sekalipun agama yang dianutnya berbeda. Kedua semboyan masyarakat Manado, yaitu *torag samua basudara* dan *Mapalus* ini didayakan oleh para elite agama dalam merukunkan umatnya dalam beraktivitas di berbagai bidang kehidupan.

Kedua, elite agama berperan dalam memperkokoh kerukunan hidup umat beragama, peran mereka itu terwujud dalam bentuk-bentuk berikut ini. Dialog merupakan cara yang jitu bagi mereka untuk berkomunikasi antarumat yang berbeda agama. Dengan dialog yang bersifat terbuka dan dengan sikap toleran yang tinggi,

jika terdapat perbedaan visi dan misi bermasyarakat, perberdaan itu dapat dengan mudah dipahami dan saling diterima. Dengan saling mengakui adanya perbedaan, justru perbedaan itulah yang menjadi kekuatan mereka untuk bermusyawarah.

Ketiga, ada faktor yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dalam perbedaan agama di Kota Manado. Faktor itu adalah sebagai berikut. Faktor tradisi, misalnya yang terwujud dalam kegiatan sosial berupa rukun tetangga, rukun-rukun warga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, hal ini menjadi media bagi terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Sikap diri yang terbuka, yang tidak membiasakan diri bersikap saling curiga kepada sesama, juga menjadi faktor pendukung terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Melalui sikap terbuka demikian ini, masyarakat Manado merupakan masyarakat yang mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan adanya perbedaan sesama. Terlebih lagi, dengan dibekali pemahaman ajaran agama masing-masing yang dianutnya, kuatnya iman dan takwa mereka itu memperkokoh kerukunan hidup antarumat beragama. Tentu saja, semua ini juga tidak terlepas dari peran elite agama sebagai benang merah faktor pengikatnya. Alasannya adalah elite agama berperan kuat sebagai figur panutan umat. Dengan kuatnya figur mereka sebagai anutan umat, dengan demikian, umat mudah mencontoh sepak terjang elite agama dan mengikuti arahan-arahnannya. Dalam posisi demikian, elite agama yang bergabung dalam BKSAUA berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyukseskan program-program yang dicanangkannya. Koordinasi kedua belah pihak ini baik karena dilandasi baiknya kebersamaan mereka dalam membina umat.

Penelitian Engelbert Lumowa (2000) dengan judul: *Pola Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Peningkatan Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Ketahanan Nasional: Suatu Studi di Kotamadia Manado Propinsi Sulawesi Utara* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pembinaan generasi muda, oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Utara dan Camat, cukup baik dan efektif. Buktinya ialah dengan tidak ada gejolak sosial yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga kerukunan

masyarakat dapat ditingkatkan dan dibina serta terpelihara dengan baik.

Kedua, Hubungan antar umat beragama di Kotamadia Manado memang tergolong baik, terbukti dengan adanya kerukunan hidup, terpeliharanya stabilitas keamanan masyarakat. Suasana rukun dan damai boleh tercipta karena masyarakat dari golongan agama dan etnik yang ada dapat mempraktekkan nilai-nilai budaya nasional seperti: saling menghargai, menghormati, toleransi, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Nilai-nilai ini boleh terwujud dengan semangat persaudaraan, sebagaimana yang tercermin dalam semboyan “*Torang Samua Basudara*”, yang sekarang ini sudah menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara. Nilai persaudaraan atau kekerabatan, baik yang terjadi karena keturunan darah maupun karena perkawinan adalah nilai budaya luhur yang menyatukan dan mengikat segenap anggota masyarakat dalam pola hidup yang terbuka dan penuh pengertian.

Ketiga, dilihat dari proses integrasi sosial, pada masyarakat di Kota Manado tidak menunjukkan adanya gejala disintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada, baik yang terbentuk berdasarkan: kekerabatan akibat pertalian darah, perkawinan, mata pencaharian, dan lingkungan tempat tinggal. Keberadaan semua kelompok sosial dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, dianggap sebagai wadah pertemuan dan wahana komunikasi untuk memperkokoh solidaritas bangsa dengan didasari oleh rasa kebersamaan, kerukunan, senasib sepenanggungan, dan rasa sebangsa.

Keempat, Pemeluk masing-masing agama di Sulawesi Utara mengakui perbedaan dan persamaan sebagai manusia yang mempunyai komitmen bersama dalam usaha peningkatan martabat manusia yang mempunyai komitmen bersama dalam usaha peningkatan martabat manusia yang universal, tanpa memandang perbedaan suku atau etnik, agama, dan asal-usul, karena baik dalam Kristen Protestan dan Katolik maupun dalam Islam, Buddha dan Hindu, komitmen kemanusiaan itu adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah.

Kelima, Perbedaan yang ada dalam masyarakat majemuk di Manado tidak lagi menjadi penyebab konflik atau ketidakrukunan, tetapi menjadi rahmat bagi seluruh umat beragama.

Keenam, Situasi dan kondisi masyarakat Manado selama ini diakui tidak lepas dari peran aktif dan kerja keras disertai rasa tanggung jawab moral dari Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama mulai dari tingkat kotamadya, kecamatan sampai desa dan kelurahan, untuk menghimpun tokoh-tokoh dan pemimpin agama, pemuda, masyarakat bersama pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait, untuk menyikapi dan menanggapi berbagai masalah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hubungan antar umat beragama dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Ketujuh, pembinaan generasi muda yang efektif dan berhasil meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama; sedangkan kerukunan yang mantap dan kuat akan menjamin adanya stabilitas dan ketahanan nasional yang tangguh.

Penelitian Maryam Lamadiris (2013) dengan judul: Pengucapan Syukur Di Sulawesi Utara (Studi Tentang Dinamika Interaksi Dalam Kehidupan Antar Umat Beragama Di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara) menemukan bahwa: *Pertama*, pengucapan syukur merupakan integrasi antara ibadah ritual dan budaya pesta yang dilaksanakan oleh keluarga Kristen Minahasa sebagai ungkapan syukur terhadap Tuhan pemberi berkat. *Kedua*, perilaku yang ditampilkan oleh pelaku-pelaku dalam pengucapan syukur adalah perilaku yang menggambarkan semboyan *torang samua basudara, baku-baku bae deng baku-baku sayang* sebagai wujud dari kerukunan hidup antar umat beragama di Sulawesi Utara. *Ketiga*, makin baik pemahaman masyarakat terhadap makna ibadah dan makna sosial pengucapan syukur akan memperteguh upaya pelestarian budaya pengucapan syukur.

Penelitian T. Pangalila (2013) dengan judul: Pengaruh Internalisasi Nilai Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus* dan *Torang Samua Basudara* Dalam Pembelajaran PKn Terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa (Penelitian Survey Terhadap Para Siswa SMA di Kota Tomohon-Sulawesi Utara) menemukan bahwa:

terdapat pengaruh yang signifikan internalisasi nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, Torang Samua Basudara* dalam pembelajaran PKn terhadap pengembangan sikap toleransi siswa di kota Tomohon-Sulawesi Utara.

U. Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah dilaksanakan, maka posisi kajian ini (state of the arts) atau aspek kebaruan (novelty) adalah kajian pengembangan. Disebut sebagai kajian pengembangan karena kajian ini dilaksanakan berpijak dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan kemudian mencari kebaruan (novelty) yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

Kebaruan dalam kajian ini diuraikan secara garis besar dalam bagian berikut ini. Kemajemukan sosial dan budaya Indonesia ditandai dengan banyaknya budaya dan agama di Indonesia. Sebagai contoh budaya Jawa, Sunda, Minahasa, Batak, dan lain-lain. Dari segi agama ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang oleh pemerintah Indonesia diakui secara resmi.

Sejarawan asal Perancis Denys Lombard pernah menyebut Pulau Jawa sebagai "*Le Carrefour Javanais*" atau "Perempatan Jawa," tempat berbagai kebudayaan bertemu dalam sebuah persilangan geografis (Lombard, 1996 dalam. Dalam persilangan ini tak kurang dari lima agama besar dunia, yaitu hinduisme, budhisme, Islam, katolisisme dan protestantisme menanamkan tradisinya dan berinteraksi, baik dengan agama-agama asli maupun dengan agama lainnya, sehingga menghasilkan "silang budaya" (Hefner, 2001a dalam Wirutomo, 2011:127). Tokoh pertama yang melukiskan tentang kemajemukan bangsa Indonesia adalah Furnivall. Furnivall (1939) sebagaimana dikutip oleh Wirutomo (2011:20) dalam hal ini melukiskan kemajemukan bangsa Indonesia pada masa Hindia-Belanda yang ditandai oleh perbedaan etnik yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, namun tidak membaur dan masing-masing memiliki suatu perangkat pranata sosial (sistem keluarga dan kekerabatan, agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya) yang khas; tapi secara formal terpisah dan memenuhi kebutuhannya sendiri (*self contained*) serta tidak memiliki cita-cita yang sama (*common social will*). Menurut Nasikun (2011:34-35), struktur

masyarakat Indonesia memiliki ciri yang unik, yaitu secara horizontal bisa ditemukan dari kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Sementara itu, secara vertikal dapat dilihat dalam perbedaan-perbedaan vertikal di antara masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan bawah yang sangat mencolok.

Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai kebudayaan dan adat-istiadat. Sayangnya, implementasi proses kehidupan bermasyarakat di tengah perbedaan dan keanekaragaman ini (suku bangsa, budaya, ras, agama, dan sejenisnya) tidaklah semudah apa yang dipikirkan. Pergeseran antar kelompok agama maupun suku, budaya ataupun adat istiadat yang berbeda seolah menjadi pemicu terjadinya suatu perpecahan horizontal antar masyarakat yang berlainan tersebut.

Fenomena-fenomena konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini mengindikasikan kurangnya toleransi; baik toleransi terhadap agama lain maupun terhadap budaya lain. Toleransi pada hakikatnya merupakan bentuk sikap maupun tindakan yang di dalamnya ada jiwa saling menghargai perbedaan agama, etnis, suku, pendapat, sikap, tindakan sesama yang dianggap berbeda dari dirinya sendiri (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:9). Kontras dengan apa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilanda berbagai konflik horizontal, kerukunan masyarakat Sulawesi Utara justru tetap terjaga dengan baik; masyarakatnya tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa.

Kota Tomohon sebagai bagian dari Propinsi Sulawesi Utara juga menunjukkan kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi. Masyarakat kota Tomohon beragam dari suku, agama, dan bahasa. Walaupun mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Minahasa, tetapi ada juga masyarakat yang berasal dari suku lain seperti, Jawa, Sangir, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Totemboan dan Tionghoa, dan sebagainya. Agama Kristen merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat kota Tomohon, tetapi juga terdapat pemeluk agama Islam, Buddha dan Kong Hu Cu.

Masyarakat Sulawesi Utara khususnya masyarakat kota Tomohon hidup dalam kerukunan disebabkan oleh kuatnya nilai-

nilai sosial budaya lokal (*local wisdom*) yang menjadi perekat masyarakatnya. Nilai-nilai sosial budaya dominan di kota Tomohon adalah *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara*. Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* adalah budaya Minahasa yang paling menonjol menjiwai hidup masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya dan masyarakat kota Tomohon pada khususnya. Budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* yang berarti manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain merupakan filosofi Sam Ratulangi. Pemikiran filosofis ini mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk hidup dalam kerukunan dengan tujuan untuk memanusiaikan orang lain dan bukan menjadi musuh bagi orang lain (*homo homini lupus*). Sementara itu *Mapalus* adalah budaya atau tradisi suku Minahasa, dimana segala sesuatu dikerjakan secara gotong royong atau bersama-sama (misalnya dalam mengerjakan kebun). Dalam konsep *Mapalus* yang lebih modern, penerapannya bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan; dimana pada waktu orang Kristen merayakan hari raya Natal atau Paskah yang menjaga gereja-gereja adalah pemuda-pemuda Muslim. Begitu pula sebaliknya ketika orang Muslim merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, maka yang ikut menjaga di sekitar Masjid adalah pemuda-pemuda Kristen. Bahkan di Sulawesi Utara ada satu lembaga yang berperan untuk menjaga kerukunan antar agama, yaitu: BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama). Kedua budaya ini dalam perkembangannya dikombinasikan menjadi semboyan masyarakat Sulawesi Utara *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara). Semboyan ini dengan jelas menggambarkan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam suasana harmonis, penuh persaudaraan.

Untuk menguji permasalahan dalam kajian ini, maka beberapa teori utama dan teori pendukung akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi teori utama adalah teori tindakan sosial, teori fenomenologi dan teori interaksi sosial. Selain teori utama, juga terdapat beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan untuk memperkuat kajian ini, antara lain teori perilaku sosial, teori ethnometodologi, interaksionisme simbolik, dan teori konflik. Untuk memperkuat

kajian digunakan juga konsep-konsep seperti: konsep toleransi, masyarakat, agama dan masyarakat, budaya, akulturasi, modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara.

BAB IV

TOLERANSI MASYARAKAT KOTA TOMOHON DI TENGAH KEBERAGAMAN

A. Profil Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara merupakan nama provinsi paling utara dari pulau Sulawesi. Manado merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara dan terletak pada 00°15'-05°34' Lintang Utara dan antara 123°07'-127°10' Bujur Timur. Sulawesi Utara memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2016).

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 penduduk Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: laki-kali berjumlah 1.159.903 dan perempuan berjumlah jumlah 1.110.693. Jadi total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.270.059 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2016).

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten

Minahasa, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung.

Di Sulawesi Utara suku yang mendominasi adalah suku Minahasa dengan (33,2%), selanjutnya Suku Sangir (19,8%), Suku Bolaang Mangondow (11,3%), Suku Gorontalo (7,4%), Suku Totemboan (6,8%) dan Tionghoa (3%). Di samping itu juga ada suku Bali, Jawa, Arab, Batak, Makassar, Maluku dan lain-lain. Sementara itu dari segi agama: Protestan (75%), Islam (13%), Katolik (10%), Konghuchu (1%), Budha dan Hindhu (1%).

Dari data di atas nampak jelas bahwa suku Minahasa adalah penduduk mayoritas di Sulawesi Utara kemudian diikuti oleh suku Sangihe, suku Bolaang Mongondow, suku Talaud dan suku Siau. Dari data tersebut jelas bahwa ditinjau dari segi etnisitas, Sulawesi Utara termasuk provinsi yang heterogen. Di sebagian wilayah daratan tersebar Suku Bolaang Mongondow dan Suku Minahasa. Sementara itu di daerah pesisir Utara, Timur dan Barat daratan dan pulau Lembeh Sulawesi Utara berdiam suku Talaud, suku Sangihe dan suku Siau. Di desa-desa pinggir pantai Sulawesi Utara di bagian Utara Kabupaten Minahasa Utara berdiam suku Bajo. Di Bolaang dan Minahasa bagian Barat berdiam suku Bantik yang menurut catatan sejarah merupakan keturunan pengungsi dari Talaud. Di sebagian wilayah Kecamatan Bunaken Kota Manado berdiam suku Wawontehu.

Provinsi Sulawesi Utara selain didiami oleh penduduk asli, tetapi juga terdapat para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Para penduduk pendatang di antaranya adalah orang Tionghoa yang tersebar di beberapa daerah. Selanjutnya ada yang berasal dari Ternate, Gorontalo, Jawa dan Bali yang pada umumnya merupakan penduduk transmigrasi. Dari data di atas, nampak jelas bahwa Sulawesi Utara sangat beragam dalam hal suku, agama, bahkan ras.

Kendati masyarakat Sulawesi Utara beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa, tetapi kerukunan masyarakat Sulawesi Utara justru tetap terjaga dengan baik; masyarakatnya tetap tenang, aman, dan damai dalam keharmonisan. Sulawesi Utara tampak tanpa

masalah, padahal warga provinsi ini juga beraneka ragam suku, agama, ras dan bahasa.

Karena keharmonisan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Utara di tengah keberagaman suku, agama, ras dan bahasa, maka tidaklah mengherankan jika Sulawesi Utara menjadi barometer dalam hal kerukunan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Banyak pemimpin daerah yang secara khusus datang ke Sulawesi Utara untuk mempelajari secara langsung tentang kerukunan antar umat beragama. Menurut Gara (2009:67) dalam Pangalila (2013) kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara adalah realita yang telah diakui dari tingkat lokal, nasional dan internasional. Fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama (etnis), ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

B. Deskripsi Kota Tomohon

1. Kondisi Geografis

Tomohon adalah kota administratif di Sulawesi Utara. Tomohon adalah kota dataran tinggi dengan ketinggian rata-ratanya 800 meter di atas permukaan laut. Sementara itu 01° 18' 51'' Lintang Utara dan 124° 49' 40'' Bujur Timur merupakan batas Bujur Lintang Kota Tomohon. Letak kota Tomohon + 25 KM dari kota Manado. Berdasarkan letaknya kota Tomohon berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Minahasa,
- Timur: Kabupaten Minahasa,
- Selatan: Kabupaten Minahasa,
- Barat: Kabupaten Minahasa,

Sejak tahun 2003 Tomohon dimekarkan menjadi kota otonom lepas dari Kabupaten Minahasa. Pada tanggal 4 Agustus 2003 kota Tomohon diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Sejak dimekarkan sampai sekarang kota Tomohon dipimpin oleh:

1. Drs. Boy S. Tangkawarouw, M.Sc (Penjabat Walikota), 4 Agustus 2003 s.d 8 Maret 2005.

2. Jeffry R. Korengkeng, SH, M,Si (Penjabat Walikota), 8 Maret 2005 s.d 17 Mei 2005.
3. Nico Pelealu, SH, M.Si (Penjabat Walikota), 17 Mei 2005 s.d 4 Agustus 2005.
4. Jefferson S. M. Rumajar, SE (Walikota) dan Linneke S. Watoelangkow, S.Si (Wakil Walikota), 4 Agustus 2005 s.d 4 Agustus 2010.
5. Fentje D. Goni SH, (Pelaksana Harian Walikota), 4 Agustus 2010 s.d 14 Agustus 2010
6. Drs. Gerson Mamuja (Penjabat Walikota), 15 Agustus 2010 s.d 7 Januari 2011.
7. Jefferson S. M. Rumajar, SE (Walikota) dan Jimmy F. Eman, SE. Ak (Wakil Walikota), 7 Januari 2011 s.d 10 Januari 2011.
8. Jimmy F. Eman, SE. Ak (Plt. Walikota), 10 Januari 2011 s.d 9 Mei 2012.
9. Jimmy F. Eman, SE. Ak (Walikota), 9 Mei 2012 s.d 7 Januari 2016.
10. Dr. Drs. Arnold Poli, SH, M.Pd (Pelaksana Harian Walikota) 7 Januari 2016
11. Drs. Sanny Parengkuan (Penjabat Walikota), 8 Januari 2016 sd 17 Februari 2016
12. Jimmy F. Eman, SE. Ak (Walikota) dan Syerly Adelyn Sompotan (Wakil Walikota), 17 Februari 2016 sd sekarang.

Sejak dimekarkan, Kota Tomohon kemudian dibagi dalam 5 kecamatan, yakni: Tomohon Selatan, Tomohon Barat, Tomohon Utara, Tomohon Timur dan Tomohon Tengah. Luas Wilayah kota Tomohon adalah 147,21 KM² dengan luas wilayah per kecamatan sebagai berikut:

- Tomohon Utara: 42,28 KM²
- Tomohon Timur: 21,88 KM²
- Tomohon Selatan: 32,95 KM²
- Tomohon Barat: 40,69 KM²
- Tomohon Tengah: 9,41 KM²

Menurut sejarah, konon asal nama kota Tomohon telah tercetus sejak keberadaan manusia pertama di wilayah ini. Nama kota Tomohon berasal dari bahasa Tombulu *Toumu'ung*. *Tou* yang artinya

orang dan *Mu'ung* yang artinya air/sumber air. Nama kota Tomohon sudah ada sejak zaman dulu bahkan ketika Spanyol, Portugis dan Belanda menginjakkan kaki di tanah *Toar Lumimuut*. Menurut kesaksian seorang misionaris Pater Blas Palomino sejak tahun 1619 nama kota Tomohon sudah ada dengan sebutan *Tomon*. Hal yang sama juga dituliskan oleh Gubernur Belanda di Ternate Robertus Padtbrugge dalam laporannya tahun 1678. Data sejarah lainnya tentang asal usul kota Tomohon bisa ditemukan dalam tulisan etnografis Pendeta N. Graafland yang ia tulis pada tanggal 14 Januari 1894 ketika berada di kapal *Queen Elisabeth* mengenai sebuah daerah bernama Tomohon yang dia kunjungi sekitar tahun 1850 (Kojongian, 2006).

Suhu rata-rata di kota Tomohon sesuai dengan data Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Manado adalah 22,33 °C dengan suhu minimum 19 °C dan maksimum 28,4 °C. Kelembaban rata-rata 90,66%, tekanan udara rata-rata 940,1 milibar dan kecepatan angin rata-rata 3,34 knot. Kota Tomohon terletak di 23 km Selatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berada pada ketinggian 750-800 m di atas permukaan laut dan memiliki topografi perbukitan datar, memiliki empat gunung yakni Gunung Lokon, Gunung Tampusu, Gunung Tatawiran, dan Gunung Mahawu. Karena berada di jalur rangkaian gunung berapi dan dua di antaranya masih aktif yakni Gunung Lokon dan Gunung Mahawu, serta memiliki dua danau yakni Danau Linow dan Danau Pangolombian.

Kota yang dijuluki kota bunga ini, pada tahun 2019 memiliki temperatur udara rata-rata tahunan 33,590 C dengan temperature minimum 22,620 C dan temperatur maksimum mencapai 31,670 C. Kelembaban udara selama tahun 2017 tercatat rata-rata mencapai 86,25 persen, secara geografis terdapat 1 kelurahan lembah 18 kelurahan di lereng dan 25 kelurahan di dataran. Luas wilayah Kota Tomohon 147,21 km² dan batas wilayah seluruhnya diapit oleh Kabupaten Minahasa (Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, 2019).

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Tomohon tahun 2019 adalah sebanyak 105.306 jiwa yang terdiri dari 53.000 laki-laki dan 52.306 perempuan.

Memiliki luas wilayah 147,21 KM². Pada tahun 2019, setiap KM² ditempati penduduk sebanyak kurang dari 715-716 jiwa, angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 704-705 jiwa/km². Dari data penduduk tahun 2018, maka terdapat pertumbuhan sebesar 1,71 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014. Penduduk laki-laki tingkat pertumbuhannya sebesar 1,80 persen sementara penduduk perempuan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,61 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,56 persen (Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, 2019).

Tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Tomohon adalah 682 jiwa/km². Berdasarkan data BPS Kota Tomohon tahun 2019, kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 362 jiwa/Km² dan tertinggi berada di Kecamatan Tomohon Tengah dengan kepadatan sebesar 2.418 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, 2019).

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tomohon Selatan	12117	11570	23687
2.	Tomohon Tengah	11636	12503	24139
3.	Tomohon Timur	5741	5513	11254
4.	Tomohon Barat	7732	7422	15154
5.	Tomohon Utara	15774	15298	31072
	Tomohon	53000	52306	105306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Tahun 2019

Tabel 4.2. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	3.934	3.835	7.769
5-9	4.179	3.753	7.932
10-14	4.283	3.800	8.083
15-19	4.523	4.716	9.239
20-24	4.791	4.635	9.426
25-29	3.768	3.834	7.602
30-34	3.840	3.647	7.487
35-39	3.698	3.664	7.362
40-44	3.700	3.653	7.353
45-49	3.616	3.753	7.369
50-54	3.660	2.988	6.648
55-59	2.703	2.651	5.354
60-64	2.753	2.716	5.469
65-69	1.702	1.512	3.214
70-74	980	1.537	2.517
75+	870	1.612	2.482
Jumlah	53.000	52.306	105.306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Tahun 2019

3. Pendidikan

Kota Tomohon sudah sejak dulu dijuluki sebagai kota agama dan pendidikan. Kota Tomohon merupakan tempat dimana para misionaris dari negeri Belanda tinggal kemudian mendirikan rumah sakit dan sekolah-sekolah misi. Oleh karena itu, kota Tomohon adalah daerah di Sulawesi Utara yang merupakan pusat berkembangnya agama Kristen khususnya di Minahasa. Saat ini kota Tomohon mempunyai banyak sarana dan prasarana pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Universitas atau Perguruan Tinggi yang dikelola baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Perguruan Tinggi paling tua di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Kristen Indonesia (UKI) ada di kota Tomohon.

**Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Tomohon
Tahun 2019**

Belum Sekolah	11002
Usia 7-94 belum pernah sekolah	1960
Belum/Tidak tamat SD	19440
SD/Sederajat	17443
SLTP	19412
SLTA	20347
SMK/Kejuruan	6765
Diploma I/II	1843
Diploma IV/Universitas	6523
S2/S3	571
Jumlah Total Penduduk	105306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tomohon Tahun 2019

4. Agama

Berdasarkan data kependudukan masyarakat kota Tomohon mayoritas beragama Kristen dan tercatat dalam sejarah sebagai pusat penyebaran dan perkembangan agama Kristen Protestan di Minahasa. Di kota Tomohon juga terletak Kantor Pusat Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) yang merupakan gereja terbesar di Sulawesi Utara ada di kota Tomohon. Selanjutnya di Tomohon ada banyak pula pemeluk Gereja Katolik Roma dengan sejarahnya yang cukup panjang. Kantor Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh wilayah Minahasa Selatan dan Tomohon juga terdapat di kota Tomohon. Pemeluk agama Buddha sebagian besar berdomisili di Kelurahan Kakaskasen III dan juga terdapat tempat ibadah berupa Vihara yang terletak di Kelurahan Kakaskasen III. Pendudukan kota Tomohon yang memeluk agama Islam sebagian besar tinggal di kelurahan Kampung Jawa. Di Kelurahan Kinilow ada Pesantren Hidayatullah. Berikut ini adalah jumlah penduduk kota Tomohon menurut agama yang dianut:

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Tomohon Tahun 2019

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1.	Tomohon Selatan	1.787	17.721	4.792	5	5	0
2	Tomohon Tengah	559	14.271	3908	0	21	0
3	Tomohon Timur	396	7.792	3.285	2	26	0
4	Tomohon Barat	100	9.585	6.879	0	1	0
5	Tomohon Utara	540	23.554	5.635	13	27	3
Tomohon		3.382	72.923	27.342	20	80	3

Sumber: Kementerian Agama Kota Tomohon dan BPS Kota Tomohon Tahun 2019

Tabel 4.5. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2019

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Litang/ Kelenteng
1.	Tomohon Selatan	1	2	26	5	0	0	0
2	Tomohon Tengah	1	2	16	3	0	0	0
3	Tomohon Timur	0	1	11	2	0	0	0
4	Tomohon Barat	0	0	11	2	0	0	0
5	Tomohon Utara	1	1	22	5	0	2	0
Tomohon		3	5	86	17	0	2	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, Tahun 2019

Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara, maka dibentuk BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama) baik ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, selain itu pemerintah juga membentuk Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB). BKSAUA dan FKUB memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan suasana toleransi di tengah perbedaan agama dan bahkan suku yang ada di Sulawesi Utara.

5. Sosial dan Politik

Secara sosiologis kehidupan masyarakat kota Tomohon masih menggambarkan kehidupan masyarakat yang merupakan perpaduan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota Tomohon pada umumnya masih terikat dengan adat dan kebiasaan yang dipegang secara turun temurun, menjunjung tinggi kepedulian sosial yang merupakan bentuk kongkrit dari budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* sebagai tradisi tua orang Minahasa. Masyarakat kota Tomohon mayoritas berasal dari etnis Minahasa dan memeluk agama Kristen, oleh karena itu dalam kehidupannya setiap hari terdapat pengaruh yang kuat dari adat istiadat, budaya dan agama yang dianut. Dalam kondisi kehidupan masyarakat, pola pengelompokan sosial berdasarkan suku dan agama teraplikasi dalam kehidupan dan pengelompokan berdasarkan ikatan kekerabatan dan kekeluargaan.

Dalam konteks keagamaan masyarakat kota Tomohon masih memegang teguh prinsip keagamaan, ibadah dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Pada hari minggu sebagian besar masyarakat beraktivitas di gereja dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sangsi sosial dari masyarakat merupakan ganjaran bagi warga masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, masyarakat di kota Tomohon pada umumnya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial agar tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

Di bidang politik, sejak menjadi kota otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa, kota Tomohon secara politik juga memiliki otonomi tersendiri dalam pemilihan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Oleh karena itu, sejak tanggal 5 April 2004 kota Tomohon melangsungkan pemilu langsung pertama untuk

memilih anggota DPRD kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI. Dalam pemilihan pertama itu muncul 10 paratai peraih suara terbanyak. Partai Golkar meraih suara terbanyak, yaitu 18.586 suara dan memperoleh 8 kursi. Selanjutnya PDI-P dengan 12.226 suara, meraih 5 kursi. Partai Demokrat 3.654 suara dengan 3 kursi. Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan 2.765 suara 2 kursi. Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan 2.815 suara 1 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2.132 suara 1 kursi. PNI-M 2.155 suara tidak ada kursi. PKPB 1.585 suara tidak ada kursi. PNBK 1.447 suara tidak ada kursi. PKP 967 suara tidak ada kursi (Kojongian, 2006).

Selain partai politik, setelah Tomohon menjadi kota ikut tumbuh subur berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), antara lain: Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Karang Taruna, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Semua organisasi kemasyarakatan pemuda ini berhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Tomohon (Kojongian, 2006).

Selanjutnya dalam bidang politik pemilihan kepada daerah (pilkada) walikota dan wakil walikota pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dengan pemenangnya Jefferson Rumajar dan Linneke Watoelangkow sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2005-2010. Selanjutnya untuk pilkada tahun 2010 terpilih sebagai walikota dan wakil walikota periode 2015-2015 yaitu Jefferson Rumajar dan Jimmy F. Eman. Untuk pilkada tahun 2015 terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikot periode 2015-2020 adalah Jimmy F. Eman dan Sherly A. Sompotan (Kojongian, 2006).

C. Toleransi Masyarakat Lokal Kota Tomohon

Untuk mengungkap tentang kehidupan masyarakat kota Tomohon dalam membentuk toleransi terhadap masyarakat pendatang, maka dalam penelitian dapat ditelusuri melalui beberapa fokus penelitian, yaitu: (1). Toleransi Masyarakat lokal kota Tomohon: (a). Perilaku masyarakat dalam interaksi di pasar, dalam

kerukunan kampung, perkawinan, kematian dan hari-hari besar keagamaan. (b). Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. (c). Komunikasi dengan media bahasa antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. (2). Nilai-nilai yang menimbulkan toleransi dan keberagaman hubungan agama dan etnis: (a). *Si Tou Timou Tumou Tou*, (b). Nilai budaya *Mapalus*, (c). Semboyan *Torang Samua Basudara*.

Masyarakat lokal yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini merupakan masyarakat Tomohon yang telah tinggal serta menetap dalam waktu yang relatif lama, serta mempunyai ikatan sejarah emosional serta wilayahnya dan memiliki ikatan budaya yang sama. Sementara itu masyarakat pendatang dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat dari luar (Jawa, Gorontalo, Ambon, dan lain-lain) yang berpindah dari daerah asal mereka dan tinggal kemudian beradaptasi bersama dengan proses interaksi bersama masyarakat lokal/pribumi di kota Tomohon.

1. Perilaku Masyarakat dalam Interaksi di Pasar dan Tempat Umum lainnya

Hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan berkaitan dengan perilaku masyarakat berbeda latar belakang agama dan etnis di kota Tomohon terungkap bahwa ketika berada di pasar dan di tempat umum lainnya, perasaan masyarakat lokal dan pendatang biasa saja ketika bergaul dan berinteraksi. Menurut Koentjaraningrat (2002:146-147), masyarakat merupakan kumpulan manusia yang melakukan proses interaksi dan saling bergaul satu sama lain. Dalam kenyataannya perkumpulan hidup manusia ini melakukan interaksi berdasarkan sebuah sistem adat istiadat tertentu yang memiliki sifat berkelanjutan serta terikat dengan identitas bersama yang mereka hayati. Masyarakat pendatang merasa seperti di kampung halaman mereka sendiri karena masyarakat di Tomohon tidak pernah membedakan latar belakang agama, suku dan etnis dalam bergaul. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa interaksi dengan masyarakat berjalan aktif dalam arti tegur sapa selalu mendahului dalam setiap perjumpaan, kendati belum kenal dan belum tahu latar belakang agama dan etnis bahkan latar

belakang budayanya masing-masing. Tidak ada perbedaan dalam masyarakat kota Tomohon karena memang suku Minahasa tidak mengenal sistem kerajaan. Semua orang dianggap sama derajatnya karena sesuai dengan filosofi hidup *Si Tou Timou Tumou Tou* artinya manusia dalam kehidupannya hidup dalam proses untuk menjadikan orang lain sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya dan semboyan *Torang Samua Basudara* (Kita Semua Bersaudara). Oleh karena itu dalam perilakunya setiap hari, masyarakat kota Tomohon selalu dipengaruhi oleh nilai budaya yang ada. Perilaku sosial merupakan kumpulan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh nilai, emosi, adat, sikap, etika, genetika, persuasi dan kekuasaan. Dalam hal ini perilaku seorang dapat dikategorikan dalam perilaku yang bisa dimaklumi, perilaku wajar, serta perilaku yang aneh atau menyimpang. Sosiologi memandang perilaku sebagai sebuah tindakan sosial paling mendasar yang tidak ditunjukkan kepada orang lain. Perilaku sosial adalah sebuah tindakan yang tingkatannya lebih tinggi dari perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain, oleh karena itu perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial. Artinya penerimaan terhadap perilaku seseorang diatur oleh berbagai kontrol sosial dan diukur relatif terhadap norma sosial (A. Hasyim Nawawie, 2009:17 dalam Sinulingga, 2012:11). Jadi intinya masyarakat kota Tomohon baik lokal maupun pendatang dalam interaksinya setiap hari di pasar dan tempat-tempat umum lainnya memiliki rasa saling percaya. Dalam konsep modal sosial *trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakni bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 2007). Dalam pandangan Fukuyama (1995), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Selanjutnya dilihat dari latar belakang antropologis masyarakat kota Tomohon sebagai bagian dari suku Minahasa adalah

masyarakat yang lebih terbuka/egaliter dan tidak mengenal sistem kasta. Di Minahasa pada umumnya dan di Tomohon pada khususnya hanya mengenal sistem marga yang besar, sehingga masyarakat Tomohon sangat memegang prinsip kesetaraan. Tidak ada perbedaan agama dan etnis karena ada pengaruh dari budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*. Filosofi Sam Ratulangi ini lebih dalam aspek latar belakang masyarakat yang terbuka dan mudah bersahabat.

Selain faktor budaya, faktor lain yang turut mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat kota Tomohon terhadap masyarakat pendatang yang berbeda agama dan etnis adalah agama yang dianut penduduk lokal. Dari data kependudukan dapat dilihat bahwa masyarakat kota Tomohon mayoritas beragama Kristen (Protestan dan Katolik). Di dalam agama Kristen itu sendiri ajaran yang paling utama adalah kasih. Ajaran tentang kasih (Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ... Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri) yang mereka dapatkan di gereja melalui khotbah para pendeta dan pastor mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada semacam stigma dalam masyarakat bahwa tidak menghargai orang lain termasuk mereka yang berbeda agama dan etnis adalah pelanggaran terhadap hukum kasih. Menurut Nottingham (1994:38), pada umumnya agama menjelaskan kenyataan bahwa nilai yang dimiliki oleh hampir semua masyarakat tidak hanya sebagai kesatuan nilai yang tercampur-aduk, melainkan tersusun dalam tingkat (hirarki). Agama menetapkan nilai-nilai *tertinggi* pada hirarki ini. Oleh sebab itu, maka agama dan budaya menjadi dua hal penting yang sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat lokal kota Tomohon dalam membangun sikap toleransi terhadap masyarakat pendatang yang berbeda agama dan etnis. Jadi prinsip menghidupkan orang lain membuat masyarakat suku Minahasa dan masyarakat Tomohon pada khususnya lebih memberikan kesempatan bagi para pendatang untuk berkembang. Dari segi politik dan sosial tidak terlalu nampak adanya pembedaan-pembedaan. Oleh karena itu, wajar jika di pasar dan dalam aktivitas di ruang publik tidak pernah ada pembedaan-pembedaan atau deskriminasi. Perilaku masyarakat dalam interaksi

di pasar biasanya hanya sekedar interaksi antara penjual dan pembeli tanpa memikirkan latar belakang agama dan etnis. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Mba Mi seorang pedangan jamu Asal Solo Jawa Tengah yang sudah menetap di Tomohon selama 37 Tahun mengatakan bahwa selama hidup di Tomohon kurang lebih 37 tahun tidak pernah merasa risih ketika bergaul dengan penduduk lokal. Selama berjualan jamu tidak pernah ada perbedaan yang dia alami, bahkan jika satu hari tidak berjualan jamu akan dicari-cari oleh para pelanggannya.

Selanjutnya perilaku masyarakat dalam interaksi mereka dengan masyarakat lokal biasanya masuk melalui suku. Para pendatang awalnya mengenal dulu budaya, kebiasaan, cara bergaul, tutur kata, sampai sopan santun masyarakat lokal kota Tomohon. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat lokal dan pendatang di kota Tomohon tercermin dalam simbol-simbol yang mereka gunakan dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Wirawan (2014:110), yang menjadi karakteristik paling dasar teori interaksi simbolik ialah adanya adanya hubungan antara manusia di dalam sebuah kelompok masyarakat maupun hubungan diantara sebuah masyarakat dengan anggotanya yang terjadi secara alami. Dalam hal ini simbol-simbol yang mereka ciptakan merupakan tanda terjadinya interaksi di antara mereka. Di sini suatu realitas sosial dipandang sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh sekelompok orang di dalam masyarakatnya. Dalam proses interaksi individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat berada dalam keadaan sadar. Oleh sebab itu, interaksi simbolik berhubungan dengan gerak fisik, vocal, gerak tubuh, serta ekspresi tubuh seseorang. Semuanya itu memiliki arti dan maksud dan dalam perspektif ini disebut sebagai "simbol".

Para pendatang mengalami cara-cara masyarakat setempat walaupun mungkin awalnya bertentangan dengan suku, agama tradisi tempat mereka berasal, tapi mereka meredam itu semua dan masuk ke dalam lingkup budaya lokal. Intinya sebagai pendatang mereka menyesuaikan diri dengan penduduk asli terutama dengan budaya di Tomohon yang pasti berbeda dengan budaya dimana mereka berasal. Jadi di sinilah proses imitasi terjadi sebagai prasyarat

terjadinya interaksi. Imitasi pada hakekatnya adalah suatu tindakan atau perilaku manusia yang didasarkan pada apa yang ia lihat atau tiru dari orang lain. Faktor penting yang mempengaruhi proses imitasi adalah tingkat jangkauan indra seorang individu, jadi apa yang ia imitasikan sebatas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan (Kolip & Setiadi, 2011:67). Imitasi memiliki kedudukan yang sentral di dalam suatu proses interaksi. Segi positif dari faktor imitasi ialah seseorang terdorong dalam menaati kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang diterapkan di dalam suatu masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Weber sebagaimana dikutip oleh Jones, dkk., (2016:116) yang mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan faktor pembentuk dunia seperti yang ada saat ini. Tindakan manusia menurut Weber dilakukan karena ia telah memutuskan untuk melakukannya serta demi mencapai tujuan yang ia hendaki. Manusia memilih tindakan karena ia telah memilih sasaran dan memperhitungkan keadaannya secara matang. Hasil dari tindakan manusia adalah struktur sosial; sementara itu cara hidup merupakan hasil produk dan pilihan termotivasi. Keadaan sosial yang dihasilkan karena tindakan tersebut menjadi hambatan kekuatan struktural, tetapi bagaimana pun tindakan sejatinya tetap mental – yang dipilih dalam konteks persepsi pelaku dari hambatan struktural itu. Artinya, menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan merupakan bukti pemahaman manusia tentang realitas sosial yang dihasilkan oleh tindakannya.

Walaupun banyak pendatang dari suku Jawa, Gorontalo, Ambon dan suku lain tapi masyarakat pendatang bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat lokal Tomohon. Perbedaan suku, agama memang ada, tapi perbedaan justru menjadi satu kekayaan di tengah keberagaman masyarakat kota Tomohon. Keberagaman dalam konteks kehidupan masyarakat adalah suatu keadaan dimana ada perbedaan mendasar dalam berbagai segi kehidupan, yaitu utamanya dalam perbedaan agama, keyakinan, ideologi, suku, ras, adat istiadat dan kesopanan dan perbedaan situasi ekonomi (Setiadi, dkk., 2006:151).

Dalam interaksi masyarakat dan dalam pergaulan kelihatan menonjol sekali interaksi antara masyarakat yang berbeda latar

belakang agama, suku, bahasa bahkan etnis di pasar dan tempat umum lainnya terjalin baik dan tidak ada perasaan berbeda. Bahkan dari hasil wawancara terungkap justru para pedagang dari Jawa dan Gorontalo justru lebih maju dari pada para pedagang lokal terutama dari segi ekonomi karena mereka lebih ulet daripada pedagang lokal atau masyarakat setempat.

Kendati selama ini relasi dan interaksi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang ketika berada di pasar atau tempat-tempat umum lainnya baik-baik saja, tapi ada juga krikil-krikil kecil dalam mewujudkan toleransi, contohnya kasus penikaman di pasar Tomohon yang dilakukan oleh pedagang pakaian asal Gorontalo terhadap pedagang ikan yang merupakan penduduk lokal. Kejadian ini oleh pihak-pihak tertentu coba dibawa ke isu agama dan etnis bahkan mengarah ke tindakan intoleransi tapi tidak berhasil. Sempat ada eksodus para pedagang asal Gorontalo tapi permasalahan ini bisa diselesaikan lewat cara kekeluargaan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Pemuka-pemuka agama dan Pemerintah Kota Tomohon. Setelah penyelesaian dengan cara kekeluargaan selanjutnya tersangka diproses sesuai hukum yang berlaku karena kejadian ini murni tindakan kriminal. Kejadian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa masyarakat kota Tomohon sudah dewasa dalam menanggapi isu-isu SARA dan tidak terpancing dengan tindakan-tindakan intoleransi.

2. Perilaku Masyarakat dalam Kerukunan Kampung

Dalam masyarakat Minahasa terutama masyarakat Tomohon nilai kekeluargaan merupakan kaedah hidup yang terus dijaga dan dipelihara. Dalam kehidupan kongkrit masyarakat Tomohon, nilai kekeluargaan nampak jelas dalam rukun keluarga, rukun sedaerah asal (Rukun Kawanua), rukun kampung, dan lain-lain. Jenis-jenis kerukunan tersebut sampai saat ini masih menjadi modal sosial yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Tomohon dan masyarakat Minahasa pada umumnya. Fukuyama (1995) mengatakan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang ada dalam diri masing-masing individu ketika mereka melaksanakan aktivitasnya secara

tepat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama-sama oleh kelompok organisasi atau komunitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian juga terungkap bahwa dalam kegiatan sosial semacam kerukunan kampung, masyarakat di Tomohon hadir tanpa memandang perbedaan agama dan suku. Di samping kegiatan-kegiatan sosial di lingkup kelurahan, kegiatan sosial yang paling kental di Minahasa terutama di Tomohon adalah kegiatan-kegiatan *mapalus* arisan yang anggotanya berasal dari latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Bentuk-bentuk kerukunan ini sendiri merupakan bentuk implementasi kongkrit dari prinsip *mapalus*/gotong royong sehingga masyarakat pendatang pun mengadaptasi dan ikut mempraktekannya. Oleh karena itu, ada rasa malu seandainya jika tidak terlibat aktif dan semacam ada sangsi sosial seperti merasa terkucilkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang telah terjadi proses identifikasi. Identifikasi itu sendiri menurut Soekanto (2012:57-58) merupakan keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya agar bisa menjadi sama atau serupa dengan orang lain. Dalam konteks ini identifikasi memiliki sifat yang jauh lebih dalam dari imitasi. Melalui proses identifikasi ini kepribadian seseorang dapat terbentuk. Dalam kehidupannya seseorang membutuhkan tipe-tipe ideal tertentu, oleh karena itu proses identifikasi bisa terjadi secara tidak sadar (dengan sendirinya) ataupun melalui proses yang disengaja. Kendati proses identifikasi bisa dengan sendirinya, namun identifikasi terjadi melalui sebuah keadaan di mana seseorang yang beridentifikasi sungguh-sungguh akrab dengan individu lain yang merupakan idealnya, sehingga sikap, pandangan, ataupun aturan-aturan yang ada pada pihak lain tadi bisa melembaga dan menjiwai dirinya. Menjadi jelas di sini bahwa terjadinya proses identifikasi menyebabkan adanya pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan proses sugesti dan imitasi meskipun juga terdapat kemungkinan lain dimana proses identifikasi bermula dari proses sugesti atau juga imitasi.

Selain kerukunan kampung, masyarakat pendatang memiliki juga bentuk-bentuk kerukunan lain seperti perkumpulan orang Jawa di Tomohon yang bentuknya menyesuaikan dengan adat kebiasaan di Tomohon. Masyarakat anggota rukun ini adalah orang Jawa yang beragama Islam, tapi juga ada juga orang Jawa yang beragama Kristen dan Katolik. Selanjutnya juga ada kerukunan orang Ambon yang diberi nama perkumpulan Kawanua Orang Key Ohoinuhu untuk lingkup Tomohon. Kelompok kerukunan ini menjadi wadah untuk menunjukkan identitas sebagai satu daerah asal. Anggota-anggotanya dalam perkumpulan tersebut sudah merupakan campuran antara masyarakat asli Ambon dan mereka yang sudah kawin dengan penduduk lokal Tomohon. Dari fakta ini terungkap bahwa proses akulturasi sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal dan pendatang di kota Tomohon. Menurut Koentjaraningrat (2002:247-248), akulturasi berkaitan proses sosial yang ditimbulkan saat sebuah kumpulan manusia dengan sebuah budaya tertentu berhadapan dengan budaya dari luar atau budaya asing beserta unsur-unsurnya yang secara perlahan-lahan diolah dan diterima menjadi kebudayaannya dengan tidak membawa akibat kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka agama Islam di kota Tomohon terungkap bahwa masyarakat pendatang yang beragama Islam memandang keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai bagian dari ibadah muamalat atau ibadah sosial. Dalam praktek sosial tidak boleh dibatasi, jadi dalam kegiatan-kegiatan sosial termasuk masyarakat yang beragama Islam diwajibkan ikut berpartisipasi secara aktif dan itulah yang terjadi di kota Tomohon. Jadi walaupun masyarakat pendatang yang notabene agama dan sukunya berbeda dengan masyarakat Tomohon, tapi mereka menyesuaikan dengan budaya setempat di mana jiwa dan semangat *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* menjadi unsur penting yang merekatkan kehidupan di tengah masyarakat. Nampak jelas bahwa *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara* menjiwai cara berpikir dan berperilaku masyarakat lokal di Tomohon. Kendati ada perbedaan etnis, agama dan bahasa dengan masyarakat pendatang, tetapi

masyarakat tetap menerima mereka tanpa memandang latar belakangnya.

Integrasi masyarakat Sulawesi Utara terjaga lewat semboyan *Torang Samua Basudara* yang sekaligus telah menjadi nilai budaya yang diturunkan secara turun temurun. Kenyataan ini bisa ditemukan dengan adanya bentuk-bentuk kelompok sosial, entah yang terbentuk karena perkawinan, kekerabatan akibat pertalian darah, lingkungan tempat tinggal serta mata pencaharian. Keberadaan semua kelompok sosial serta latar belakang agama dan budaya yang berbeda, dianggap merupakan sebuah wadah pertemuan dan wahana komunikasi dalam memperkokoh solidaritas bangsa dengan didorong oleh adanya rasa sebangsa, senasib sepenanggungan, kerukunan serta didasari oleh rasa kebersamaan.

3. Perilaku Masyarakat dalam Acara Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama proses penelitian, dalam acara perkawinan toleransi antara masyarakat yang berbeda agama dan etnis juga nampak jelas. Dalam perkawinan anggota masyarakat yang berbeda agama dan etnis masyarakat pendatang pasti hadir jika diundang begitu pula sebaliknya masyarakat lokal akan hadir dalam acara perkawinan masyarakat berbeda agama dan suku. Di sini ada perasaan rasa bersalah jika diundang oleh tetangga atau orang yang berpesta kemudian tidak hadir. Perbedaan agama dan etnis tidak menghalangi kehadiran dalam perkawinan dan acara-acara syukuran lainnya. Orang di Minahasa dan Tomohon pada khususnya punya kebiasaan beracara ketika ada perkawinan, syukuran hari ulang tahun, syukuran wisuda anak, dan lain-lain.

Selanjutnya hal lain yang muncul dalam hasil wawancara adalah kebiasaan pembagian makanan untuk orang Kristen dan orang Muslim. Dalam setiap acara jika keluarga mengundang masyarakat yang beragama Islam makanannya pasti dimasak oleh orang Muslim atau dari catering orang Muslim dan sudah disendirikan di meja terpisah dengan masyarakat umum. Ketika hendak makan, maka pembawa acara akan mengumumkan pembagian makanan untuk masyarakat umum dan yang beragama

Islam. Tapi walaupun makanannya sudah dipisahkan, tetapi kalau orang Islam tidak tahu siapa dan tidak yakin siapa yang memasak, maka mereka makan nasi dan ikan saja karena takut makan makanan yang tidak halal karena dalam setiap acara orang Tomohon pasti menyediakan menu yang diolah dari daging babi.

Selanjutnya dalam setiap acara suka misalnya perkawinan dan ulang tahun semua tetangga dan kenalan pasti diundang kendati agama dan sukunya berbeda. Bahkan setelah acara tetangga akan dibawakan bungkus makanan oleh tetangga Kristen yang berpesta. Walaupun makanannya tidak mereka makan, tetapi sebagai bentuk penghormatan mereka terima saja. Makanannya tidak dibuang tapi mereka serahkan kepada keluarga atau kenalan yang beragama Kristen.

4. Perilaku Masyarakat dalam Acara Kematian

Selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti acara kematian, masyarakat kota Tomohon baik lokal maupun pendatang akan terlibat secara aktif dan tidak ada penghalang untuk berinteraksi. Dalam acara kematian anggota masyarakat yang berbeda agama pasti datang walaupun tidak mendapat undangan seperti dalam acara perkawinan, apa lagi kalau yang meninggal itu adalah kenalan, tetangga atau orang lain yang sudah dikenal. Tanpa diminta mereka pasti akan pergi untuk turut berbelas sungkawa bahkan terlibat dalam pembuatan bangsal duka. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa di Tomohon ada kebiasaan untuk membawa kue-kue atau makanan bagi keluarga yang berduka. Sebagai contoh apa yang dituturkan oleh bapak Jhon Burdam: “di dekat rumah saya pernah ada seorang guru yang beragama Kristen meninggal, maka teman-teman guru yang beragama Muslim datang berbelasungkawa sambil membawa kue-kue dan makanan untuk keluarga dan turut berbaur dengan masyarakat dan keluarga.” Contoh lain seperti yang diungkapkan bapak Petrus Ohoiledjaan yang mengatakan bahwa: “Dalam acara kematian secara pribadi saya turut hadir tanpa memandang agama bahkan suku dari orang yang meninggal. Misalnya saja waktu lalu ada kejadian di kampung ini ada orang yang meninggal. Suaminya berasal dari Gorontalo dan

istrinya kawin dengan dia kemudian berpindah agama dari Katolik ke Islam. Ketika istrinya meninggal kami hadir bahkan membantu keluarga menyiapkan bangsal duka yang akan digunakan. Masyarakat di sekitar juga berbondong-bondong datang membantu dan turut hadir dalam acara duka tersebut.

Selanjutnya masih dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam acara kematian di kota Tomohon bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk hadir dan turut berbelasungkawa dengan keluarga yang berduka. Untuk masyarakat yang beragama Islam berdasarkan hasil wawancara terungkap bahawa dalam konteks acara kematian biasanya mereka hadir dalam acara seremoni bukan pada saat ibadah berlangsung. Namun jika kami kebetulan hadir pada saat ibadah kami duduk saja dan tidak mengikuti rangkaian ibadah. Mereka tidak mengikuti proses ibadah bukan karena tidak toleran tapi ada akidah tertentu yang harus mereka pegang sebagai orang Islam. Namun yang menarik dan menjadi kebanggaan di kota Tomohon bahwa masyarakat lokal sudah mengerti betul tentang keberadaan masyarakat pendatang yang berbeda agama dan mereka tidak pernah memperlakukan keberadaan mereka.

5. Perilaku Masyarakat dalam Hari-hari Besar Keagamaan

Agama dalam konsep pakar sosial selalu menyertai kehidupan manusia dan akan selalu hadir sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Dalam kehidupannya setiap hari pun manusia tidak luput dari agama (Kahmad, 2006:119). Indonesia sebagai sebuah negara mengakui ada 6 agama, yakni Islam, Buddha, Katolik, Hindu, Kristen serta Kong Hu Cu. Keenam agama resmi yang mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia ini memiliki hari-hari besar keagamaannya masing-masing yang biasanya dirayakan secara ritual dan seremonial dengan melibatkan pemeluk agamanya masing-masing dan juga pemeluk agama lain.

Oleh karena itu dalam konteks Indonesia, hari-hari raya besar keagamaan seyogianya dijadikan momen untuk meningkatkan daya spiritual terutama dalam meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari di tengah keberagaman yang ada. Dalam kehidupan masyarakat

yang lebih spesifik, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat kota Tomohon, perbedaan agama dan suku tidak menghalangi terciptanya toleransi. Menurut Kahmad (2006:114), agama menurut definisi ilmu sosiologi berarti gejala sosial umum dan tanpa kecuali dianut oleh semua masyarakat di dunia. Agama adalah bagian dari sistem sosial dan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial. Selanjutnya Agama pun merupakan unsur dari kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat beserta dengan unsur lain, diantaranya kesenian, sistem organisasi sosial dan sistem peralatan, sistem mata pencaharian. Oleh karena itu, dalam konteks perbedaan agama di Tomohon, ada jiwa saling menghormati perbedaan satu sama lain. Dalam konteks ini toleransi di tengah perbedaan agama nampak jelas dalam acara-acara keagamaan, baik Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu dan Konghucu. Ketika orang Kristen merayakan Natal dan Paskah orang Islam menghormati bahkan sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan menjaga gereja dan begitu juga kalau orang Islam merayakan Idul Fitri orang Kristen atau pemuda kampung turut berjaga di Masjid. Sebagai contoh di Kampung Jawa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam pada saat hari Ketupat (Satu Minggu sesudah hari raya Idul Fitri) sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ada di kota Tomohon bahkan juga yang berasal dari Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Manado dan Bitung.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan umat Islam kota Tomohon yang mengatakan bahwa saat perayaan hari-hari besar agama, misalnya Natal dan Paskah untuk umat Kristen masyarakat beragama Islam di kota Tomohon akan saling mengunjungi anggota keluarga atau kerabat yang merayakan dan tentunya mengucapkan selamat Natal dan Paskah. Begitu pula sebaliknya jika masyarakat beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, maka masyarakat yang Kristen pasti mengunjungi sahabat atau kenala beragama Islam. Biasanya juga yang paling ramai adalah pada saat perayaan hari ketupat. Di Tomohon kebiasaan saling mengundang dan saling hadir dalam acara-acara keagamaan sudah menjadi bagian dari budaya. Contoh yang paling baru yaitu, misalnya ada acara umat Katolik IYD (*Indonesian Youth Day*) dan ada

perarakan Salib di IYD dari Gorontalo sampai ke Kota Manado, maka Pemuda/jemaat Muslim ikut dilibatkan dalam prosesi tersebut. Bahkan salib IYD dibawah keliling ke kampung Jawa yang mayoritas beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Kluckhohn dalam Geertz (1975) yang mengatakan bahwa budaya dapat diartikan sebagai berikut: (a). Total cara hidupi manusia, (b). Warisani sosial dari individu yang didapatkannya dari kelompoknya, (c). Sebuah cara berpikir, perasaan, dan kepercayaan, (d). Sebuah abstraksi dari tingkah laku, (e). Sebuah teori dalam ilmu antropologi tentang bagaimana cara sekelompok orang dalam kelompok bertingkah laku sebuah gabungan dari apa yang dipelajari, (f). Segenap pedoman dasar untuk menyelesaikan masalah, (g). Tingkah laku yang dipelajari, (h). Sebuah mekanisme peraturan yang baku tentang tingkah laku, (i). Segenap teknik untuk menyesuaikan diri ke lingkungan luar dan ke orang lain, (j). Sebuah penerapan dari sejarah dan berbalik, mungkin dalam keputusan, sebagai kiasan, seperti peta, seperti sebuah saringan, dan seperti susunan angka-angka.

Namun dalam konteks perbedaan agama ada kendala tertentu dalam relasi dengan pemeluk agama yang berbeda terutama dalam menghadiri perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti pernyataan Ustad Ramadan Muslim yang mengatakan bahwa oleh fatwa MUI memang orang Islam dilarang untuk mengikuti acara-acara keagamaan selain Islam. Fatwa MUI ini awalnya memang sedikit menghalangi kebiasaan umat Islam untuk hadir dalam acara-acara keagamaan. Tapi lama kelamaan masyarakat beragama Islam mulai hadir dalam acara-acara keagamaan dengan alasan kehadiran itu tidak ditaruh dalam konteks keyakinan, tetapi dalam konteks hubungan sosial/emosional dan demi menjaga toleransi yang sudah lama terjalin.

Untuk mengatasi perbedaan dalam cara pandang tentang fatwa MUI dan untuk memantapkan kerukunan umat beragama sebagai perwujudan semboyan “Torang Samua Basudara” di Tomohon Pemerintah Kota Tomohon, Pimpinan-Pimpinan Agama, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sering melaksanakan kegiatan dialog dan sosialisasi tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkai memberikan pemahaman

tentang kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap agama lain. Toleransi yang berhakikat kerendahan hati manusia itu ternyata bisa berdampak positif, baik bagi manusia dengan pluralitas agamanya maupun bagi agama itu sendiri. Bagi manusia secara umum, toleransi akan membawa kerukunan dan juga kerja sama demi kebaikan bersama. Bagi agama sendiri, toleransi berarti pula memilih untuk bersikap terus mencari, tidak berkubang dalam kemampuan institusi. Dengan memilih bersikap terus mencari, agama menjadi lebih dinamis. Pengakuan tulus akan kemahabesaran Tuhan justru bisa memacu agama untuk lebih mencari makna kemahabesaran itu, juga dalam konteks kini dan di sini untuk lebih memahami kehendak-Nya dalam Bahasa Cogley, agama lalu bisa berinteraksi dengan kemajuan zaman secara aktif, bukan melulu reaktif. Akhirnya, bisa juga dikatakan bahwa prinsip “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” seperti tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Kaafirun ayat 6 adalah sebetuk kearifan yang dalam, bukan sekadar sopan santun pergaulan yang menjamin keamanan semu, melainkan kearifan yang aktif, kearifan demi kemajuan, demi pencarian yang tak kunjung selesai, karena Tuhan senantiasa lebih besar (Andang, 1998:101).

Selain itu juga ada kebiasaan baik di kota Tomohon dalam hal perayaan-perayaan hari besar keagamaan, yaitu saling menjaga tempat ibadah. Misalnya ketika masyarakat Kristen merayakan perayaan Natal atau Paskah, maka pemuda dan bahkan elemen masyarakat Muslim akan mengadakan kegiatan penjagaan gereja selama proses ibadah di dalam gereja berlangsung dan demikian sebaliknya. Pernyataan yang memperkuat temuan ini disampaikan oleh Ustad Zamroni yang mengatakan bahwa dalam menjaga toleransi yang sudah terjaga dengan baik remaja masjid di sini ada agenda rutin setiap tahun ada dua kali penjagaan gereja yaitu pada saat perayaan Natal dan Paskah dan begitu juga sebaliknya di pihak Kristen saat penduduk beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri mereka akan berjaga di kompleks masjid. Jadi di sini ada saling mengamankan perayaan-perayaan keagamaan.

Selanjutnya dalam konteks hubungan antar agama di sini juga ada kebiasaan unik yang terus terjaga, yaitu dalam setiap sambutan

resmi dalam acara pemerintahan, perkawinan, acara syukuran, acara kematian semua salam umat beragama pasti disebutkan. Misalnya dalam mendahului sambutan akan disebutkan salam sebagai berikut: *Syalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh, Namu Buddhaya, Om Swastiastu, Om Santih, Santih, Santih Om*. Hal ini sejalan dengan pendapat Frans Magnis Suseno yang mengatakan bahwa pluralism agama tak lain kesediaan untuk menunjung tinggi pluralitas agama. Pluralisme tidak berarti menyatakan bahwa semua agama sama saja, tidak ada kaitan dengan pertanyaan manakah agama yang benar dan mana yang dianggap paling benar. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama dengan mereka. Oleh karena itu, pluralisme merupakan syarat mutlak agar Indonesia yang begitu plural dapat tetap bersatu. Pluralisme tidak hanya berarti membiarkan pluralitas, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Karena seorang pluralis menghormati dan menghargai sesama manusianya dalam identitasnya, dan itu berarti juga dalam perbedaannya. Seorang humanis dengan sendirinya seorang pluralis (Magnis-Suseno, 2008:27-28).

Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengharuskan penutupan jalan atau sarana publik masyarakat tidak pernah merasa terganggu karena biasanya pawai Paskah, Tapikong, Malam Takbiran justru menjadi tontonan menarik bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas terungkap bahwa dalam kehidupan masyarakat kota Tomohon terutama dalam konteks kehidupan masyarakat berbeda agama suasana toleransi selalu terjaga. Menurut Endang (2012), toleransi pada hakekatnya tumbuh dalam suasana keberagaman, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya yang di dalamnya terkandung kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh karena itu, maka semakin tinggi keberagaman dalam suatu bangsa atau masyarakat, maka akan semakin tinggi juga adanya keharusan untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan

individu dan masyarakat. Dengan tingginya toleransi dalam masyarakat, maka dengan sendirinya akan terwujud adanya keharmonisan hidup dan keserasian, dan terhindar dari adanya ketegangan-ketegangan sosial serta konflik-konflik, bahkan lebih dari itu tidak akan ada pertentangan dan permusuhan antar individu-individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pembagian toleransi, masyarakat Tomohon berada dalam kategori toleransi positif karena ada masyarakat pendatang yang adat istiadat dan kebiasaannya berbeda dengan penduduk setempat. Kendati berbeda latar belakang suku, ras, agama dan adat istiadat dengan penduduk setempat, tetapi mereka bergaul dengan baik dengan penduduk di mana mereka tinggal. Karena cara bergaul mereka yang baik, masyarakat setempat menerima mereka dengan baik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama bahkan istiadat yang mereka miliki. Toleransi positif dalam hal ini memiliki tingkatan di atas toleransi negatif (Rahman, 2018).

6. Norma-Norma yang Berlaku dalam Masyarakat

Relasi dan interaksi antara seorang dan kelompok lain adalah hakekat dasar hidup individu setiap hari. Di dalam interaksi sosial tersebut, masing-masing individu memainkan perannya masing-masing sesuai dengan status sosial, kedudukan serta peran masing-masing. Norma dan nilai yang ditaati dalam masyarakat mendasari tindakan manusia di tengah interaksi sosialnya. Norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi pegangan setiap individu dalam mengusakan kebutuhan dan kepentingan hidupnya tanpa merugikan orang lain apalagi melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian kehidupan yang tentram, aman dan tertib bisa terwujud. Manusia dalam kehidupannya di tengah masyarakat pada hakekatnya senantiasa ada dalam pengaruh kaidah-kaidah, norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta pula diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Intinya di sini bahwa setiap individu tunduk pada kaidah-kaidah sosial yang memiliki sifat mengikat bahkan ditaati oleh anggotanya dimana pun kaidah dan aturan itu diterapkan.

Dalam konteks masyarakat kota Tomohon, maka tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang berlaku pada masyarakat Minahasa pada umumnya. Menurut Turang (1997:21), konsep nilai moral yang menjadi orientasi masyarakat Minahasa dan terungkap lewat perilaku sosial, yaitu: (1) Masigi-sigian (saling menghormati satu sama lain); (2) Masaali (pelayanan, terutama anak kepada orang tua); (3) Marukup (kebersamaan/solidaritas); (4) Masuat peleng / Paumung (musyawarah-mufakat); (5) Mapalus (saling membantu).

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari antara masyarakat lokal dan pendatang tidak pernah ada orang yang menyinggung agama dan suku. Bahkan dalam perkataan pun tidak pernah. Masyarakat di sini punya jiwa saling menghormati yang tinggi. Selama ini belum pernah ada kejadian konflik antar agama dan suku di sini. Pernah ada kejadian penikaman yang dilakukan oleh seorang pedagang asal Gorontalo beragama Muslim terhadap orang lokal beragama Kristen. Oleh oknum tertentu coba diangkat menjadi isu SARA, tetapi tidak berhasil. Masyarakatnya tetap tenang dan pelakunya diproses secara hukum.

Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan masyarakat kota Tomohon nilai moral yang berlaku sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sejauh ini memang belum ada kejadian-kejadian yang begitu menonjol soal isu SARA, tetapi kalau pun terjadi maka sangsi moral berupa pengucilan dari masyarakat pasti berlaku bagi sang pelaku dan tentunya norma hukum akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Norma-norma yang ditaati oleh setiap individu dan masyarakat memegang peran serta fungsi penting dalam mengontrol macam-macam perilaku yang berkembang di dalam setiap masyarakat. Norma dalam pengertiannya yang paling dasar merupakan kumpulan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan diikuti semua anggota suatu masyarakat dalam lingkup sosialnya masing-masing. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan di dalamnya terkandung sangsi sosial yang berfungsi sebagai pencegah anggota masyarakat dalam melakukan perbuatan atau tindakan menyimpang dari tata cara maupun adat istiadat yang ada di dalam masyarakatnya. Peraturan-

peraturan kolektif ini pada umumnya hanya bersifat lisan namun dimengerti betul oleh masing-masing anggota masyarakatnya serta memiliki fungsi dan peran dalam mempengaruhi tingkah laku masing-masing individu dalam interaksi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Contoh kongkrit aturan-aturan kolektif tersebut, misalnya: bagaimana baiknya menghormati argument individu lain, cara menghormati orang tua dan yang lebih tua, aturan untuk tidak mencurangi orang lain, norma untuk hidup sehat, norma dalam kehidupan bersama dan lain sebagainya. Semakin kuatnya norma-norma kolektif tersebut dalam suatu masyarakat, asosiasi, komunitas atau group, maka akan memperkokoh kehidupan masyarakat tersebut terutama dalam menghadapi pengaruh arus globalisasi. Dengan demikian di dalam sebuah modal sosial, norma yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan unsur penunjang dalam terbentuknya sebuah kohensi sosial yang terus dihidupi dan diperkuat oleh anggota-anggota kelompok sebuah masyarakat.

7. Komunikasi dengan Media Bahasa antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang

Bahasa merupakan sarana atau alat yang digunakan dalam menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Tapi, dalam arti luas juga bahasa merupakan alat atau sarana untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Dalam interaksi antara masyarakat, bahasa memegang peranan yang penting. Masyarakat kota Tomohon adalah bagian dari suku Minahasa terutama sub-etnis Tombulu. Sub-etnis Tombulu dalam pergaulan setiap hari menggunakan bahasa Tombulu. Namun dalam relasi dan interaksi masyarakat pada umumnya maka sering pula digunakan bahasa Manado dan bahasa Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber terungkap bahwa dalam komunikasi dan interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Indonesia dan Manado. Kecuali masyarakat pendatang yang lancar berbahasa Tombulu, maka dalam interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lokal mereka akan menggunakan bahasa Tombulu.

D. Nilai-nilai yang Menimbulkan Toleransi dan Keberagaman Hubungan Agama dan Etnis:

1. Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*

Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan sebuah kepercayaan, konsep dan ide yang menjadi pegangan dalam membuat pilihan ketika hendak berpiki serta bertindak mengenai sesuatu yang tidak pantas dan pantas dilakukan. Nilai yang terkandung dalam budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* telah mendorong seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk bersikap toleran terhadap orang yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, budaya, dan bahasa.

Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* artinya dalam kehidupan setiap hari hakekat hidup manusia adalah proses memanusiakan orang lain menjadi manusia yang seutuhnya. Budaya ini merupakan ungkapan filosofis orang Minahasa terutama sejak Kekristenan masuk ke Tanah Minahasa, kemudian secara intelektual diangkat kembali oleh Sam Ratulangi. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa ungkapan *Si Tou Timou Tumou Tou* memang ungkapan ini tercermin dari cari hidup orang-orang Tomohon terbuka dan bergaul tanpa membedakan latar belakang suku dan agama orang lain. Dari segi historis ungkapan ini merupakan filosofi masyarakat Minahasa dan menjadi kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. *Wisdom* atau kearifan merupakan sebuah pemberian arti secara kolektif, kebijaksanaan dan pengetahuan yang ada pengaruhnya terhadap penanggulangan masalah dalam kehidupan dan mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian. Jadi intinya kearifan di sini adalah pengejawantahan unsur pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok masyarakat yang mengalami proses perkembangan, diaman komunitas atau kelompok masyarakat ini melalui interaksi yang lama terhimpun sebagai akibat dari proses dan pengalaman panjang dan di dalamnya ada sebuah sistem bahkan ada ikatan hubungan yang bersifat mutualisme (Marfai, 2012:33). Oleh karena itu sebagai suatu kearifan lokal ungkapan ini telah menjadi landasan berpikir orang Tomohon dan orang Minahasa pada umumnya. Sejak kecil anak-anak sudah didik dan menjiwai ungkapan *si tou timou tumou tou* ini dan hal ini

terbawa terus sampai mereka besar. Dan dalam arti tertentu ungkapan ini “muntep”/mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kota Tomohon dan masyarakat Minahasa pada umumnya.

Berdasarkan penuturan para narasumber terungkap bahwa *Si Tou Timou Tumou Tou* oleh masyarakat Minahasa serta Tomohon pada khususnya dipandang sebagai suatu kepercayaan, ide dan konsep mengenai apa yang layak dan tidak layak dilakukan dalam kehidupannya. *Si Tou Timou Tumou Tou* di dalamnya mengandung nilai dasar yang telah mendorong masyarakat Tomohon untuk bersikap toleran terhadap orang yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, budaya, dan bahasa.

Temuan penelitian ini mempertegas pendapat Geertz (1975) yang mengatakan bahwa budaya adalah: *“an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and their attitudes toward life”*. Geertz menjelaskan bahwa budaya adalah “Pola transmisi historis dari arti yang termasuk dalam simbol-simbol, atau sebuah sistem konsepsi yang disajikan dan diwariskan di dalam cara manusia berkomunikasi, yaitu dalam bentuk simbol-simbol, mengembangkan dan melestarikan pengetahuan yang mereka miliki dan bagaimana mereka menyikapi kehidupannya.” Berdasarkan definisinya tentang budaya, Geertz mau menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz melihat budaya sebagai “lengkung simbolis” atau “blueprint” yang dengannya seseorang bisa menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Sutrisno & Putranto, 2005:212).

2. Nilai budaya Mapalus

Mapalus merupakan budaya dominan masyarakat Sulawesi Utara. *Mapalus* dalam arti yang sederhana berarti bentuk kerjasama atau gotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Istilah *Mapalus* itu sendiri merupakan gabungan dari kata *ma* (saling) dan

palus (tuang, tumpah). Jadi secara etimologis *Mapalus* berarti saling menumpah atau saling menuang. Konsep “*Si Tou Timou Tumou Tou*” dalam kenyataan hidup insan Minahasa / Sulawesi Utara, sejak semula telah tumbuh dan berkembang dalam wujud ethos kerja *Mapalus* atau *Maendo* (Bahasa Tountemboan). Dalam konteks ini *Mapalus* bisa dipandang merupakan suatu bentuk aktualisasi terkongkrit mengani arti terdalam dari “*Si tou timou tumou tou.*” Nilai budaya *Mapalus* dalam prakteknya secara jelas dapat dilihat dari empat asas aktualisasinya, yaitu musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keagamaan dan kerjasama), serta lima aspek dalam pengornisasian prinsip hidup *Mapalus*, yaitu: keterbukaan, tolong menolong, kebersamaan, disiplin kelompok, dan hasil guan-daya guna. Budaya *mapalus* ini sering saya dengar. *Mapalus* itu seperti gotong royong atau salin membantu satu sama lain. Nilai *Mapalus* di sini diterapkan dengan baik, dan menyebabkan jiwa saling membantu itu tertanam betul pada masyarakat Tomohon. *Mapalus* sangat berpengaruh terhadap cara pikir dan bertindak masyarakat kota Tomohon bahkan sudah mengakar dan mendarah daging yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerukunan kampung, kerukunan semarga, dan lain-lain. Nilai budaya *mapalus* ini dalam budaya orang Minahasa *mapalus* merupakan suatu hal yang terus terjaga sampai saat ini. Nilai *mapalus* begitu kental dalam kehidupan sehari-hari, misalnya semangat saling menolong, berkumpul bersama dalam kerukunan-kerukunan marga dan kerukuan sosial lainnya. *Mapalus* adalah sebuah sistem nilai kehidupan masyarakat yang teraktualisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai aktualiasi hakekat manusia sebagai makhluk kerja. Nilai *mapalus* inilah yang membuat orang Minahasa dan orang Tomohon pada khususnya menjadi begitu toleran terhadap orang-orang pendatang. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward B. Tylor (1871) sebagaimana dikutip oleh Munch & Smelser (1992:39) yang mengatakan bahwa budaya atau peradaban merupakan sebuah totalitas kompleks dari kepercayaan, seni, pengetahuan, adat-istiadat, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dan keterampilan-keterampilan lain yang diperoleh manusia dalam hakekatnya sebagai bagian dari suatu masyarakat.

Mapalus juga merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara khususnya Minahasa dan Tomohon. Mapalus sudah lama ada menjadi pegangan masyarakat dalam berpikir, bertindak dan berperilaku di tengah perbedaan masyarakat.

3. Semboyan Torang Samua Basudara.

Torang Samua Basudara merupakan semboyan yang dicetuskan oleh tokoh nasional asal Sulut E. E. Mangindaan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Semboyan *Torang Samua Basudara* sudah tumbuh dan berkembang sejak lama menjadi nilai dan budaya dominan bagi masyarakat Sulawesi Utara. *Torang Samua Basudara* sebagai sebuah semboyan telah diimplementasikan dan dihayati dalam kehidupan kongkrit masyarakat Nyiur Melambai/Sulawesi Utara. Bahkan semboyan ini telah diakui secara luas sebagai suatu kearifan lokal yang kuat dan kokoh bahkan menjadi penangkal terhadap macam-macam ancaman konflik, utamanya ketika di Indonesia pada rentang tahun 1998-2000 terjadi konflik sosial. Torang Samua Basudara telah menjadi slogan yang sangat populer di Bumi Nyiur Melambai / Sulawesi Utara. Slogan ini bukan hanya slogan kosong, tetapi telah menjadi bagian hidup dari masyarakat Sulawesi Utara. Ini terbukti dari kondusifnya keamanan, kerukunan, dan harmoni masyarakat Sulawesi Utara. Prinsip Torang Samua Basudara menjadi identitas masyarakat Sulawesi Utara yang secara perlahan telah menjadi perhatian secara nasional dan internasional. Sehubungan dengan nilai budaya *Torang Samua Basudara* ini begitu kental dalam kehidupan masyarakat Tomohon. Nilai budaya ini juga Sangat terpelihara dengan baik dan menjiwai kehidupan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya dan kota Tomohon pada khususnya. Semboyan ini muncul ketika pemerintah Sulawesi Utara pada waktu itu bapak E. E. Mangindaan menjabat sebagai Gubernur menyadari bahaya konflik SARA karena Sulawesi Utara menjadi tempat pengungsian para korban kerusuhan Ambon, Ternate, Posso. Oleh karena itu mulai saat itu mulai didengungkan semboyan Torang Samua Basudara sebagai alat perekat masyarakat Sulawesi Utara.

Nilai budaya Torang Samua Basudara sangat terpelihara dengan baik dan menjiwai kehidupan masyarakat kota Tomohon. Prinsip hidup inilah yang menjadi modal penting terciptanya sikap toleransi masyarakat kota Tomohon terhadap masyarakat pendatang yang berbeda agama dan suku.

Torang Samua Basudara menjadi hakikat dasar terjadinya toleransi dalam masyarakat yang beragama terutama dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan penuh keharmonisan. Masyarakat Sulawesi Utara adalah masyarakat multikultural yang dibentuk oleh adanya budaya, suku, kepercayaan dan agama yang berbeda. Perbedaan pengalaman dan pergaulan, sifat, coran dan tingkat Pendidikan merupakan hakekat paling dasar dari manusia sebagai makhluk sosial. Karakter setiap manusia terbentuk karena adanya perbedaan budaya, pendidikan dan pengalaman hidupnya. Peyesuaian diri dalam masyarakat adalah hal yang lebih bijaksana dari pada memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Fallon, O'Keeffe, & Sugai, 2012:9) yang mengatakan bahwa budaya berkaitan erat dengan kelompok individu, terutama tingkahlaku verbal yang dipelajari secara turun temurun. Bagaimana kelompok tertentu membedakan dirinya dengan kelompok lain dan bagaimana individu itu bertindak dalam situasi yang spesifik. Artinya, "budaya" mencerminkan perkataan dan perilaku-perilaku umum yang dipelajari dari konteks dan lingkungan budaya tertentu secara terus-menerus baik yang disebabkan oleh tindakan atau objek (stimulus) yang didefinisikan sebagai konteks tertentu.

Nilai budaya Torang Samua Basudara secara jelas menjadi alat pemersatu dan penjaga kerukunan hidup masyarakat Sulawesi Utara. Dengan kata lain *torang samua basudara* telah menjadi modal sosial bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Tomohon pada khususnya. Kenyataan ini sejalan dengan teori Woolcock (1998) tentang modal sosial yang menurutnya merupakan tingkatan sebuah integritas sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan *social trust*, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya Suharto (2016),

mengertikan modal sosial merupakan sebuah *resource* atau sumber yang dihasilkan oleh adanya komunikasi dan interaksi di antara individu-individu yang merupakan anggota sebuah komunitas atau masyarakat. Kendati begitu, dalam kenyataannya pengukuran terhadap interaksi jarang dilibatkan dalam pengukuran modal sosial. Di sini terpeliharanya dan terciptanya atau kepercayaan antar warga suatu masyarakat merupakan hasil dari interaksi mereka setiap hari. Suatu interaksi bisa berlangsung dalam konteks individual ataupun lembaga (institusional). Dalam konteks individual, terjadinya sebuah interaksi yang melahirkan ikatan emosional sebagai akibat dari adanya hubungan yang mendalam antara individu dalam masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, interaksi bisa muncul manakala tujuan dan visi sebuah organisasi mempunyai persamaan dengan tujuan dan visi kelompok atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, fakta berbicara bahwa ketika daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi Utara (SULUT) terbakar emosi untuk berkonflik dengan mengatasnamakan agama, ternyata SULUT sulit disulut dan tetap hidup dalam kerukunan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Toleransi dalam keberagaman hubungan antara agama dan etnis pada masyarakat kota Tomohon berjalan dengan baik. Toleransi yang baik terwujud dalam interaksi masyarakat kota Tomohon di pasar dan tempat-tempat umum lainnya yang berlangsung dengan baik karena adanya budaya dan agama yang dianut masyarakat lokal. Interaksi di pasar menunjukkan adanya wujud nyata toleransi dalam masyarakat kota Tomohon. Budaya lokal, sikap menghormati dan menerima dengan terbuka budaya luar mendukung terwujudnya sikap toleransi antara masyarakat lokal dan pendatang. Adanya acara perkawinan, kematian dan hari-hari besar keagamaan menjadi sarana pendukung terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang di kota Tomohon. Adanya norma-norma yang baik dalam masyarakat lokal didukung dengan pola komunikasi yang baik antara masyarakat lokal dan pendatang melahirkan sikap toleran masyarakat kota Tomohon. Dalam kerukunan kampung toleransi tetap terjaga karena merupakan implementasi budayai *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus* dan *Torang Samua Basudara*. Dalam acara perkawinan dan acara syukuran lainnya masyarakat pendatang hadir dan ada pembagian makanan halal dan tidak halal. Dalam acara kematian perbedaan agama dan etnis tidak menghalangi kehadiran kehadiran masyarakat. Toleransi masyarakat kota

Tomohon di tengah perbedaan agama nampak dalam kehadiran dalam hari-hari besar keagamaan, saling menjaga tempat ibadah dan kebiasaan mengucapkan salam semua agama. Norma yang berlaku di Tomohon sama dengan norma Masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahasa yang digunakan dalam interaksi masyarakat lokal dan pendatang di Tomohon adalah bahasa Indonesia dan Manado.

2. Nilai-nilai yang menimbulkan toleransi dalam keberagaman hubungan antar agama dan etnis masyarakat kota Tomohon adalah nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara*. *Si Tou Timou Tumou Tou* (manusia hidup untuk memanusikan orang lain), merupakan nilai budaya masyarakat Minahasa dan menjadi nilai dasar dalam kehidupan yang berfungsi sebagai pendorong, pengendali kehidupan, baik dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup, maupun untuk pengembangan dirinya. *Mapalus* adalah sebuah sistem hidup masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, merupakan aktualisasi hakekat manusia sebagai insan kerja, berke-Tuhan-an, serta patuh pada aturan sistem nilai masyarakat. *Torang Samua Basudara* berarti kita semua bersaudara merupakan *the way of life* (cara dan pandangan hidup) seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat kota Tomohon pada khususnya. *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* mempengaruhi masyarakat Tomohon sehingga toleran dalam keberagaman agama dan etnis. *Torang Samua Basudara* menjadi fondasi dasar dalam menjaga toleransi di Kota Tomohon.

B. Implikasi Teoritik dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Hasil kajian tentang toleransi dalam keberagaman masyarakat lokal: studi fenomenologi hubungan antara agama dan etnis di Sulawesi Utara mendukung teori dan konsep multikulturalisme. Menurut Azra (2007) multikulturalisme merupakan pemahaman manusia tentang dunia yang kemudian diaplikasikan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan, dimana ada

penerimaan terhadap kenyataan adanya keragaman budaya, agama, suku, dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme bisa juga dilihat sebagai pemahaman tentang dunia yang pada akhirnya termanifestasi dalam kesadaran politik. Sejalan dengan pendapat ini Mahfud (2009:75) mengatakan bahwa dalam konsep multikulturalisme masing-masing individu merasa dihormati dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat. Penolakan oleh suatu kelompok terhadap adanya kebutuhan terhadap pengakuan (*politic of recognition*) adalah akar setiap ketimpangan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan manusia.

Selanjutnya juga hasil kajian ini menguatkan teori Koentjaraningrat (2002) tentang masyarakat yang merupakan kumpulan manusia yang berinteraksi dan saling saling bergaul satu sama lain. Dalam kenyataannya kesatuan hidup manusia ini berelasi sejalan dengan sebuah sistem kebudayaan serta adat istiadat tertentu yang sifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Interaksi masyarakat lokal dan pendatang di kota Tomohon berjalan aktif dalam arti tegur sapa selalu mendahului dalam setiap perjumpaan, kendati belum kenal dan belum tahu latar belakang agama dan etnis. Semua orang dianggap sama derajatnya karena sesuai dengan semboyan *Si Tou Timou Tumou Tou* artinya manusia hidup untuk memanusiaikan sesamanya atau individu lain dan semboyan *Torang Samua Basudara* (Kita Semua Bersaudara). Oleh karena itu dalam perilakunya setiap hari, masyarakat kota Tomohon selalu pengaruh nilai budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan teori perilaku sosial yang merupakan kumpulan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh nilai, emosi, adat, sikap, etika, genetika, persuasi dan kekuasaan (A. Hasyim Nawawie, 2009:17 dalam Sinulingga, 2012:11).

Selanjutnya kajian ini juga sejalan dengan konsep modal sosial terutama konsep *trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakni bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling

mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 2007). Selanjutnya hal ini sesuai juga dengan teori (Fukuyama, 1995) tentang *trust* yang merupakan suatu keadaan di mana ada saling mempercayai di antara anggota-anggota dalam suatu masyarakat dimana dengan *trust* tersebut mereka membentuk suatu kesatuan dengan yang lain serta memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan modal sosial.

Selain faktor budaya, faktor lain yang turut mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat kota Tomohon terhadap masyarakat pendatang yang berbeda agama dan etnis adalah agama yang dianut penduduk lokal. Hal ini mendukung teori Nottingham (1994) tentang agama yang mengatakan bahwa pada umumnya agama menjelaskan kenyataan bahwa nilai yang dimiliki oleh hampir semua masyarakat tidak hanya sebagai kesatuan nilai yang tercampur-aduk, melainkan tersusun dalam tingkat (hirarki). Agama menetapkan nilai-nilai yang *tertinggi* dalam hirarki ini. Oleh karena itu, maka budaya dan agama menjadi dua hal penting yang sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat lokal kota Tomohon dalam membangun sikap toleransi terhadap masyarakat pendatang yang berbeda agama dan etnis.

Selanjutnya dalam perilaku masyarakat dalam interaksi mereka dengan masyarakat lokal biasanya masuk melalui suku. Para pendatang awalnya mengenal dulu budaya, kebiasaan, cara bergaul, tutur kata, sampai sopan santan masyarakat lokal kota Tomohon. Hal ini sejalan dengan teori interaksi simbolik dimana yang menjadi karakteristik paling dasarnya ialah adanya adanya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat ataupun hubungan antara suatu masyarakat dengan anggotanya yang terjadi secara alami. Dalam hal ini simbol-simbol yang mereka ciptakan merupakan tanda terjadinya interaksi di antara mereka. Di sini suatu realitas sosial dipandang sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang dialami oleh sekelompok orang di dalam masyarakatnya. Dalam proses interaksi individu-individu yang ada di dalamnya dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, interaksi simbolik berhubungan dengan gerak fisik, suatu atau vocal, gerak tubuh, serta ekspresi tubuh seseorang. Semuanya itu

memiliki arti dan maksud dan dalam perspektif ini disebut sebagai “simbol” (Wirawan, 2014).

Para pendatang mengalami cara-cara masyarakat setempat walaupun mungkin awalnya bertentangan dengan suku, agama tradisi tempat mereka berasal, tapi mereka meredam itu semua dan masuk ke dalam lingkup budaya lokal. Hal ini sejalan dengan teori imitasi yang pada hakekatnya adalah suatu tindakan atau perilaku manusia yang didasarkan pada apa yang ia lihat atau tiru dari orang lain. Faktor penting yang mempengaruhi proses imitasi adalah tingkat jangkauan indra seorang individu, jadi apa yang ia imitaskan sebatas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan (Kolip & Setiadi, 2011). Imitasi memiliki kedudukan yang sentral di dalam suatu proses interaksi. Segi positif dari faktor imitasi ialah seseorang terdorong dalam menaati nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Weber yang mengatakan bahwa dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian *memilih* tindakan (Jones, dkk., 2016).

Perbedaan suku, agama memang ada, tapi perbedaan justru menjadi satu kekayaan di tengah keberagaman masyarakat kota Tomohon. Keberagaman dalam konteks kehidupan masyarakat adalah suatu keadaan dimana ada perbedaan mendasar dalam berbagai segi kehidupan, yaitu utamanya dalam perbedaan agama, keyakinan, ideologi, suku, ras, adat istiadat dan kesopanan dan perbedaan situasi ekonomi (Setiadi, dkk. 2006).

Dalam masyarakat Minahasa terutama masyarakat Tomohon nilai kekeluargaan merupakan kaedah hidup yang terus dijaga dan dipelihara. Dalam kehidupan kongkrit masyarakat Tomohon, nilai kekeluargaan nampak jelas dalam rukun keluarga, rukun sedaerah asal (Rukun Kawanua), rukun kampung, dan lain-lain. Jenis-jenis kerukunan tersebut sampai saat ini masih menjadi modal sosial yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Tomohon dan masyarakat Minahasa pada umumnya. Menurut Fukuyama (1995)

sebagaimana dikutip oleh Hasbullah (2006) mendeskripsikan modal sosial berkaitan dengan bagaimana seorang individu dalam aktivitasnya dan dalam interaksinya dengan orang lain dapat menyesuaikan diri, terutama dalam mencapai tujuan bersama suatu organisasi atau komunitas.

Bentuk-bentuk kerukunan ini sendiri merupakan bentuk implementasi kongkrit dari prinsip *mapalus/gotong royong* sehingga masyarakat pendatang pun mengadaptasi dan ikut mempraktekannya. Oleh karena itu, ada rasa malu seandainya jika tidak terlibat aktif dan semacam ada sanksi sosial seperti merasa terkucilkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang telah terjadi proses identifikasi. Identifikasi itu sendiri menurut Soekanto merupakan keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya agar bisa menjadi sama atau serupa dengan orang lain. (Soekanto, 2012).

Selain kerukunan kampung masyarakat pendatang memiliki juga bentuk-bentuk kerukunan lain seperti perkumpulan orang Jawa di Tomohon yang bentuknya menyesuaikan dengan adat kebiasaan di Tomohon. Dari fakta ini terungkap bahwa proses akulturasi sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat lokal dan pendatang di kota Tomohon. Menurut Kontjaraningrat (2002), akulturasi berkaitan proses sosial yang ditimbulkan ketika suatu kelompok manusia dengan sebuah kebudayaan tertentu berhadapan dengan kebudayaan asing beserta unsur-unsurnya yang secara perlahan-lahan diolah dan diterima menjadi kebudayaannya dengan tidak membawa akibat kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Menurut para ilmuwan sosial, kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut agama. Bahkan, dalam kehidupan manusia tak luput dari agama (Kahmad, 2006).

Menurut Kahmad (2016), agama menurut pengertian sosiologi berarti gejala sosial umum yang tanpa kecuali dimiliki oleh seluruh masyarakat berada di dunia ini. Agama adalah bagian dari sistem sosial dan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial. Selanjutnya Agama pun merupakan unsur dari kebudayaan yang

dimiliki oleh suatu masyarakat selain unsur lain, diantaranya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, sistem organisasi sosial dan sistem peralatan. Oleh karena itu, dalam konteks perbedaan agama di Tomohon, ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Toleransi dalam perbedaan agama nampak jelas dalam acara-acara keagamaan, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Ketika orang Kristen merayakan Natal dan Paskah orang Islam menghormati bahkan sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan menjaga gereja dan begitu juga kalau orang Islam merayakan Idul Fitri orang Kristen atau pemuda kampung turut berjaga di Masjid. Sebagai contoh di Kampung Jawa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam pada saat hari Ketupat (Satu Minggu sesudah hari raya Idul Fitri) sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ada di kota Tomohon bahkan juga yang berasal dari Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Manado dan Bitung.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kluckhohn tentang budaya sebagaimana dikutip oleh Geertz (1975) yang mengatakan bahwa budaya dapat diartikan sebagai berikut: (a). Total cara hidup manusia, (b). Warisan sosial dari individu yang diperoleh dari kelompoknya, (c). Sebuah cara berpikir, perasaan, dan kepercayaan, (d). Sebuah abstraksi dari tingkah laku, (e). Sebuah teori dalam ilmu antropologi tentang bagaimana cara sekelompok orang dalam kelompok bertingkah laku sebuah gabungan dari apa yang dipelajari, (f). Segenap pedoman dasar untuk menyelesaikan masalah, (g). Tingkah laku yang dipelajari, (h). Sebuah mekanisme peraturan yang baku tentang tingkah laku, (i). Segenap teknik untuk menyesuaikan diri ke lingkungan luar dan ke orang lain, (j). Sebuah penerapan dari sejarah dan berbalik, mungkin dalam keputusan, sebagai kiasan, seperti peta, seperti sebuah saringan, dan seperti susunan angka-angka.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kota Tomohon terutama dalam konteks kehidupan masyarakat berbeda agama suasana toleransi selalu terjaga. Menurut Endang (2009), toleransi pada hakekatnya tumbuh dalam suasana keberagaman, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya yang di dalamnya terkandung kebiasaan-kebiasaan, tradisi

atau adat istiadat yang menyertainya. Oleh karena itu, maka semakin tinggi keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa atau masyarakat, maka akan semakin tinggi juga adanya keharusan untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan tingginya toleransi dalam masyarakat, maka dengan sendirinya akan terwujud adanya keserasian dan keharmonisan hidup, dan terhindar dari adanya konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan lebih dari itu tidak akan ada pertentangan dan permusuhan antar individu-individu dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks masyarakat kota Tomohon, maka tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang berlaku pada masyarakat Minahasa pada umumnya. Menurut Turang (1997), konsep nilai moral yang menjadi orientasi masyarakat Minahasa dan terungkap lewat perilaku sosial, yaitu: (1) Masigi-sigian (saling menghormati satu sama lain); (2) Masaali (pelayanan, terutama anak kepada orang tua); (3) Marukup (kebersamaan/solidaritas); (4) Masuat peleng / Paumung (musyawarah-mufakat); (5) Mapalus (saling membantu).

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat memegang peran dan fungsi penting dalam mengontrol macam-macam perilaku yang berkembang di dalam setiap masyarakat. Norma dalam pengertiannya yang paling dasar merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua anggota suatu masyarakat dalam lingkup sosialnya masing-masing. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan di dalamnya terkandung sanksi sosial yang berfungsi sebagai pencegah anggota masyarakat dalam melakukan perbuatan atau tindakan menyimpang dari tata cara maupun adat istiadat yang ada di dalam masyarakatnya. Peraturan-peraturan kolektif ini pada umumnya hanya bersifat lisan namun dimengerti betul oleh masing-masing anggota masyarakatnya serta memiliki fungsi dan peran dalam mempengaruhi tingkah laku masing-masing individu dalam interaksi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Contoh kongkrit aturan-aturan kolektif tersebut adalah: bagaimana cara menghormati pendapat orang lain, cara menghormati orang yang lebih tua, norma untuk hidup sehat, norma untuk tidak mencurangi orang lain, norma dalam kehidupan

bersama dan lain sebagainya. Semakin kuatnya norma-norma kolektif tersebut dalam suatu masyarakat, asosiasi, komunitas atau group, maka akan memperkokoh kehidupan masyarakat tersebut terutama dalam menghadapi pengaruh arus globalisasi. Dengan demikian di dalam sebuah modal sosial, norma yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan unsur penunjang dalam terbentuknya sebuah kohensi sosial yang terus dihidupi dan diperkuat oleh anggota-anggota kelompok sebuah masyarakat.

Nilai budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan suatu kepercayaan, konsep serta ide yang dijadikan patokan untuk menentukan pilihan dalam berpikir dan bertindak tentang sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Nilai yang terkandung dalam budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* telah mendorong seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk bersikap toleran terhadap orang yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, budaya, dan bahasa. Dari segi histori ungkapan ini merupakan filosofi masyarakat Minahasa dan menjadi kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. *Wisdom* atau kearifan merupakan sebuah pemberian arti secara kolektif, kebijaksanaan dan pengetahuan yang ada pengaruhnya terhadap penanggulangan masalah dalam kehidupan dan mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian. Jadi intinya kearifan di sini adalah pengejawantahan kesimpulan pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok masyarakat yang mengalami proses perkembangan, dimana komunitas atau kelompok masyarakat ini melalui interaksi yang lama terhimpun sebagai akibat dari proses dan pengalaman panjang dan di dalamnya ada sebuah sistem bahkan ada ikatan hubungan yang bersifat mutualisme (Marfai, 2012).

Temuan penelitian ini mempertegas pendapat Geertz (1975) yang mengatakan bahwa budaya adalah "Pola transmisi historis dari arti yang termasuk dalam simbol-simbol, atau sebuah sistem konsepsi yang disajikan dan diwariskan di dalam cara manusia berkomunikasi, yaitu dalam bentuk simbol-simbol, mengembangkan dan melestarikan pengetahuan yang mereka miliki dan bagaimana mereka menyikapi kehidupannya." Berdasarkan definisinya tentang budaya, Geertz mau menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada

sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Geertz melihat budaya sebagai “lengkung simbolis” atau “*blueprint*” yang dengannya seseorang bisa menciptakan dunia mereka yang bermakna dalam dua level sekaligus: emosi dan kognitif (Sutrisno dan Putranto, 2005).

Nilai mapalus inilah yang membuat orang Minahasa dan orang Tomohon pada khususnya menjadi begitu toleran terhadap orang-orang pendatang. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward B. Tylor (1871) sebagaimana dikutip oleh Munch & Smelser (1992) yang mengatakan bahwa budaya atau peradaban merupakan sebuah totalitas kompleks dari kepercayaan, seni, pengetahuan, hukum, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh manusia dalam hakekatnya sebagai bagian dari suatu masyarakat.

Torang Samua Basudara (Kita Semua Bersaudara) merupakan semboyan yang dicetuskan oleh tokoh nasional asal Sulut E. E. Mangindaan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Semboyan *Torang Samua Basudara* telah lama diakui sebagai nilai sekaligus budaya bagi masyarakat masyarakat Sulawesi Utara.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Fallon, dkk (2011:9) yang mengatakan budaya berkaitan erat dengan kelompok individu, terutama tingkahlaku verbal yang dipelajari secara turun temurun. Bagaimana kelompok tertentu membedakan dirinya dengan kelompok lain dan bagaimana individu itu bertindak dalam situasi yang spesifik. Artinya, “budaya” mencerminkan perkataan dan perilaku-perilaku umum yang dipelajari dari konteks dan lingkungan budaya tertentu secara terus-menerus baik yang disebabkan oleh tindakan atau objek (stimulus) yang didefinisikan sebagai konteks tertentu.

Nilai budaya *Torang Samua Basudara* secara jelas menjadi alat pemersatu dan penjaga kerukunan hidup masyarakat Sulawesi Utara. Dengan kata lain *torang samua basudara* telah menjadi modal sosial bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Tomohon pada khususnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Woolcock (1998) yang mengatakan bahwa modal sosial merupakan tingkatan kohesi sosial dalam suatu masyarakat. Ia mengacu pada proses-proses antar orang

yang membangun jejaring, norma-norma, dan *social trust*, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Suharto (2016) mengertikan modal sosial merupakan sebuah *resource* atau sumber yang dihasilkan oleh adanya komunikasi dan interaksi di antara individu-individu yang merupakan anggota sebuah komunitas atau masyarakat. Kendati begitu, dalam kenyataannya pengukuran terhadap interaksi jarang dilibatkan dalam pengukuran modal sosial. Di sini terpeliharanya dan terciptanya atau kepercayaan antar warga suatu masyarakat merupakan hasil dari interaksi mereka setiap hari. Suatu interaksi bisa berlangsung dalam konteks individual ataupun lembaga (institusional). Dalam konteks individual, terjadinya sebuah interaksi yang melahirkan ikatan emosional sebagai akibat dari relasi intim antara individu yang ada di dalamnya. Dalam konteks kelembagaan (institusional), interaksi bisa muncul manakala tujuan dan visi sebuah organisasi mempunyai persamaan dengan tujuan dan visi kelompok atau organisasi lainnya.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka posisi penelitian ini mendukung teori kebudayaan Geertz yang mengatakan bahwa budaya merupakan transmisi historis dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol, suatu sistem konsepsi yang diwariskan dan disajikan dalam bentuk simbol-simbol cara manusia berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka dan sikap mereka terhadap kehidupan. Selanjutnya Geertz juga menegaskan bahwa budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konstitutif dari kehidupan sosial daripada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial.

Dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara* merupakan transmisi historis dari simbol-simbol yang ada dalam kehidupan masyarakat Tomohon secara umum masyarakat Sulawesi Utara. Ketiga nilai budaya ini pun dalam kehidupan kongkrit masyarakat Tomohon dan Sulawesi Utara telah menjadi sistem konsepsi yang diwariskan dan disajikan dalam bentuk simbol-simbol cara manusia berkomunikasi dalam keberagaman agama dan etnis, melestarikan kebiasaan-

kebiasaan baik dalam masyarakat, dan mengembangkan pengetahuan mereka dan sikap mereka terhadap kehidupan yang saling menghidupkan dalam semangat toleransi dan persaudaraan.

2. Implikasi Praktis

Hasil kajian ini memiliki implikasi praktis, antara lain: (1) Toleransi pada masyarakat kota Tomohon yang tercermin dari adanya interaksi dan aktivitas masyarakat di pasar, tempat umum lainnya, kerukunan kampung, pada acara perkawinan, acara kematian dan hari-hari besar keagamaan. (2) Terwujudnya toleransi antara masyarakat lokal dan pendatang yang berbeda suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat karena adanya norma-norma yang terdapat dalam masyarakat kota Tomohon dan ada komunikasi yang baik antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di kota Tomohon. (3). Sikap toleransi masyarakat lokal di Tomohon tetap hidup karena didukung oleh budaya *Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus* serta *Torang Samua Basudara*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2011). Memusnahkan Akar Kebencian Antarsesama. [Online]. Tersedia: <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/03/memusnahkan-akar-kebencian-antarsesama/> (8 September 2012).
- Ali, Mukti. (1990). Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia. Bandung: Penerbit Miza.
- Ananina, V., & Danilov, D. (2015). Ethnic Tolerance Formation Among Students of Russian Universities: Current State, Problems, and Perspectives. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 214, 487-496.
- Andang, A. (1998). Agama yang Berpijak dan Berpihak. Jakarta: Kanisius.
- Arisandi, H. (2015). Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi: Dari Klasik Sampai Modern. Yogyakarta: IRCiSOD.
- Assegaf, A. (2001). "Memahami Sumber Konflik Antariman", dalam *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei.
- Azra, A. (2002). Konflik Baru antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (2007). Identitas dan Krisis Budaya. Membangun Multikulturalisme Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Bagus, L. (2000). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baidhawy, Z. (2006). Ber-Islam Di Era Multikulturalisme. [Online]. Tersedia:

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=589> (15 Oktober 2010).

- Barker, C. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Berry, D. (2005). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. (Terj. Wirutomo). Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Bertens, K. (2006). *Filsafat Barat Kontemporer: Perancis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Coleman, J. S. (2000). *Social Capital In The Creation Of Human Capital*. Dalam *Knowledge and social capital* (pp. 17-41). Elsevier.
- Endang, B. (2012). Mengembangkan Sikap Toleransi dan Kebersamaan di Kalangan Siswa. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1(2), 89-104.
- Fallon, L. M., O'Keeffe, B. V, & Sugai, G. (2012). Consideration of culture and context in school-wide positive behavior support: A review of current literature. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 14(4), 209-219. Retrieved from <http://pbi.sagepub.com/content/14/4/209> [03
- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. (Terj. Nurhadi). Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Geertz, C. (1975). Common sense as a cultural system. *The Antioch Review*, 33(1), 5-26.
- Geertz, C. (1977). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: BASIC Books (NY).
- Gelles, R. J., & Levina, A. (1995). *Sociology: An Introduction*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Gobyah, I. K. (2003). *Berpijak pada Kearifan Lokal*. <http://www.balipos.co.id> (Diakses: 06 November 2015).
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Haridison, A. (2013). Modal Sosial Dalam Pembangunan. Dalam: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan. Vol. 4 Juli 2013.
- Haryanto, S. (2012). Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hasbullah, J. (2004). Modal Sosial: Menuju Keunggulan Budaya Manusia. Jakarta: MR-United Press.
- Herimanto dan Winarno. (2014). Ilmu sosial & Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, P., & dkk. (2016). Pengantar Teori-Teori Sosial. (Terj. Achmad F. Saifuddin). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Kahmad, D. (2006). Sosiologi Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Koentjaraningrat. (1974). Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1990). Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kolip, U., & Setiadi, E. M. (2011). Pengantara Antropologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi, dan Pemecahannya (Cet. Ke-2). Jakarta: Prenada Media Group.
- Krishnamurti, J. (1982). Bebas Kekerasan. Malang: Yayasan Krishnamurti.
- Kymlicka, W. (2002). Kewargaan Multikultural. (F. B. Hardiman, Ed.). Jakarta: LP3ES.
- Liliweri, A. (2005). Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Mahfud, C. (2009). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Malin, H., Ballard, P. J., & Damon, W. (2015). Civic purpose: An integrated construct for understanding civic development in adolescence. *Human Development*, 58(2), 103-130. <https://doi.org/10.1159/000381655>
- Marfai, M. A. (2012). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Menoh, G. A. B. (2015). *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Jakarta: Kanisius.
- Muldoon, R., Borgida, M., & Cuffaro, M. (2012). The Conditions of Tolerance. *Politics, Philosophy & Economics*, 11(3), 322-344. Retrieved from <http://ppe.sagepub.com/content/11/3/322>
- Munch, R., & Smelser, N. J. (1992). *Theory of Culture*. California: University of California Press.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasikun, J. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Ngarawula, B. (2012). *Memahami Nasionalisme Masyarakat Lokal: Perspektif Sosiologis*. Malang: UM Press.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nottingham, E. K. (1994). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ohoitumur, Y. (2002). "Membangun Masyarakat Basis Multikultural: Beberapa Gagasan Dasar Tentang Ideal Masyarakat Baru," *Media: Jurnal Filsafat Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng*, 1/1 (Januari 2002).
- Ohoitumur, Y. (2002). *Membangun Masyarakat Berbasis Multikultural: Beberapa Gagasan Dasar Tentang Ideal Masyarakat Baru*. *Media: Jurnal Filsafat Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng*, 1(1).
- Ohoitumur, Y. (2004). *Beragama Dalam Masyarakat: Antara Rindu dan Gelisah*. Jakarta: Garba Marina, 2004.
- Pangalila, T. (2010). "Multikulturalisme dan Implikasinya dalam Hubungan antar Umat Beragama di Indonesia." *Jurnal*

Pembangunan Jurusan Geografi FIS Unima. 2/2 (Desember 2010).

- Pangalila, T. (2013). Pengaruh internalisasi nilai budaya Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus dan Torang Samua Basudara Dalam Pembelajaran PKn Terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa: Penelitian Survey Terhadap Siswa SMA di Kota Tomohon-Sulawesi Utara. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Panikkar, R. (1994). Dialog Intra Religius. Terj. J. Dwi Helly Purnomo dan P. Puspobinatmo. Yogyakarta: Kanisius.
- Pickering, P. (2006). How to Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik. (Terj. Masri Maris). Jakarta: Erlangga.
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137-174.
- Rahman, H. (2018). Sikap Toleransi dan Empati Sosial Terhadap Keberagaman Budaya. Retrieved March 23, 2018, from <https://smknp1sukaraja.sch.id/web/2018/02/03/sikap-toleransi-dan-empati-sosial-terhadap-keberagaman-budaya/>
- Raihani. (2011). A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia. *School Field*, 9(1), 23-39.
- Ritzer, G. (2011). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Cet. 11). Jakarta: Rajagrafindo Pratama.
- Ritzer, G. (2015). Etnometodologi dalam Ilmu Sosial. Yogyakarta. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Rizki, A. (2011). Fenemena Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia yang Berujung Pada Tindak Terorisme. [Online]. Tersedia: <http://www.alxy.co.cc/2011/03/fenemena-kekerasan-atas-nama-agama-di.html> (8 September 2012).
- Rohaedi, A. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Senduk, W. (2000). Ekonomi Tamber. Manado: Lentera Minahasa.
- Setiadi, E. M., Hakam, K. A., & Effendi, R. (2006). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soelaeman, M. M. (2010). *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sondakh, A. J. (2002). *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi atas Nilai-nilai Manusia*. Jaka: Pustaka Sinar Harapan.
- Supardan, D. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, M., & Putranto, H. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius.
- Suyanto, B., & Amal, M. K. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. (B. Suyanto & M. K. Amal, Eds.), Yogyakarta: Adityamedia. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Syamsiar, S. (2010). Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Sebagai Sumber Gagasan Berkarya Seni Rupa. *Jurnal ISI Surakarta*, 2(1). Retrieved from <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/brikolase/article/view/414>
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Si Tou Timou Tumou Tou: Suatu Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Minahasa Menuju Tinggal Landas Pembangunan*. Manado.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tillman, D. (2004). *Living Values: Activities for Children Ages 8-14*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Togatorov, A. (2012). Mengungkap akar Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural Indonesia. [Online]. Tersedia: <http://www.armhando.com/2012/02/mengungkap-akar-kekerasan-dalam.html> (8 September 2012).
- Turang, J. (1997). *Profil Kebudayaan Minahasa*. Tomohon: Majelis Kebudayaan Minahasa.
- Umbas, V. (2011). *Mapalus: Gagasan dan Ajaran*. Retrieved April 16, 2015, from

- [http://cahyasiangwilsonlumi.wordpress.com/2011/01/13/malus-gagasan-ajaran/](http://cahyasiangwilsonlumi.wordpress.com/2011/01/13/malalus-gagasan-ajaran/)
- Wirawan, I. B. (2014). *Teori-Teori Sosial: Dalam Tiga Paradigma (Cet. Ke-3)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wirutomo, K. dkk. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: LabSocio dan UI Press.
- Wirutomo, P. dkk. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Poso
- <http://happycristian.blogspot.com/2012/03/makna-di-balik-ungkapan-sitou-timou.html>).
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcb8b567941d/kekerasan-atas-nama-agama-masih-meningkat>

GLOSARIUM

Bhinneka Tunggal Ika	: Berbeda-beda tetapi tetap satu
Le Carrefour Javanis	: Perempatan Jawa sebutan sejarawan Prancis Denys Lombard untuk pulau Jawa
Self Contained	: Memenuhi kebutuhan sendiri
Common Sosial Will	: Memiliki cita-cita yang sama
Etnis	: sejumlah orang yang memiliki persamaan ras dan warisan budaya yang membedakan mereka dengan kelompok lainnya
GMIM	: Gereja Masehi Injili di Minahasa
SARA	: Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
Local Wisdom	: Kearifan lokal atau gagasan-gagasan, nilai, budaya setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya
Si Tou Timou Tumou Tou	: Manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain
Mapalus	: Gotong royong/jenis kerjasama dalam masyarakat suku Minahasa
Torang Samua Basudara	: Kita Semua Bersaudara
Agama	: Ungkapan hubungan antara manusia dengan Yang Ilahi, yaitu kekuasaan yang kudus yang dianggap lebih tinggi dari pada manusia itu

sendiri. Kepada Yang Ilahi manusia mengalami daya tarik (*fascinosum*) tetapi sekaligus juga merasa takut (*tremendum*). Namun di antara semua perasaan itu manusia terutama mengalami ketergantungan kepada Yang Ilahi.

- Nilai : Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat
- Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya
- Budaya : Berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan “budi” atau “akal”
- Keberagaman : Suatu kondisi dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi
- Plural Society : Masyarakat majemuk, untuk menunjukkan masyarakat Indonesia yang beragam, beraneka, berjenis-jenis dalam hal agama, suku dan adat istiadat.
- Masyarakat : Sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan adanya sifat-sifat yang saling tergantung, adanya pembagian kerja dan kebudayaan bersama
- Crescive Institution : Lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
- Enacted institution : Lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- Basic institution : Lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat

Subsidiary Institution	: Lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting oleh masyarakat, seperti rekreasi
Approved and sanctioned institution	: Lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat.
Unsanctioned institution	: Lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya
General institution	: Lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia
Restricted institution	: Lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu
Operative institution	: Lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan
Regulative institution	: Lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat
Community	: “Masyarakat setempat”, yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa
Akulturas	: Perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut
Modal Sosial	: Sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas
Lineage	: Jaringan hubungan pada kelompok sosial yang terbentuk secara tradisioal atas dasar kesamaan garis keturunan
repeated social experiences	: Jaringan hubungan pada kelompok sosial yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman sosial turun temurun
religious beliefs	: Jaringan hubungan pada kelompok sosial yang terbentuk dari kesamaan kepercayaan ada

	dimensi ketuhanan
Resiprocity	: Asas timbal balik, yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar mereka yang mengadakan hubungan.
Social Trust	: Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakni bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya
Altruism	: Semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain
Norma	: sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu
Ma	: Saling, menggambarkan pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara timbal balik atau berbalasan
Palus	: Tuang, tumpah, mengandung makna dari yang berisi ke yang kosong; yang ada mengisi pada yang kosong.
Cultural pattern	: Pola-pola budaya
Cooperation	: Kerjasama
Working Togetherness	: Kerja Bersama
Principle of reciprocity	: Prinsip timbal-balik
To welfare	: Mensejahterakan
To humanity	: Memanusiakan
The way of life	: Cara dan pandangan hidup
Meaningful action	: Tindakan sosial bermakna
Verstehen	: Teori sosiologi Max Webber yang menekankan pada tingkah laku atau perbuatan si pelaku yang memiliki arti subyektif, kehendak mencapai tujuan, serta di dorong motivasi.
Zwerk Rational	: Tindakan rasionalitas instrumental

Werk Rational	: Tindakan rasional nilai
Affectual Action	: Tindakan afektif
Traditional Action	: Tindakan tradisional
Phenomenon	: Segala realitas yang tampak
Logos	: Ilmu atau pengetahuan
Fenomenologi	: Ilmu tentang fenomena-fenomena tau apa saja yang tampak
Imitasi	: Tindakan manusia untuk meniru tingkah laku pekerti orang lain yang berada di sekitarnya.
Sugesti	: Proses dimana seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain
Identifikasi	: Kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.
Simpati	: Proses tertariknya seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok orang terhadap orang atau kelompok lain
Social Contact komunikasi	: Kontak sosial : Suatu keadaan di mana seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut
Asosiatif	: Hubungan postif yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini bersifat membangun serta mempererat atau memperkuat hubungan jalinan solidaritas dalam kelompok masyarakat untuk menjadi satu kesatuan yang lebih erat.
Cooperation	: Kerjasama atau suatu usaha berama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama

Asimilasi	: Suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing
Akomodasi	: Suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.
Disasosiatif	: Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan dan merenggankan rasa solidaritas kelompok
Oposisi	: Bentuk proses sosial dimana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi.
Konflik	: Suatu proses dimana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
Perilaku Sosial	: Sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika
Metodos	: Metode, jalan atau cara
Etnometodologi	: Sebuah studi atau ilmu tentang metode yang digunakan oleh orang awam atau masyarakat biasa untuk menciptakan perasaan keteraturan atau keseimbangan di dalam situasi dimana mereka berinteraksi
Social Force	: Kekuatan Sosial
Muntep	: Masuk dan mandarah daging di dalam diri orang atau kelompok orang
Akulturasasi	: Merupakan proses penerimaan kebudayaan-kebudayaan lain ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian asli ataupun ciri khas dari kebudayaan sendiri
Masigi-sigian	: Saling menghormati satu sama lain
Masaali	: Pelayanan, terutama anak kepada orang tua

Masuat : Musyawarah-mufakat
peleng/Paumung
Marukup : Kebersamaan/solidaritas



Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils, M.Pd. Lahir di Taratara (Tomohon) Sulawesi Utara pada tahun 1983. Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Manado-Sulawesi Utara) tahun 2003 dan selesai tahun 2007. Tahun 2008 diangkat menjadi dosen pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Manado. Tahun 2011 melanjutkan kuliah program magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan lulus pada tahun bulan Juni 2013 dengan predikat *Cum Laude*. Tahun 2015 melanjutkan kuliah program Doktoral (S3) di Pascasarjana Universitas Merdeka Malang Program Studi Ilmu Sosial dan lulus pada bulan September 2018. Tahun 2013-2016 menjabat sebagai Sekretaris Prodi S1 Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Manado. Tahun 2016-saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FIS Universitas Negeri Manado. Saat ini penulis aktif membina mata kuliah Filsafat Pancasila, Etika Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Ilmu Politik di Jurusan PPKn Universitas Negeri Manado. Penulis juga aktif melakukan penelitian tentang toleransi.



Jeane Mantiri S.AB, M.A.P. Lahir di Manado Sulawesi Utara pada tahun 1983. Sarjana Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2001 dan selesai tahun 2005. Tahun 2012 melanjutkan kuliah program magister di Universitas Negeri Manado Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan lulus pada tahun 2014.

Tahun 2015 diangkat menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Saat ini penulis membina mata kuliah: Kewirausahaan Terapan, Pengembangan Organisasi, Administrasi Perpajakan, Filsafat Administrasi Publik, Administrasi Keuangan Daerah, Administrasi Keuangan Negara, Teori Organisasi dan Perilaku Organisasi.